



Puji dan Syukur kami panjatkan ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Berkat dan perkenan-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017–2022, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Flores Timur tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yaitu masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga LKIP Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2021 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Larantuka, Maret 2023

BUPATI FLORES TIMUR,


Drs. DORIS ALEXANDER RIHI, M.Si



Sebagai unsur penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan mengelola dan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki, maka Pemerintah Kabupaten Flores Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam mewujudkan *Good Governance*.

Akuntabilitas (*accountability*) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas Birokrasi Publik atau pelayanan yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodir kebutuhan riil masyarakat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah pelayan publik atau *public server* harus bertanggung jawab secara langsung kepada masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Flores Timur memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di tahun 2022 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2022. LKIP ini merupakan representasi dari hasil kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini, karena OPD yang dibentuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam bentuk program dan kegiatan untuk mempertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder dan masyarakat. LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan sehingga adanya perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2022 dilaksanakan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 dan Perjanjian Kinerja 2021. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran serta program dan kegiatan yang bersifat operasional.

LKIP ini mengungkapkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan dan upaya pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.



6.	Terwujudnya Perencanaan Dan Pengendalian Tata Ruang Kota	100	BAIK
Rata-rata Misi II		355,77	BAIK
Misi III : Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur.			
Terdapat 2 tujuan, 1 sasaran dan 10 indikator kinerja			
1.	Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal	108,79	BAIK SEKALI
Rata- rata Misi III		108,79	BAIK SEKALI
Misi IV : Selamatkan Laut Flores Timur			
Terdapat 2 tujuan, 3 sasaran dan 7 indikator kinerja			
1.	Meningkatkan Volume Perdagangan komoditas unggul daerah	49,81	KURANG
2.	Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut	50,0	KURANG
3.	Meningkatnya Produksi Perikanan	80,0	BAIK
Rata-rata Misi IV		179,8	BAIK SEKALI
Misi V : Reformasi Birokrasi			
Terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 20 indikator kinerja			
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	281,42	BAIK SEKALI
2.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif	216,68	BAIK SEKALI
Rata rata Misi V		498,10	BAIK SEKLAI
Rata-rata Misi I - V		93,94	BAIK

Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2022 mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada tahun ketiga periode Pembangunan Lima Tahun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan akan menjadi tahapan yang baik untuk RPJMD tahap berikutnya demi terciptannya pembangunan yang diharapkan bagi masyarakat Kabupaten Flores Timur.





Upaya-upaya atau *effort* yang dilakukan dalam pencapaian kinerja untuk mewujudkan dan mencapai sasaran pembangunan pada masing-masing Bidang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah dilaksanakan secara *powerfull* dengan tingkat pencapaian yang bervariasi. Secara umum pencapaian kinerja tahun 2021 dalam mewujudkan sasaran yang dikehendaki tergolong berhasil.

Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini :

NO	MISI	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	SKALA ORDINAL
Misi I : Selamatkan Orang Muda Flores Timur			
Terdapat 2 tujuan, 7 sasaran dan 36 indikator kinerja			
1.	Meningkatnya Kemandirian Orang Muda	12,7	KURANG
2.	Meningkatkan Kesempatan Kerja	100,0	BAIK
3.	Meningkatnya Karakter Orang Muda Dan Wawasan Kebangsaan	100,0	BAIK
4.	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan	118,75801	BAIK SEKALI
5.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	71,0	CUKUP
6.	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Atas Kesejahteraan Sosial	131,2	BAIK SEKALI
7.	Meningkatkan Peran Perempuan Anak Serta Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak	108,68	BAIK SEKALI
Rata-rata Misi I		642,32	BAIK SEKALI
Misi II : Selamatkan Infrastruktur Flores Timur			
Terdapat 4 tujuan, 6 sasaran dan 14 indikator kinerja			
1.	Meningkatkan Kinerja Transportasi	7,59	KURANG
2.	Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Untuk Mendukung Aktivitas Ekonomi Sosial Budaya	104,41716	BAIK SEKALI
3.	Mengurangi Resiko Akibat Bencana Alam	1,8	KURANG
4.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	42,0	KURANG
5.	Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Perumahan Dan Lingkungan Permukiman	100	BAIK





3.37	Program Pendukung dan Anggaran tahun Sasaran 17	83
3.38	Analisis Pencapaian Sasaran 18 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	84
3.39	Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 18	87
3.40	Analisis Pencapaian Sasaran 19 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif	88
3.41	Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 19	89
3.42	Anggaran dan Realisasi APBD Kab. Flores Timur TA. 2021	90





DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	li
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Kabupaten Flores Timur	2
1.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	16
1.4 Sistematika	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategi Tahun 2017-2022	23
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	36
2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT)	41
2.4 Perjanjian Kinerja (PK)	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020	49
3.2 Analisis Capaian	52
3.3 Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur	90
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	93
4.2 Saran Tindak Lanjut	93
LAMPIRAN	
1. Pernyataan Telah Direviu Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur	
2. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Tahun 2021	
3. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
4. Rencana Kinerja Tahunan 2022 Kabupaten Flores Timur	
5. SOP Penyusunan LKIP Kabupaten Flores Timur	



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Peta Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015	2
1.2 Indek Pembangunan Manusia NTT Tahun 2015 – 2019	11



**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 Jumlah Desa dan Kelurahan serta Luas Kecamatan di Kabupaten Flores Timur Tahun 2020	3
1.2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Menurut Kecamatan Tahun 2022	4
1.3 Penduduk Flores Timur Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022	5
1.4 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin, 2021	6
1.5 PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah) Tahun 2016-2020	7
1.6 PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah) Tahun 2017-2021	9
1.7 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2021	10
1.8 Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022	15
1.9 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2022	16
1.10 Data Jabatan Sturktural menurut Jumlah Jabatan, Jabatan Terisi dan Jabatan Lowong	16
2.1 Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan	31
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Flores Timur	36
2.3 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Flores Timur	42
2.4 Program dan Anggaran Tahun 2022	46
3.1 Skala Pengukuran Ordinal	50
3.2 Pencapaian Indikator Sasaran	51
3.3 Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	51
3.4 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kemandirian Orang Muda	53
3.5 Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 1	54
3.6 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatkan Kesempatan Kerja	55
3.7 Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 2	55
3.8 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Karakter Orang Muda Wawasan Kebangsaan	56
3.9 Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 3	56
3.10 Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan	57



3.11	Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 4	60
3.12	Analisis Pencapaian Sasaran 5 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	60
3.13	Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 5	64
3.14	Analisis Pencapaian Sasaran 6 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang atas Kesejahteraan Sosial	64
3.15	Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 6	65
3.16	Analisis Pencapaian Sasaran 7 Meningkatkan Peran Perempuan Anak Serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	65
3.17	Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 7	66
3.18	Analisis Pencapaian Sasaran 8 Meningkatkan Kinerja Transportasi	67
3.19	Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 8	67
3.20	Analisis Pencapaian Sasaran 9 Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Untuk Mendukung Aktivitas Ekonomi Sosial Budaya	68
3.21	Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 9	69
3.22	Analisis Pencapaian Sasaran 10 Mengurangi Resiko Akibat Bencana Alam	70
3.23	Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 10	70
3.24	Analisis Pencapaian Sasaran 11 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	71
3.25	Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 11	72
3.26	Analisis Pencapaian Sasaran 12 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman	72
3.27	Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 12	73
3.28	Analisis Pencapaian Sasaran 13 Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang Kota	73
3.29	Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 13	75
3.30	Analisis Pencapaian Sasaran 14 Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal	75
3.31	Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 14	78
3.32	Analisis Pencapaian Sasaran 15 Meningkatkan Volume Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah	79
3.33	Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 15	80
3.34	Analisis Pencapaian Sasaran 16 Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut	80
3.35	Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 16	81
3.36	Analisis Pencapaian Sasaran 17 Meningkatnya Produksi Perikanan	82



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 ditanyakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2 Gambaran Umum Kabupaten Flores Timur

1.2.1 Kondisi Geografi

Letak, Luas, Batas Wilayah Administrasi dan Kondisi Geografi Kabupaten Flores Timur terletak antara 08°04'-08° 40'LS dan 122°38'-123°57'BT. Dengan luas wilayah seluruhnya 5.983,38 km², terdiri dari luas daratan 1.812,85 km² (31% luas wilayah) yang tersebar pada 3 pulau besar dan 27 pulau kecil serta luas lautan 2.064,65 km² (69% luas wilayah), dan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sikka, dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lembata.

Gambar 1.1

Peta Wilayah Kabupaten Flores Timur



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kab. Flores Timur
(Sumber: RTRW Kab. Flores Timur, 2007-2027)

Topografi Kabupaten Flores Timur merupakan wilayah berbukit dan bergunung. Kondisi alam tersebut ditandai dengan tingkat kemiringan 12 %, ketinggian rata-rata di atas 100 m, dan memiliki tekstur tanah antara kasar dan sedang. Tingkat Kondisi wilayah geografis yang demikian dibarengi dengan keadaan iklim yang kering mengakibatkan wilayah Flores Timur rawan bencana longsor dan banjir. Kabupaten Flores Timur berada dalam jalur gunung api yang masih aktif sebanyak 4 (empat) gunung yaitu gunung Lewotobi laki-laki dan perempuan, gunung Leraboleng di Pulau Flores dan gunung Ile Boleng di Pulau Adonara. Kabupaten Flores Timur memiliki 290 mata air yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan debit antara 0,5-20 liter

perdetik. Sumber mata air tersebut umumnya berada pada kawasan hutan dengan luas 44,390,78 Ha. Kondisi klimatologi mengalami 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Kabupaten Flores Timur terdiri dari 19 kecamatan terbagi ke dalam 229 desa dan 21 kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tanjung Bunga yakni 257,57 km² (14,21% dari total luas Kabupaten Flores Timur), sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Solor Selatan yakni sebesar 1,74%. Rincian luas wilayah Kabupaten Flores Timur menurut kecamatan sebagaimana pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Jumlah Desa dan Kelurahan serta Luas Kecamatan
di Kabupaten Flores Timur Tahun 2020

Pulau	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas Daerah Area (Km ²)	Luas (%)
	1. Wulanggitang	11	-	225,85	12,46
	2. Titehena	14	-	154,84	8,54
	3. Tanjung Bunga	16	-	257,57	14,21
	4. Ile Mandiri	8	-	72,76	4,01
	5. Larantuka	2	18	48,91	2,70
	6. Demon Pagong	7	-	85,40	4,71
	7. Ile Bura	7	-	118,32	6,53
	8. Lewolema	7	-	92,84	5,12
Flores	Timur Daratan	72	18	1.056,49	58,28
	9. Solor Barat	14	1	128,20	7,08
	10. Solor Timur	17	-	66,56	3,68
	11. Solor Selatan	7	-	31,58	1,74
Solor		38	1	226,34	12,50
	12. Adonara Barat	18	-	79,71	4,40
	13. Wotan Ulumado	12	-	86,31	4,76
	14. Adonara Timur	19	2	91,06	5,02
	15. Ile Boleng	21	-	49,30	2,72
	16. Witihamia	16	-	79,43	4,38
	17. Klubagolit	12	-	44,41	2,45
	18. Adonara Tengah	13	-	42,73	2,36
	19. Adonara	8	-	56,80	3,13
Adonara		119	2	529,75	29,22
Flores Timur		229	21	1.812,58	100

Sumber : BPS, Kabupaten Flores Timur Dalam Angka 2020

1.2.2 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Flores Timur tahun 2022 sebanyak 293,590 jiwa yang mendiami wilayah seluas 1.812,58 km² dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 162 Jiwa/Km². Dengan kepadatan sebesar ini, sebenarnya Flores Timur belum menghadapi masalah kependudukan. Akan tetapi kalau dilihat dari potensi alam yaitu lahan kering yang tidak subur, lahan sawah yang tidak berpengairan dan sedikit lahan sawah yang berpengairan maka Flores Timur juga menghadapi masalah kependudukan.

Perbandingan luas wilayah, jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kepadatan penduduk di setiap kecamatan dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Menurut Kecamatan Tahun 2022

KECAMATAN	Luas Wilayah (Km ²)	Jenis Kelamin			Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Wulanggitang	225,85	7,740	7,827	15,567	61 Jiwa/Km ²
Titehena	154,84	6,950	7,050	14,000	288 Jiwa/Km ²
Larantuka	48,91	20,822	20,868	41,690	197 Jiwa/Km ²
Ile Mandiri	72,76	6,091	6,083	12,174	212 Jiwa/Km ²
Tanjung Bunga	257,57	7,770	7,757	15,527	143 Jiwa/Km ²
Solor Barat	128,20	5,713	6,126	11,839	156 Jiwa/Km ²
Solor Timur	66,56	8,456	8,827	17,283	233 Jiwa/Km ²
Adonara Barat	79,71	7,315	7,294	14,609	62 Jiwa/Km ²
Wotan Ulumado	86,31	5,354	5,374	10,728	84 Jiwa/Km ²
Adonara Timur	91,06	15,604	16,554	32,158	483 Jiwa/Km ²
Klubagolit	44,41	6,352	6,999	13,351	423 Jiwa/Km ²
Witihama	79,43	8,860	9,656	18,516	170 Jiwa/Km ²
Ile Boleng	49,30	8,846	9,746	18,592	362 Jiwa/Km ²
Demon Pagong	85,40	2,598	2,610	5,208	67 Jiwa/Km ²
Lewolema	92,84	5,130	5,089	10,219	226 Jiwa/Km ²
Ile Bura	118,32	3,985	3,920	7,905	136 Jiwa/Km ²
Adonara	56,80	6,036	6,505	12,541	270 Jiwa/Km ²
Adonara Tengah	42,73	7,129	7,318	14,447	258 Jiwa/Km ²
Solor Selatan	31,58	3,510	3,726	7,236	95 Jiwa/Km ²
FLORES TIMUR	1.812,58	144,261	149,329	293,590	162 Jiwa/Km²

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Larantuka dengan 41,690 jiwa dan jumlah penduduk terkecil di Kecamatan Demon Pagong dengan jumlah 5,208 jiwa.

1.2.2.1 Penduduk Menurut Berdasarkan Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut umur dapat memberikan suatu ciri terhadap penduduk, apakah tergolong sebagai penduduk yang produktif atau yang tidak produktif. Komposisi seperti ini dapat menggambarkan pola perilaku sosial ekonomi penduduk. Penduduk yang berumur 0–14 tahun dan yang berumur lebih dari 64 tahun dikategorikan sebagai penduduk yang tidak produktif. Komposisi penduduk menurut umur di Flores Timur dapat disajikan pada tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3 Penduduk Flores Timur Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	00-04	8,486	7,766	16,252	109.27
2	05-09	13,231	11,969	25,200	110.54
3	10-14	14,412	13,404	27,816	107.52
4	15-19	15,334	14,320	29,654	107.08
5	20-24	14,500	13,559	28,059	106.94
6	25-29	11,975	11,588	23,563	103.34
7	30-34	10,392	10,462	20,854	99.33
8	35-39	9,863	9,901	19,764	99.62
9	40-44	8,510	9,237	17,747	92.13
10	45-49	8,143	9,550	17,693	85.27
11	50-54	7,308	8,505	15,813	85.93
12	55-59	6,260	7,686	13,946	81.45
13	60-64	5,001	6,288	11,289	79.53
14	65-69	3,842	5,185	9,027	74.10
15	70-74	2,722	3,949	6,671	68.93
16	75+	4,282	5,960	10,242	71.85
Jumlah		144,261	149,329	293,590	96.61

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Flores Timur, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk usia muda (15-24 tahun) sangat mendominasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Flores Timur tengah memasuki era bonus demografi, dimana kelebihan penduduk usia produktif bisa

dimanfaatkan untuk peningkatan pembangunan. Berdasarkan Rasio Jenis Kelamin penduduk Flores Timur sebesar 96,61, artinya diantara 100 perempuan terdapat 96 sampai 97 laki-laki.

1.2.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. TPAK adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Untuk melihat bagaimana keadaan TPAK di Kabupaten Flores Timur akan disajikan dalam Tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4

Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin 2022

Jenis Kegiatan	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	70811	63230	134041
a. Bekerja	68165	61642	129807
b. Pengangguran	2646	1588	4234
Bukan Angkatan Kerja	15555	37106	52661
a. Sekolah	7128	7213	14341
b. Mengurus Rumah Tangga	3043	25392	28435
c. Lain - lain	5384	4501	9885
Jumlah	86366	100336	186702

Sumber : BPS, Kabupaten Flores Timur Dalam Angka 2022

Dari tabel 1.4. di atas, dapat kita ketahui bahwa pada Tahun 2022 Kabupaten Flores Timur memiliki jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja lebih banyak dibandingkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja. Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja sebanyak 134.041 orang sedangkan yang bukan angkatan kerja sebanyak 52.661 orang. Dari total penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk dalam angkatan kerja, penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan.

1.2.3 Kondisi Ekonomi

1.2.3.1 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total produk/nilai tambah semua sector ekonomi yang beroperasi di wilayah Kabupaten Flores Timur dalam satu periode/tahun tertentu. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku ialah total produk/nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi pada satu tahun yang dinilai dengan harga satuan per komoditi pada tahun tersebut. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan adalah total produk/nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang dinilai dengan harga satuan per komoditi pada satu tahun tertentu.

Penyajian PDRB Atas Dasar Harga Berlaku bertujuan memberikan gambaran tentang jumlah nilai tambah (PDRB) yang telah dibentuk oleh setiap kegiatan ekonomi pada periode berjalan (berlaku). Disamping itu juga dapat diperoleh gambaran tentang peranan dari setiap kegiatan ekonomi dalam membentuk nilai tambah maupun rata-rata pendapatan penduduk pada periode berjalan. Tabel 1.5 berikut ini dapat kita lihat bagaimana perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dari tahun 2016 sampai dengan 2020

Tabel 1.5

**PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)
Tahun 2017-2021**

Uraian PDRB	PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1504.06	1446.38	1435.92	1337.14	1231.58
Pertambangan dan Penggalian	47.60	47.23	46.79	44.05	41.28
Industri Pengolahan	44.55	44.14	44.28	40.97	38.52
Pengadaan Listrik dan Gas	4.52	4.42	3.93	3.89	3.44
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.55	1.45	1.40	1.31	1.22
Konstruksi	239.35	225.50	251.27	231.84	214.05
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	437.69	437.46	451.38	416.65	388.38
Transportasi dan Pergudangan	277.16	274.06	282.81	271.04	254.80
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.07	4.04	4.84	4.65	4.35
Informasi dan Komunikasi	256.26	259.78	229.30	214.08	200.58
Jasa Keuangan dan Asuransi	233.53	217.04	198.16	187.85	178.98
Real Estate	157.82	159.77	162.89	164.22	154.75
Jasa Perusahaan	4.26	5.39	8.20	7.82	7.33
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	967.16	931.69	896.88	829.72	737.94

Jasa Pendidikan	840.64	850.93	842.50	784.14	719.00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	145.52	135.07	122.77	114.88	105.62
Jasa lainnya	215.54	225.18	262.73	246.68	229.29
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5381.28	5269.53	5246.07	4900.91	4511.12

Sumber : BPS, Kabupaten Flores Timur Dalam Angka, 2022

Dari Tabel 1.5 diatas terlihat bahwa sektor pertanian masih sangat berperan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Flores Timur sedangkan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mempunyai kontribusi yang paling kecil. Setelah sektor pertanian sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib berperan cukup besar dalam 5 tahun terakhir walaupun dalam beberapa tahun mengalami penurunan.

Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Flores Timur didominasi oleh 3 (Tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya Pertanian Administrasi Pemerintahan, dan Jasa Pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Flores Timur. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Flores Timur pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan Usaha pertanian, yaitu mencapai 1231.58 milyar rupiah. Selanjutnya lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan 737.94 milyar rupiah, disusul lapangan Usaha jasa pendidikan sebesar 719.00 milyar rupiah.

Perbandingan PDRB Harga Konstan disuatu wilayah antara suatu tahun dengan tahun sebelumnya merupakan perbandingan kuantum produk antara dua tahun tanpa dipengaruhi oleh harga (inflasi/deflasi) pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dari suatu tahun ke tahun berikutnya adalah pertumbuhan riil ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Tabel 1.6 PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah) Tahun 2017-2021

Uraian PDRB	PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	956.59454	942.94126	940.18859	901.32896	857.6928
Pertambangan dan Penggalan	34.98176	34.72691	34.71135	32.78014	31.10318
Industri Pengolahan	33.30928	33.19844	34.39956	32.75972	32.09751
Pengadaan Listrik dan Gas	2.83468	2.81991	2.51585	2.49322	2.27559
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.08986	1.02907	0.9994	0.9584	0.90655
Konstruksi	194.8582	186.69005	207.32133	196.78943	187.31857
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	262.94502	264.79639	280.84519	267.40235	255.0505
Transportasi dan Pergudangan	187.92202	186.97565	192.1263	186.61922	178.87838
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.43392	2.40931	2.89757	2.79411	2.66842
Informasi dan Komunikasi	214.19984	222.8375	195.12007	184.65369	173.48227
Jasa Keuangan dan Asuransi	161.99669	157.60504	143.87952	139.17893	137.08808
Real Estate	114.80403	114.52419	116.10471	116.7837	111.77635
Jasa Perusahaan	2.3484	2.99132	4.6856	4.51065	4.45471
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	699.51691	682.79668	654.82428	612.33391	575.24482
Jasa Pendidikan	436.95854	448.70587	449.09561	428.45156	417.38001
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86.78893	82.3716	78.91425	75.74814	72.37084
Jasa lainnya	124.294	131.05556	154.888	147.86216	142.66844
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3517.87663	3498.47474	3493.51719	3333.4483	3182.45701

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur, 2022

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Flores Timur pada tahun 2021 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Flores Timur atas dasar harga konstan 2010, mencapai 3,18 triliun rupiah pada tahun 2021. Angka tersebut menurun dari 3,33 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 0.55 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya 2020 yang

yakni sebesar 0,14 persen. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur dapat di lihat pada tabel 1.7 dibawah ini :

Tabel 1.7 **Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2021**

Uraian PDRB	PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha			
	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.09	4.31	0.29	1.45
Pertambangan dan Penggalian	5.39	5.89	0.04	0.73
Industri Pengolahan	2.06	5.01	-3.49	0.33
Pengadaan Listrik dan Gas	9.56	0.91	12.09	0.52
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.72	4.28	2.97	5.91
Konstruksi	5.06	5.35	-9.95	4.38
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.84	5.03	-5.71	-0.7
Transportasi dan Pergudangan	4.33	2.95	-2.68	0.51
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.71	3.7	-16.85	1.02
Informasi dan Komunikasi	6.44	5.67	14.21	-3.88
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.53	3.38	9.54	2.79
Real Estate	4.48	-0.58	-1.36	0.24
Jasa Perusahaan	1.26	3.88	-36.16	-21.49
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.45	6.94	4.27	2.45
Jasa Pendidikan	2.65	4.82	-0.09	-2.62
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.67	4.18	4.38	5.36
Jasa lainnya	3.64	4.75	-15.39	-5.16
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.74	4.80	0.14	0.55

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur, 2022

Pada tabel 1.7. menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 4,74 persen, naik menjadi 4,80 persen pada tahun 2019 dan pada tahun 2021 menurun menjadi 0.55 persen.

Dengan mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi dari tiap-tiap sektor yang ada di Kabupaten Flores Timur, diharapkan pembuat kebijakan dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengoptimalkan potensi sektor yang ada untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

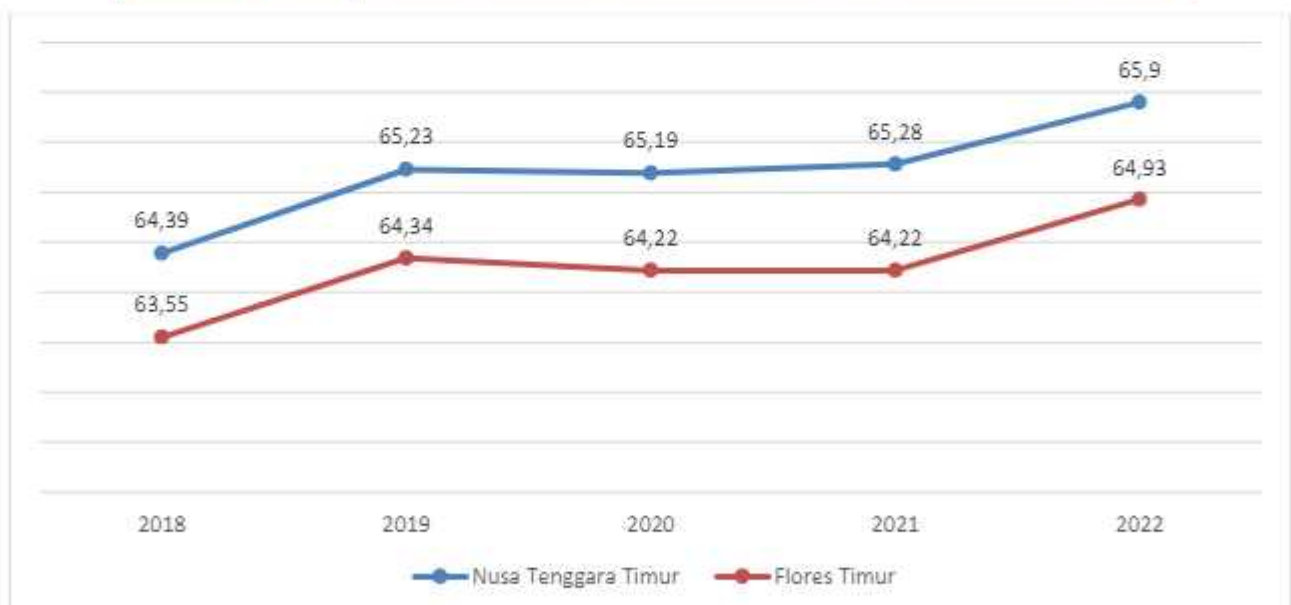
1.2.3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah indeks komposit dari gabungan 3 (tiga) indikator, yaitu usia harapan hidup, angka melek huruf serta rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. IPM mengukur secara spesifik pencapaian masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, untuk mencapai dan mempertahankan standar kehidupan yang layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Sampai dengan tahun 2022, IPM Flores Timur mencapai 64,93. Jika dibandingkan dengan rata – rata IPM di NTT maka perkembangan IPM Flores Timur berada di bawah rata-rata Provinsi NTT sebesar 65,90.

Gambar 1.2 Indek Pembangunan Manusia NTT Tahun 2018 - 2020



Sumber : BPS, Kabupaten Flores Timur Dalam Angka 2021

1.2.4 Kondisi Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan unsur staf yang diwadahi dalam Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pelayanan administrasi dan memberi dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang diwadahi dalam Sekretariat DPRD Tipe C;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwadahi dalam Inspektorat Daerah Tipe A;
4. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana yang diwadahi dalam dinas- dinas daerah, terdiri dari:
 - a Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan serta urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - b Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
 - c Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - d Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 - e Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tipe A

- menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta sub urusan Kebakaran;
 - i Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - j Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - k Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - l Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
 - m Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
 - n Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
 - o Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - p Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 - q Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan

- urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- r Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Pangan;
 - s Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Perkebunan dan Peternakan;
 - t Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan sub urusan Perikanan; dan
 - u Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan.
5. Badan Daerah merupakan unsur penunjang yang diwadahi dalam badan-badan daerah, terdiri dari:
- a Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan Pembangunan, serta fungsi penunjang urusan Penelitian dan Pengembangan;
 - b Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Keuangan, sub urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - c Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Keuangan, sub urusan Pendapatan; dan
 - d Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
6. Kecamatan, terdiri dari:
- a Kecamatan Larantuka dengan Tipe A;
 - b Kecamatan Adonara Timur dengan Tipe A;
 - c Kecamatan Adonara Barat dengan Tipe A;
 - d Kecamatan Adonara dengan Tipe A;
 - e Kecamatan Adonara Tengah dengan Tipe A;
 - f Kecamatan Kelubagolit dengan Tipe A;
 - g Kecamatan Witihamo dengan Tipe A;
 - h Kecamatan Ile Boleng dengan Tipe A;

- i Kecamatan Wotan Ulumado dengan Tipe A;
- j Kecamatan Tanjung Bunga dengan Tipe A;
- k Kecamatan Wulanggitang dengan Tipe A;
- l Kecamatan Titehena dengan Tipe A;
- m Kecamatan Lewolema dengan Tipe A;
- n Kecamatan Ile Mandiri dengan Tipe A;
- o Kecamatan Ile Bura dengan Tipe A;
- p Kecamatan Demon Pagong dengan Tipe A;
- q Kecamatan Solor Timur dengan Tipe A;
- r Kecamatan Solor Barat dengan Tipe A; dan
- s Kecamatan Solor Selatan dengan Tipe A.

1.2.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur berdasarkan data Nominatif PNS dan P3K lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 keadaan 31 Desember 2022 sebanyak 4.892 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.058 orang dan perempuan sebanyak 2.834 orang. Pada Tabel 1.8 dan 1.9 digambarkan rincian PNS berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan.

Tabel 1.8 Jumlah ASN (PNS & PPPK) Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1	SD	16	4	20
2	SLTP	29	3	32
3	SLTA	433	342	775
4	D.I	3	30	33
5	D.II	78	46	124
6	D.III	204	756	960
7	S.1	1248	1636	2.884
8	S.2	46	17	63
9	S.3	1	-	-
Jumlah		2058	2834	4892

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Flores Timur, 2022

Tabel 1.9 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2022

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1	Gol.I	16	5	21
2	Gol.II	372	430	802
3	Gol.III	1.145	1.925	3070
4	Gol.IV	387	269	656
Jumlah		1920	2.629	4.549

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Flores Timur, 2022

Berdasarkan data Jabatan Struktural Tahun 2022, terdapat 534 Jabatan dengan 434 Jabatan terisi dan masih terdapat 100 jabatan yang lowong keadaan 31 Desember Tahun 2022 sesuai Tabel 1.10 di bawah ini :

Tabel 1.10 Data Jabatan Struktural menurut Jumlah Jabatan, Jabatan Terisi dan Jabatan Lowong

No.	Jabatan	Jumlah Jabatan	Jabatan	
			Terisi	Lowong
1	JPT	36	30	6
2	Administrator	117	166	11
3	Pengawas	321	232	83
Jumlah		534	434	100

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Flores Timur, 2022

1.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

1.3.1 Permasalahan Terkait Program Prioritas

Berdasarkan gambaran umum daerah dan hasil evaluasi maka teridentifikasi berbagai permasalahan yang menjadi perhatian di tahun 2022 sebagai berikut:

1. Bidang Sumber Daya Manusia
 - a. Masih rendahnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - b. Menurunnya harmonisasi hubungan sosial antar warga;

- c. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender;
 - e. Rendahnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - f. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
 - g. Tingginya angka DO;
 - h. Rendahnya Pelayanan dan Pembinaan KB;
 - i. Rendahnya Kualitas derajat kesehatan masyarakat dan Pelayanan Kesehatan;
 - j. Masih adanya Kasus Gizi Buruk;
 - k. Kurangnya sarana dan prasarana Kesehatan;
 - l. Angka stunting yang tergolong tinggi;
 - m. AKI/AKB dan angka kesakitan masih tinggi;
 - n. Belum adanya lembaga perlindungan anak;
 - o. Rendahnya keterampilan tenaga kerja;
 - p. Lemahnya Pendampingan Kelompok Masyarakat.
2. Bidang Ekonomi
- a. Rendahnya pendapatan masyarakat;
 - b. Kurangnya penyediaan lapangan kerja baru;
 - c. Penguatan kapasitas kelompok tani dan kelembagaannya;
 - d. Sinergisitas antara pemangku kepentingan;
 - e. Pemetaan Kawasan;
 - f. Aktifitas Ekonomi berbasis potensi lokal;
 - g. Penerapan teknologi pertanian yang tepat guna dan ramah lingkungan;
 - h. Ketersediaan energi, protein, lemak;
 - i. Pola panganekaragaman pangan;
 - j. Pemberdayaan masyarakat pesisir;
 - k. Regulasi terkait pengolahan sumber daya hayati laut dan rehabilitasi terumbu karang dan mangrove;
 - l. Perluasan pemasaran garam.
3. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
- a. Kondisi jalan dan jembatan kabupaten yang tidak mantap;
 - b. Belum tersedianya perlengkapan pengaman jalan;
 - c. Prasarana transportasi laut belum memadai;
 - d. Peralatan uji kir belum berfungsi;

- e. Pendistribusian air PDAM kurang merata;
- f. Menurunnya debit air pada sumber mata air;
- g. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan ruang di daerah sekitar mata air;
- h. Masih kurangnya prasarana pengaman pantai dan pengendali banjir dan normalisasi sungai/kali mati;
- i. Masih ada pertambangan tanpa ijin yang dilakukan masyarakat;
- j. Belum ada dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- k. Masih ada lahan kritis pada daerah yang berpotensi banjir dan longsor;
- l. Masih banyak beklag;
- m. Masih banyak sumber air baku yang belum diuji kualitasnya;
- n. Belum optimalnya sarana dan prasarana sampah perkotaan;
- o. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah;
- p. Masih ada desa yang belum teraliri listrik;
- q. Belum maksimalnya penegakan Perda Tata Ruang.

4. Bidang Pemerintahan

- a. Kurangnya Infrastruktur pendukung dalam peningkatan pelayanan publik;
- b. Rendahnya Kapasitas SDM Aparatur;
- c. Rendahnya kerjasama antar Stakeholder/lintas sector;
- d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi;
- e. Rendahnya sistem pengawasan dan penegakan produk hukum;
- f. Lemahnya sistem dan prosedur tata kelola pemerintah daerah

1.3.2 Permasalahan pada aspek geografis.

Pada aspek geografis permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Flores Timur adalah:

- 1. Kondisi geografis dengan topografi yang terdiri dari pegunungan dan perbukitan berpotensi menimbulkan bencana alam. Dari aspek ini Kabupaten Flores Timur menjadi salah satu daerah yang rawan bencana alam;
- 2. Tingkat pertumbuhan penduduk tergolong tinggi, sex ratio yang besar, dan penyebaran penduduk yang tidak merata.

1.3.3 Permasalahan pada aspek kesejahteraan masyarakat

Pada aspek ini menampilkan sejumlah permasalahan adalah :

- 1. Semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB;

2. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bila dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional;
3. Rendahnya aksesibilitas masyarakat miskin, KAT dan PMKS lainnya untuk mengkomulasi modal produktif, sumber-sumber keuangan, modal sosial dan sarana fisik;
4. Rendahnya kontribusi lembaga kesejahteraan sosial dalam membantu penanganan masalah sosial di masyarakat;
5. Tingginya angka pengangguran dan rendahnya kualitas pelayanan, penempatan dan perlindungan TKI;
6. Di bidang olahraga prasarana dan sarana olahraga masih sangat terbatas.

1.3.3 Permasalahan pada aspek pelayanan umum

Pada aspek pelayanan umum terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
2. Akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas belum memadai;
3. Jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang belum memadai;
4. Belum optimalnya penyediaan obat-obat perbekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan dan keamanan pangan serta Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang belum menjadi budaya dalam masyarakat;
5. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang KB yang berdampak kurangnya jumlah peserta akseptor KB maupun akses terhadap fasilitas KB;
6. Infrastruktur transportasi wilayah belum memadai;
7. Sistem dan prosedur kerja dilingkungan aparaturnegara belum efisiensi, efektif dan berperilaku hemat;
8. Sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah belum memiliki SPM dan SOP;
9. Capaian laporan kinerja keuangan yang masih pada level Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diakibatkan oleh neraca aset yang belum optimal;
10. Belum optimalnya pelayanan persampahan, karena belum tersedianya TPS secara merata dalam kota dan TPK di luar kota;
11. Belum efektifnya fungsi dan peran infrastruktur dan suprastruktur politik serta lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam perumusan kebijakan;
12. Masih rendahnya kapasitas aparaturnegara daerah serta masih rendahnya kapasitas keuangan daerah dalam memenuhi tuntutan pembangunan serta belum efektifnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;

13. Belum efektifnya lembaga penyelenggara Negara, lembaga politik dan lembaga masyarakat dalam menjamin kepastian hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat dan masih terbatasnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hukum dan hak asasi manusia, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

1.3.5 Permasalahan pada aspek daya saing

1. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani;
2. Rendahnya pendapatan asli daerah;
3. Belum memadainya aksesibilitas daerah;
4. Minimnya ketersediaan lembaga keuangan mikro;
5. Belum berkembangnya investasi di daerah;
6. Rendahnya kualitas tenaga kerja Flores Timur.

1.3.6 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan yang terkait dengan program pembangunan daerah (prioritas utama), yang disinergikan dengan isu global, nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini.

Sejalan dengan isu global, nasional dan provinsi NTT, serta memperhatikan permasalahan utama yang harus diselesaikan selama kurun waktu 2020, maka dirumuskan isu strategis Kabupaten Flores Timur sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan pemasaran hasil pertanian;
2. Perlindungan dan pelestarian sumberdaya laut yang bersinergi dengan pengembangan kawasan konservasi dan perlindungan biota/ mamalia laut;
3. Penciptaan lapangan kerja baru melalui usaha mikro, kecil dan menengah serta perluasan kesempatan kerja melalui penguatan iklim investasi;
4. Kurang didorongnya pengembangan kewirausahaan, industri berbasis sumber daya lokal yang menyerap tenaga kerja lokal;
5. Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan;
6. Aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan;

7. Ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan belum memadai;
8. Ketersediaan dan kualitas sarana prasarana kesehatan belum memadai;
9. Masih tingginya pertumbuhan penduduk;
10. Penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran;
11. Kualitas tata kelola pemerintahan yang kurang optimal atau belum menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik;
12. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi;
13. Ketersediaan air baku;
14. Kualitas dan kuantitas perumahan dan lingkungan permukiman;
15. Lingkungan hidup;
16. Pengendalian pemanfaatan ruang;
17. Penataan dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa serta peningkatan kapasitas aparatur desa dan pemberdayaan masyarakat.

1.4 Sistematika

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Kondisi Geografis, Data Demografi, Kondisi Ekonomi Daerah, Kondisi Pemerintahan, Jumlah Pegawai Negeri Sipil. Bab I juga berisi Permasalahan Utama (*strategis issue*) serta Sistematika penyajian LKIP Kabupaten Flores Timur.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Memuat Rencana Strategis Daerah yang meliputi Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Kinerja Utama dalam Ringkasan RPJMD Tahun 2017-2022 serta Agenda Pembangunan Daerah, juga disajikan Program dan Pencapaian Sasaran sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Disajikan capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran dengan membandingkan realisasi kinerja tahun ini dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Flores Timur, juga disajikan analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan serta capaian kinerja keuangan daerah dengan menyajikan realisasi anggaran per bidang urusan.

BAB IV PENUTUP

Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja dan pemanfaatannya dalam rangka *feed back* dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1

Rencana Strategis Tahun 2017- 2022

Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 - 2022 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.2.1 Visi dan Misi

RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 merupakan periode pembangunan lima tahunan ketiga dalam rangka pencapaian visi daerah dua puluh tahunan RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025. Visi tersebut adalah Flores Timur yang maju, sejahtera bermartabat dan berdaya saing. Berdasarkan visi tersebut, sasaran pembangunan jangka menengah tahap ke tiga yang ingin dicapai dalam RPJPD adalah:

- 1) Perekonomian daerah yang tangguh
- 2) Pertumbuhan penduduk yang terkendali

- 3) Berkembangnya pendidikan dan kesehatan masyarakat
- 4) Meningkatnya aksesibilitas wilayah
- 5) Terwujudnya keseimbangan ekosistem
- 6) Meningkatnya ketahanan pangan
- 7) Adanya jaminan kehidupan yang bermartabat.

Mengacu pada sasaran pembangunan jangka panjang daerah tersebut serta memperhatikan kondisi riil, permasalahan dan isu-isu strategis yang ada maka dirumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

1. Visi

Visi merupakan suatu rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022, adalah:

“Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata”

Makna dari visi tersebut adalah :

- Flores Timur Sejahtera adalah Kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Flores Timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.
- Desa Membangun Kota Menata adalah Desa/kota yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya pada aspek Sosial, Ekonomi dan Ekologi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk permukiman dan pelayanan kemasyarakatan. Desa membangun kota menata merupakan satu kesatuan gerak seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang berada di desa maupun di kota untuk mewujudkan kemandirian dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal menuju Flores Timur sejahtera.

2. Misi

Misi Pembangunan Kabupaten Flores Timur merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

1. Selamatkan Orang Muda Flores Timur;
2. Selamatkan Infrastruktur Flores Timur;
3. Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur;
4. Selamatkan Laut Flores Timur; dan



5. Reformasi Birokrasi.

Misi Kesatu Selamatkan Orang Muda Flores Timur dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya.

Misi Kedua Selamatkan Infrastruktur Flores Timur dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu mewujudkan infrastruktur Flores Timur yang terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja transportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.

Misi Ketiga Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur dimaksudkan agar tanaman rakyat yang merupakan komoditi unggulan dan potensial ditingkatkan produktivitas dan nilai ekonominya.

Misi Keempat Selamatkan Laut Flores Timur dimaksudkan agar wilayah laut sebagai tempat kehidupan petani nelayan Flores Timur terpelihara ekosistem dan potensinya agar mampu memberi jaminan kehidupan yang layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores Timur.

Misi Kelima Reformasi Birokrasi dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Langkah-langkah percepatan melalui misi selamatkan orang muda, selamatkan infrastruktur, selamatkan tanaman rakyat, selamatkan laut Flores Timur dan reformasi birokrasi serta didukung dengan tiga kebijakan strategis yakni :

1. Kebijakan pembangunan pendidikan,
2. Kebijakan pembangunan pariwisata, dan
3. Kebijakan pembangunan kesehatan diharapkan mampu mempercepat pencapaian sasaran RPJPD pada lima tahun ketiga.

2.2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Perumusan tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara

keseluruhan. Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 pada masing-masing visi dan misi sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terselamatkannya Orang Muda dari masalah ekonomi

Sasaran :

- 1) Meningkatkan kemandirian orang muda;

Indikator Kinerja :

- a. Jumlah wirausahawan baru.

- 2) Meningkatkan kesempatan kerja.

Indikator Kinerja :

- a. Tingkat Pengangguran terbuka.

Tujuan 2 : Terselamatkannya Orang Muda dari masalah sosial budaya

Sasaran :

- 1) Meningkatkan karakter orang muda dan wawasan kebangsaan

Indikator Kinerja :

- a. Jumlah konflik sosial antar pemuda.

- 2) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan

Indikator Kinerja :

- a. Rata-rata lama sekolah
- b. Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD
- c. Angka Partisipasi Murni (APM) SD
- d. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP
- e. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
- f. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD
- g. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP
- h. Angka Melek Huruf
- i. Angka Melanjutkan Pendidikan Ke SD
- j. Angka Melanjutkan Pendidikan Ke SMP
- k. Angka kelulusan (AL) SD/MI
- l. Angka kelulusan (AL) SMP/MTs
- m. Guru yang memenuhi kualifikasi S1
- n. Persentase sarana prasarana pendidikan SD (kondisi baik)
- o. Persentase sarana prasarana pendidikan SMP (kondisi baik)

3) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat :

Indikator Kinerja :

- a. Usia Harapan Hidup
- b. Angka kematian bayi
- c. Angka kematian ibu (Per 100.000 KH)
- d. Angka gizi buruk
- e. Cakupan pelayanan anak usia pendidikan dasar
- f. Cakupan pelayanan usia produktif
- g. Cakupan penanganan kasus penyakit menular
- h. Cakupan penanganan kasus penyakit tidak menular
- i. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
- j. Penemuan penderita baru penyakit TB – BTA+
- k. Cakupan penanganan penderita penyakit DBD
- l. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
- m. Cakupan peserta KB aktif
- n. Cakupan Pelayanan KB Keluarga Miskin

4) Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial

Indikator Kinerja :

- a. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani

5) Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak

Indikator Kinerja :

- a. Partisipasi perempuan pada jabatan publik
- b. Partisipasi angkatan kerja perempuan
- c. Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak

Tujuan 3 : Tersedianya infrastruktur daerah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya.

Sasaran :

1) Meningkatnya kinerja transportasi

Indikator Kinerja :



- a. Presentase Prasarana transportasi dalam kondisi baik
 - b. Presentase Angkutan umum laik jalan
 - c. Presentase Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan
 - d. Rasio izin trayek
 - 2) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya
- Indikator Kinerja :
- a. Rasio jaringan irigasi
 - b. Akses air minum aman
 - c. Presentase daerah mata air yang dikonservasi

Tujuan 4 : Mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta berkurangnya resiko bencana

Sasaran :

- 1) Mengurangi resiko akibat bencana
- Indikator Kinerja :
- a. Persentase pengendalian banjir dan pengamanan pantai yang dibangun.
 - 2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- Indikator Kinerja :
- a. Persentase usaha wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen izin lingkungan

Tujuan 5 : Terwujudnya perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas

Sasaran :

- 1) Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman
- Indikator Kinerja :
- a. Presentase Rumah tidak layak huni
 - b. Persentase sampah perkotaan yang ditangani

Tujuan 6 : Terwujudnya pembangunan kota yang terpadu dan berkelanjutan

Sasaran :

- 1) Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
- Indikator Kinerja :
- a. Jumlah dokumen perencanaan
 - b. Cakupan pengendalian dan pemanfaatan ruang
 - c. Pemenuhan penyediaan RTH di kawasan perkotaan

Tujuan 7 : Meningkatkan produksi tanaman rakyat

Sasaran :

- 1) Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal
Indikator Kinerja :
 - a. Tanaman Perkebunan Jambu Mente
 - b. Tanaman Perkebunan Kelapa
 - c. Tanaman Perkebunan Kakao
 - d. Produksi Pertanian
 - Benih Jangung Komposit
 - Benih padi sawah
 - Pupuk NPK
 - Pupuk urea
 - Bahan Pengemas Kantong plastik pengemas benih
 - Bahan Pengemas Karung plastik pengepak benih
 - e. Luas Lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman Perkebunan
 - f. Ketersediaan Pangan Energi (kkl/kap/hr)
 - g. Ketersediaan Pangan Protein (gr/kap/hr)
 - h. Ketersediaan Pangan Lemak (gr/kap/hr)
 - i. Persentase Konsumsi Pangan (PPH)

Tujuan 8 : Meningkatkan Pemasaran Hasil Produksi Tanaman Rakyat

Sasaran :

- 1) Meningkatkan volume perdagangan komoditas unggulan daerah;
Indikator Kinerja :
 - a. Presentase penguatan system pemasaran.

Tujuan 9 : Terselamatkannya Ekosistem Laut

Sasaran :

- 1) Meningkatnya kelestarian sumberdaya hayati laut;
Indikator Kinerja :
 - a. Penanganan *illegal fishing*
 - b. Penanganan *destruktif e fishing*
 - c. Prentase kawasan konservasi laut dalam keadaan baik

Tujuan 10 : Terpeliharanya Potensi Laut

Sasaran :

- 1) Meningkatnya Produksi Perikanan
Indikator Kinerja :
 - a. Presentase peningkatan produksi perikanan tangkap
 - b. Presentase peningkatan produksi perikanan budidaya
 - c. Jumlah kawasan budidaya perikanan.

Tujuan 11 : Mengembangkan Birokrasi Yang Semakin Profesional dan Akuntabel



Sasaran :

1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indikator Kinerja :

- a. Jumlah OPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan
- b. Jumlah OPD yang memiliki SOP
- c. Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk
- d. Rasio pasangan berakte nikah
- e. Rasio penduduk berakte kelahiran
- f. Jumlah izin yang dilayani tiap tahun
- g. Pola pengembangan karier ASN daerah
- h. Ketersediaan Dokumen Perencanaan
- i. Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda
- j. Ketersediaan Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda
- k. Penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah
- l. OPD yang menerapkan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi
- m. Desa sadar hukum dan komunitas
- n. Jumlah konflik sosial yang terjadi di masyarakat
- o. Cakupan pelayanan korban bencana

2) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif

- a. Desa sangat tertinggal
- b. Desa tertinggal
- c. Desa berkembang
- d. Desa maju
- e. Desa mandiri

Tabel 2.1

Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi : Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	2	3	4
Selamatkan Orang Muda Flores Timur	1. Terselamatnya Orang Muda dari masalah Ekonomi	a. Meningkatkan kemandirian orang muda	1) Jumlah wirausahawan baru
		b. Meningkatkan kesempatan kerja	2) Tingkat pengangguran terbuka
	2. Terselamatkannya Orang Muda dari masalah sosial budaya	a. Meningkatkan karakter orang muda dan wawasan kebangsaan	3) Jumlah konflik sosial antar pemuda
			4) Rata-rata lama sekolah
		b. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan	5) Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD
			6) Angka Partisipasi Murni (APM) SD
			7) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP
			8) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
			9) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD
			10) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP
			11) Angka Melek Huruf
			12) Angka Melanjutkan Pendidikan Ke SD
			13) Angka Melanjutkan Pendidikan Ke SMP
			14) Angka kelulusan (AL) SD/MI
			15) Angka kelulusan (AL) SMP/MTs
			16) Guru yang memenuhi kualifikasi S1
			17) Persentase sarana prasarana pendidikan SD (kondisi baik)
			18) Persentase sarana prasarana pendidikan SMP (kondisi baik)
		c. Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat	19) Usia Harapan Hidup
			20) Angka kematian bayi
			21) Angka kematian ibu (Per 100.000 KH)
			22) Angka gizi buruk
			23) Cakupan pelayanan anak usia pendidikan dasar

1	2	3	4
			24) Cakupan pelayanan usia produktif 25) Cakupan penanganan kasus penyakit menular 26) Cakupan penanganan kasus penyakit tidak menular 27) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 28) Penemuan penderita baru penyakit TB - BTA+ 29) Cakupan penanganan penderita penyakit DBD 30) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 31) Cakupan peserta KB aktif 32) Cakupan Pelayanan KB Keluarga Miskin d. Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial e. Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak
Selamatkan Infrastruktur Flores Timur	1. Tersedianya Infrastruktur Daerah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya	a. Meningkatkan kinerja transportasi	33) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani 34) Partisipasi perempuan pada jabatan publik 35) Partisipasi angkatan kerja perempuan 36) Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak
		b. Pemenuhan kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya	37) Presentase Prasarana transportasi dalam kondisi baik 38) Presentase Angkutan umum laik jalan 39) Presentase Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan 40) Rasio izin trayek
		a. Mengurangi resiko akibat bencana	41) Rasio jaringan irigasi 42) Akses air minum aman 43) Presentase daerah mata air yang dikonservasi
		a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	44) Persentase pengendalian banjir dan pengamanan pantai yang dibangun 45) Persentase usaha wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen izin
	2. Mempertahankan daya dukung dan daya tampung		46) Persentase rumah tidak layak huni 47) Persentase sampah perkotaan yang ditangani
	3. lingkungan hidup serta berkurangnya resiko bencana		
	4. Terwujudnya perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas		

1	2	3	4
	5. Terwujudnya pembangunan kota yang terpadu dan berkelanjutan	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	48) Jumlah dokumen perencanaan 49) Cakupan pengendalian dan pemanfaatan ruang 50) Persentase pemenuhan penyediaan RTH dikawasan perkotaan
Selamatkan Tanaman Rakyat	1. Meningkatnya Produksi Tanaman Rakyat	Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal	51) Tanaman Perkebunan Jambu Mente
			52) Tanaman Perkebunan Kelapa
			53) Tanaman Perkebunan Kakao
			54) Produksi Pertanian
			a. Benih Jangung Komposit
			b. Benih padi sawah
			c. Pupuk urea
			d. Bahan Pengemas Kantong plastik pengemas benih
			e. Bahan Pengemas Karung plastik pengepak benih
			55) Luas Lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman Perkebunan
	2. Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Tanaman Rakyat	Meningkatnya volume perdagangan komoditas unggulan daerah	56) Ketersediaan Pangan Energi (kkl/kap/hr)
			57) Ketersediaan Pangan Protein (gr/kap/hr)
			58) Ketersediaan Pangan Lemak (gr/kap/hr)
			59) Persentase Konsumsi Pangan (PPH)
			60) Penguatan sistem pemasaran
Selamatkan Laut Flores Timur	1. Terselamatnya Ekosistem Laut	Meningkatnya kelestarian sumberdaya hayati laut	61) Penanganan ilegal fishing destruktif e-fishing
			62) Persentase kawasankonservasi laut dalam keadaan baik

1	2	3	4
	2. Terpeliharanya Potensi Laut	Meningkatnya produksi perikanan	63) Presentase produksi tangkap peningkatan perikanan 64) Presentase produksi budidaya peningkatan perikanan 65) Jumlah kawasan budidaya perikanan
Reformasi Birokrasi	1. Mengembangkan Birokrasi Yang Semakin Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	66) Jumlah OPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan 67) Jumlah OPD yang memiliki SOP 68) Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk 69) Rasio pasangan berakte nikah 70) Rasio penduduk berakte kelahiran 71) Jumlah izin yang dilayani tiap tahun 72) Pola pengembangan karier ASN daerah 73) Ketersediaan Dokumen Perencanaan 74) Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda 75) Ketersediaan Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda 76) Penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah 77) OPD yang menerapkan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi 78) Persentase desa sadar hukum dan komunitas 79) Jumlah konflik sosial yang terjadi di masyarakat 80) Cakupan pelayanan korban bencana
		Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif	81) Desa sangat tertinggal 82) Desa tertinggal 83) Desa berkembang 84) Desa maju 85) Desa mandiri

2.2.3 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Flores Timur disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan bagi seluruh OPD lingkup pemerintah Kabupaten Flores Timur, serta acuan bagi *stakeholders* terkait dalam partisipasi aktif pembangunan melalui spirit ***Desa Membangun Kota Menata***.

Untuk melaksanakan arah kebijakan dari masing-masing strategi dirumuskan program prioritas disertai pagu indikatif. Selain itu sebagai upaya percepatan pencapaian target-target pembangunan tahun 2017-2022 dirumuskan pula kebijakan strategis pembangunan yang dilaksanakan melalui spirit *Desa Membangun Kota Menata*. Kebijakan strategis tersebut adalah:

1. Kebijakan Pembangunan Pendidikan
2. Kebijakan Pembangunan Pariwisata
3. Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Kebijakan pembangunan pendidikan diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan, membangun prasarana dan sarana pendukung pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru honor, peningkatan kemampuan guru dan pemberian beasiswa khusus bagi mahasiswa asal Flores Timur yang kuliah di perguruan tinggi yang ada di Flores Timur.

Kebijakan pembangunan pariwisata diarahkan untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat berupa desa wisata dan kawasan wisata.

Kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan untuk penempatan tenaga kesehatan yang memadai untuk setiap desa (gizi, bidan dan perawat), peningkatan fungsi Puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap, dan peningkatan kapasitas pelayanan RSUD.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Flores Timur ditetapkan melalui Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022.

Adapun IKU Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2

**Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Kabupaten Flores Timur**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Misi 1 Selamatkan Orang Muda Flores Timur		
1. Terselamatnya Orang Muda dari masalah Ekonomi	1. Meningkatkan kemandirian orang muda 2. Meningkatkan kesempatan kerja	1) Jumlah wirausahawan baru 2) Tingkat pengangguran terbuka
2. Terselamatkannya Orang Muda dari masalah sosial budaya	3. Meningkatkan karakter orang muda dan wawasan kebangsaan	3) Jumlah konflik sosial antar pemuda
	4. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan	4) Rata -Rata Lama Sekolah 5) Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 6) Angka Partisipasi Murni (APM) SD 7) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP 8) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 9) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD 10) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP 11) Angka melek huruf 12) Angka buta huruf 13) Angka melanjutkan pendidikan Ke SD 14) Angka melanjutkan pendidikan Ke SMP 15) Angka kelulusan (AL) SD / MI

1	2	3
		16) Angka kelulusan (AL) SMP /MTs 17) Guru yang memenuhi kualifikasi S1 18) Persentase sarana prasarana pendidikan SD dalam kondisi baik 19) Persentase sarana prasarana pendidikan SMP dalam kondisi baik
	5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	20) Usia Harapan Hidup 21) Angka Kematian Bayi 22) Angka kematian ibu 23) Angka gizi buruk 24) Cakupan pelayanan anak usia pendidikan dasar 25) Cakupan pelayanan usia produktif 26) Cakupan penanganan kasus penyakit menular 27) Cakupan penanganan kasus penyakit tidak menular 28) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 29) Penemuan penderita baru penyakit TB - BT+ 30) Cakupan penanganan penderita penyakit DBD 31) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 32) Cakupan peserta KB aktif 33) Cakupan pelayanan KB keluarga miskin
	6. Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	34) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani
	7. Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	35) Partisipasi perempuan pada jabatan publik 36) Partisipasi angkatan kerja perempuan 37) Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak

1	2	3
Misi 2 Selamatkan Infrastruktur		
1. Tersedianya Infrastruktur Daerah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya	1. Meningkatnya kinerja transportasi	1) Prasarana transportasi dalam kondisi baik 2) Pengujian angkutan umum laik jalan 3) Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan 4) Rasio izin trayek
	2. Pemenuhan kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya	5) Rasio jaringan irigasi 6) Akses air minum aman 7) Presentase Daerah mata air yang dikonservasi
2. Mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta berkurangnya resiko bencana	3. Mengurangi resiko akibat bencana	8) Persentase pengendalian banjir dan pengamanan pantai yang dibangun
	4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	9) Presentase Usaha wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen izin lingkungan 10) Presentase rehabilitasi lahan kritis
3. Terwujudnya perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman	11) Persentase rumah tidak layak huni 12) Akses limbah domestik sanitasi layak 13) Akses air minum aman 14) Persentase Sampah perkotaan yang ditangani
4. Terwujudnya pembangunan kota yang terpadu dan berkelanjutan	6. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	15) Jumlah dokumen perencanaan 16) Cakupan pengendalian dan pemanfaatan ruang 17) Persentase pemenuhan penyediaan RTH dikawasan perkotaan
Misi 3 Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur		
1. Meningkatnya Produksi Tanaman Rakyat	1. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi local	1) Tanaman perkebunan jambu mente 2) Tanaman perkebunan Tembakau 3) Tanaman perkebunan Kelapa

1	2	3
		4) Luas Lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk tanaman pangan 5) Luas Lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk Tanaman hortikultura 6) Luas Lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk Tanaman perkebunan 7) Ketersediaan pangan energi 8) Ketersediaan Pangan Protein 9) Ketersediaan Pangan Lemak 10) Persentasi Konsumsi Pangan
2. Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Tanaman Rakyat	2. Meningkatnya volume perdagangan komoditas unggulan daerah	11) Persentase penguatan sistem pemasaran
Misi 4 Selamatkan Laut Rakyat Flores Timur		
1. Terselamatkannya Ekosistem Laut	1. Meningkatnya kelestarian sumberdaya hayati laut	1) Presentase Penanganan <i>illegal fishing</i> 2) Presentase Penanganan <i>destructive fishing</i> 3) Kawasan konservasi laut dalam keadaan baik (Biota Laut)
2. Terpeliharanya Potensi Laut	2. Meningkatnya produksi perikanan	4) Presentase Peningkatan produksi perikanan tangkap 5) Presentase Peningkatan produksi perikanan budidaya 6) Luas area garam (Ha) 7) Jumlah produksi garam (ton/tahun) 8) Jumlah kelompok budidaya perikanan
Misi 5 Reformasi Birokrasi		
1. Mengembangkan Birokrasi Yang Semakin Profesional dan Akuntabel	2. Meningkatnya kualitas pelayanan public	1) Jumlah OPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan 2) Jumlah OPD yang memiliki SOP 3) Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk 4) Rasio pasangan berakta nikah 5) Rasio penduduk berakte kelahiran 6) Jumlah izin yang dilayani tiap tahun 7) Pola pengembangan karier ASN daerah 8) Ketersediaan dokumen perencanaan

1	2	3
		9) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda 10) Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda 11) Penilaian terhadap kinerja pengelola keuangan daerah 12) OPD yang menerapkan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi 13) Desa Sadar Hukum dan Komunitas 14) Jumlah Konflik sosial yang terjadi dimasyarakat 15) Cakupan pelayanan korban bencana
	3. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif	16) Desa sangat tertinggal 17) Desa tertinggal 18) Desa berkembang 19) Desa maju 20) Desa mandiri

2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2022 ada pada Lampiran.

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perubahan / Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :



Tabel 2.3

**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Pemerintah Kabupaten Flores Timur**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kemandirian orang muda	1) Jumlah wirausahawan baru	UMKM	19783
2.	Meningkatkan kesempatan kerja	2) Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,48
3.	Meningkatkan karakter orang muda dan wawasan kebangsaan	3) Jumlah konflik sosial antar pemuda	Kasus	4
4.	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan	4) Rata Lama Sekolah	Tahun	7,3
		5) Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	%	548
		6) Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	99,50
		7) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	82,33
		8) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	46
		9) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	103
		10) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	96,85
		11) Angka melek huruf	%	0,2
		12) Angka melanjutkan pendidikan Ke SD	%	100
		13) Angka melanjutkan pendidikan Ke SMP	%	98,50
		14) Angka kelulusan (AL) SD /MI	%	99,99
		15) Angka kelulusan (AL) SMP /MTs	%	99,28
		16) Guru yang memenuhi kualifikasi S1	%	100
		17) Persentase sarana prasarana pendidikan SD dalam kondisi baik	%	42
		18) Persentase sarana prasarana pendidikan SMP dalam kondisi baik	%	26
5.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	19) Usia Harapan Hidup	Tahun	65.12
		20) Angka Kematian Bayi	%	16/1000
		21) Angka kematian Ibu (Per 100.000 KH)	%	102/100.000
		22) Angka gizi buruk	%	0,1
		23) Cakupan pelayanan anak usia pendidikan dasar	%	100
		24) Cakupan pelayanan usia produktif	%	100
		25) Cakupan penanganan kasus penyakit menular	%	9850
		26) Cakupan penanganan kasus penyakit tidak menular	%	100
		27) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	%	100
		28) Penemuan penderita baru penyakit TB - BTA+	%	100

		29) Cakupan penanganan penderita penyakit DBD	%	100
		30) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	80
		31) Cakupan peserta KB aktif	%	68
		32) Cakupan pelayanan KB keluarga miskin	%	89
6.	Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	33) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani	%	6,77
7.	Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	34) Partisipasi perempuan pada jabatan publik	%	43
		35) Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	65
		36) Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	%	20
8.	Meningkatnya kinerja transportasi	37) Prasarana transportasi dalam kondisi baik	Unit	103,25
		38) Pengujian Angkutan umum laik jalan	Kali	609
		39) Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan	Unit	400
		40) Dokumen/ Rasio izin trayek	Dok	35
9.	Pemenuhan kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya	41) Meningkatnya luas areal irigasi yang fungsional	Paket	Rehabilitasi jaringan daerah irigasi (1)
		42) Akses air minum aman (SPAM = jaringan perpipaan)	SR	1873
		43) Jumlah mata air yang dikonservasi	Mata air	5
10.	Mengurangi resiko akibat bencana	44) Persentase pengendalian banjir dan pengamanan pantai yang dibangun	M ²	4500
11.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	45) Usaha wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen izin lingkungan	Jenis Usaha	50
12.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman	46) Rumah tidak layak huni	Unit	66
		47) Persentase Sampah perkotaan yang ditangani	%	12
13.	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	48) Jumlah dokumen perencanaan	Dok	3
		49) Cakupan pengendalian dan pemanfaatan ruang	%	100
		50) Pemenuhan penyediaan RTH dikawasan perkotaan	Lokasi	2

14.	Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi local	51) Tanaman perkebunan Jambu Mente	Ton	3507
		52) Tanaman perkebunan Kelapa	Ton	6034
		53) Tanaman Perkebunan Kakao	Ton	4593
		54) Meningkatnya produksi pertanian :		
		▪ Benih jagung komposit	Kg	40
		▪ Benih padi sawah	Kg	40
		▪ Pupuk NPK	Kg	300
		▪ Pupuk urea	Kg	250
		▪ Kantong plastik pengemas benih	Kg	5
		▪ Karung plastik pengepak benih	Buah	50
		55) Luas lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman perkebunan	Ha	34809,42
		56) Ketersediaan pangan energi	kkap	2.870
		57) Ketersediaan Pangan Protein	gr	74,72
		58) Ketersediaan Pangan Lemak	gr	60,35
		59) Persentasi Konsumsi Pangan	%	75,7
15.	Meningkatnya volume perdagangan komoditas unggulan daerah	60) Penguatan sistem jaringan informasi perdagangan	kali	2
16.	Meningkatnya kelestarian sumberdaya hayati laut	61) Penanganan <i>illegal fishing</i> dan <i>destructive fishing</i>	Kasus	1
		62) Kawasan konservasi laut dalam keadaan baik (Biota Laut)	Jenis	15
17.	Meningkatnya produksi perikanan	63) Peningkatan produksi perikanan tangkap	Ton	15.786
		64) Peningkatan produksi perikanan budidaya	Ton	314
		65) Jumlah kelompok budidaya perikanan	kelompok	520
18.	Meningkatnya kualitas pelayanan public	66) Jumlah OPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan	OPD	7
		67) Jumlah OPD yang memiliki SOP	OPD	4
		68) Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	1000
		69) Rasio pasangan berakta nikah	%	100
		70) Rasio penduduk berakte kelahiran	%	6000
		71) Jumlah izin yang dilayani tiap tahun	Izin	2500
		72) Pola pengembangan karier ASN daerah	Orang	350
		73) Ketersediaan dokumen perencanaan	Dok	Ada/3
		74) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda	Dok	Ada

		75) Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Dok	Ada
		76) Penilaian terhadap kinerja pengelola keuangan daerah	Opini	WTP
		77) OPD yang menerapkan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi	OPD	31
		80) Desa sadar hukum dan komunitas	perdes	20
		81) Jumlah Konflik sosial yang terjadi dimasyarakat	Kasus	4
		82) Cakupan pelayanan korban bencana	%	100
19.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif	83) Desa sangat tertinggal	%	0
		84) Desa tertinggal	%	24
		85) Desa berkembang	%	106
		86) Desa maju	%	36
		87) Desa mandiri	%	3

Tabel 2.4

Program dan Anggaran Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	2	3	4
Sasaran 1 : Meningkatnya Kemandirian Orang Muda			
1.	Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	733.177.350,-	APBD II
2.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	94.884.900,-	APBD II
Sasaran 2 : Meningkatnya Kesempatan Kerja			
1.	Program Pelatihan kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	74.999.800,-	APBD
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.651.651.400,-	APBD
3.	Program Hubungan Industrial	84.999.900,-	APBD
4.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	49.997.000,-	APBD
Sasaran 3 : Meningkatnya Karakter Orang Muda Dan Wawasan Kebangsaan			
1.	Program Penanganan Gangguan Ketertarikan dan ketertibaUmum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	304.433.000,-	APBD
2.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	204.999.800,-	APBD
Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan			
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	65.571.077.986,-	APBD
2.	Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	259.839.800,-	APBD
Sasaran 5 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	32.358.492.166,-	APBD
Sasaran 6 : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial			
1.	Program Pemberdayaan Sosial	5.829.141.600,-	APBD
2.	Program Rehabilitasi Sosial	268.549.600,-	APBD
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	182.110.000,-	APBD
Sasaran 7 : Meningkatnya Peran Perempuan, Anak Serta Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak			
1.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	85.000.000,-	APBD
2.	Program Perlindungan Perempuan	30.000.000,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	20.000.000,-	APBD
4.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	25.000.000,-	APBD

Sasaran 8 : Meningkatnya Kinerja Transportasi			
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.237.630.900,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Pelayaran	7.190.915.752,-	APBD
Sasaran 9 : Meningkatnya Pemenuhan Air Baku Untuk Mendukung Aktivitas Ekonomi, Sosial Dan Budaya			
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	523.429.600,-	DAU
2.	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.124.995.600,-	DAU
Sasaran 10 : Mengurangi Resiko Akibat Bencana			
1.	Program Penanggulangan Bencana	792.184.800,-	APBD
Sasaran 11 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	54.999.800,-	DAU
2.	Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1.124.995.600,-	DAU
3.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	105.039.800,-	DAU
4.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20.000.000,-	DAU
Sasaran 12 : Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Perumahan Dan Lingkungan Permukiman			
1.	Program Kawasan Permukiman	2.300.877.000,-	APBD
2.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah B3	14.999.700,-	DAU
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.732.350.896,-	APBD
4.	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	665.001.400,-	DAU
5.	Program Pengelolaan Persampahan	1.289.997.585,-	DAU
Sasaran 13 : Terwujudnya Perencanaan Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang Kota			
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.774.345.200,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan penataan ruang	30.000.000,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	344.959.336,-	DAU
Sasaran 14 : Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal			
1.	Program Penyediaan dan pengembangan sarana Pertanian	81.902.400,-	APBD
2.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	279.127.500,-	APBD
3.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.228.209.350,-	APBD
4.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	56.332.900,-	APBD

Sasaran 15 : Meningkatnya Volume Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah			
1.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	187.420.000,-	APBD
Sasaran 16 : Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut			
1.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	109.882.500,-	DAU
Sasaran 17 : Meningkatnya Produksi Perikanan			
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.387.175.745,-	DAU
2.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.414.348.505,-	DAU
Sasaran 18 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			
1.	Program Fasilitasi Pelayanan Public dan Tata Laksana	131.175.000,-	APBD
2.	Program Pendaftaran Penduduk	440.874.400,-	APBD II
3.	Program Pencatatan Sipil	256.724.400,-	APBD II
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	124.728.800,-	APBD II
5.	Program Pelayanan Penanaman Modal	70.000.000,-	APBD
6.	Program Kepegawaian Daerah	1.784.305.200,-	APBD
7.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.774.345.200,-	APBD
8.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.148.829.140,-	APBD
9.	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat <i>Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah</i>	354.568.300,-	APBD
10.	Program Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	304.433.000,-	APBD
11.	Program Penanganan Bencana	792.184.800,-	APBD
Sasaran 19 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Efektif			
1.	Program Penataan Desa	50.000.000,-	APBD
2.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	598.957.600,-	APBD
3.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	115.818.600,-	APBD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kab. Flores Timur Tahun 2020

Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Flores Timur atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2017 – 2022. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam RPJMD terdapat 5 Misi, 11 Tujuan, 19 Sasaran, dengan 91 Indikator Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, menggunakan rumus

Realisasi – (Realisasi – Rencana)

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Atau :

(2 x Realisasi) – Realisasi

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Realisasi}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % s.d 100 %	Baik (B)
3	55 % s.d 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Berdasarkan saran/arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, bahwa sasaran dan indikator kinerja yang ada dalam RPJMD dapat diringkas dipilih sasaran yang betul-betul strategis dan indikator kinerja utamanya. Sesuai arahan tersebut sehingga terdapat 19 sasaran dengan indikator kinerja yang semula berjumlah 111 indikator kinerja sasaran menjadi 85 indikator kinerja sasaran sesuai ditetapkan dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

- Misi 1 terdapat 2 tujuan, 7 sasaran dan 36 indikator kinerja
 - Misi 2 terdapat 5 tujuan, 6 sasaran dan 14 indikator kinerja
 - Misi 3 terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 9 indikator kinerja
 - Misi 4 terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 6 indikator kinerja
 - Misi 5 terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 20 indikator kinerja
- (19 Sasaran Strategis dan 85 Indikator Kinerja Utama)

Tabel 3.2

Pencapaian Indikator Sasaran

No	Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Pencapaian Indikator Sasaran			
					BS	B	C	K
1	Misi 1	2	7	36	8	19	4	5
2	Misi 2	5	6	14	1	6	1	6
3	Misi 3	2	2	10	3	5	-	2
4	Misi 4	2	2	5	1	1	1	2
5	Misi 5	1	2	20	6	11	-	3
Jumlah		12	19	85	19	42	6	18

Dari 19 (Sembilan belas) sasaran dengan 85 indikator kinerja, pencapaian indikator sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah :

Tabel 3.3

Presentasi Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase
Misi 1 (7 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali (BS)	3	358,64
2	Baik (B)	2	200
3	Cukup (C)	1	71,0
4	Kurang (K)	1	12,67
Jumlah		7	642,32
Misi 2 (6 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali (BS)	1	104,41
2	Baik (B)	2	200
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	3	52,35
Jumlah		6	355,77
Misi 3 (2 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali (BS)	1	108,79
2	Baik (B)	-	-
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	1	50
Jumlah		2	158,79
Misi 4 (2 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali (BS)	-	-
2	Baik (B)	1	80

3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	1	49,81
Jumlah		2	129,81
Misi 5 (2 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali (BS)	2	498,10
2	Baik (B)	-	-
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
Jumlah		2	498,10
Rata-Rata Capaian Misi 1-5		19	93,94

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 19 sasaran yang mencakup 85 indikator sasaran, diketahui bahwa 19 indikator sasaran kategori **Baik Sekali**, indikator sasaran kategori **Baik** 43 dan 6 indikator sasaran dengan kategori **Cukup** serta 7 indikator sasaran kategori **Kurang** sehingga dapat di simpulkan Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai **94,10 %** dengan kategori **Baik** . Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2022 **Baik**.

3.2 Analisis Capaian

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing - masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Misi 1: Selamatkan Orang Muda Flores Timur

Diukur melalui 7 sasaran dengan 36 indikator kinerja sasaran dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran diuraikan melalui tabel pengukuran kinerja sasaran dan dengan penjelasan tabel sebagai berikut di bawah ini :

Tabel 3.4

Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kemandirian Orang Muda

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1. Jumlah wirausahawan baru	UMKM	55	29	52,73	19783	2508	12,7
Rata-rata capaian kinerja				52,73			12,7

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 Indikator Sasaran **Meningkatnya Kemandirian Orang Muda**, 1 Indikator Sasaran tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 12,7% dengan kategori **kurang**.

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai target dimaksud :

1. Sumber daya manusia;

Aparat pembina yang ada masih belum cukup mampu melatih sehingga masih perlu mendatangkan pelatih dari luar, kuantitas aparat pembina masih belum cukup untuk melatih dibandingkan dengan jumlah koperasi dan usaha mikro yang ada dan sumber daya manusia pengurus koperasi masih relatif rendah.

2. Sarana dan pra sarana

Sarana penunjang untuk melakukan pendampingan masih terbatas.

3. Anggaran;

Alokasi dana masih perlu ditambah karena pembina, pengurus / anggota koperasi dan usaha mikro masih cukup banyak yang belum dilatih dan perlunya pendampingan secara kontinyu kepada mereka yang telah dilatih, agar dapat menerapkan ilmu yang telah di dapat dari kegiatan diklat/ bimtek dalam menjalankan usahanya.

Langkah antisipasi akan dilaksanakan dalam mengatasi masalah/kendala adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Skill/ keterampilan di bidang usaha maupun di bidang teknologi atau pun keterampilan lainnya yang dibutuhkan di dunia kerja;
2. Membangun kerjasama dengan pihak swasta untuk membuka industri-industri yang berskala kecil yang mudah menyerap tenaga kerja;
3. Melaksanakan sosialisasi undang-undang ketenaga kerjaan bagi masyarakat;

4. Mengembangkan koperasi dan usaha mikro yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing sedangkan pengembangan usaha mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
5. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen usaha koperasi dan usaha mikro yang baik terutama untuk (i) memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan, (ii) memperbaiki lingkungan usaha (iii) meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi.
6. Mengembangkan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk semakin berperan sebagai penyedia barang dan jasa, maju, berdaya saing khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
7. Membangun koperasi yang diarahkan pada upaya-upaya (i) membenahi dan memperkuat tata kelembagaan dan organisasi koperasi, (ii) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholder) kepada koperasi, (iii) meningkatkan kemandirian koperasi.

Tabel 3.5

Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 1

No	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi	%
1	Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	733.177.350	722.616.200,00	98,56
2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	94.884.900	92.597.100,00	97,59
Rata-rata		828.062.250	815.213.300,00	98,45

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Kemandirian Orang Muda adalah Rp. 815.213.300,00,- dari target Rp. 828.062.250,- atau sebesar 98,45%.

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatkan Kesempatan Kerja

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1 Tingkat Pengangguran Terbuka	2,06	3,15	152,91	2,06	3,48	3,48	100
Rata-rata capaian kinerja				2,06			100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 1 Indikator Sasaran **Meningkatkan Kesempatan Kerja**, 1 Indikator Sasaran mencapai target, rata-rata capaian kinerja tahun 2022 sebesar **100%, Baik**.

Adapun kendala yang dihadapi yaitu masalah Belum Optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh mediator hubungan industrial. Tidak seimbangnya rasio dari jumlah mediator hubungan industrial dengan jumlah perusahaan dan koordinasi dengan Kabupaten atau Kota belum optimal. Maka solusinya adalah dengan meningkatkan pembinaan yang dilakukan oleh mediator hubungan industrial, meningkatkan MoU dengan perusahaan dan stakeholder lainnya terkait kerjasama di bidang pelatihan dan penempatan, memperluas jaringan informasi pasar kerja dengan berbagai pihak yang berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, adanya sistem pembekalan akhir sebelum pemberangkatan sehingga mengurangi masalah TKI.

Tabel 3.7

Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 2

No	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program Pelatihan kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	74.999.800	74.968.200	99,96
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.651.651.400	1.648.563.727	99,81
3	Program hubungan industrial	84.999.900	84.839.300	99,81
4	Program pembangunan kawasan transmigrasi	49.997.000	49.790.000	99,59
Rata-rata		1.861.648.100	1.858.161.227	99,81

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja adalah Rp. 1.858.161.227,- dari target Rp. 1.861.648.100,- atau sebesar **99,81%**.

Tabel 3.8

**Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Karakter Orang Muda dan Wawasan Kebangsaan**

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1 Jumlah konflik antar pemuda	Kasus	0	0	100	4	0	100
Rata-rata capaian kinerja				100			100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator kinerja sasaran **Meningkatnya Karakter Orang Muda dan Wawasan Kebangsaan**, 1 Indikator Sasaran mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 100% dengan kategori **Baik**, dengan penjelasan semakin kecil Presentase Realisasi Semakin besar capaian Kinerja tahun 2022.

Adapun kendala yang dihadapi adalah hampir semua kegiatan membutuhkan koordinasi yang luas karena melibatkan berbagai komponen sumberdaya manusia dan kelembagaan sehingga sangat riskan terhadap penjadwalan kegiatan dan pendanaan secara tepat. Sehingga perlunya peningkatan pemantapan koordinasi tentang kebijakan, program dan kegiatan dengan keterlibatan Stakeholder.

Tabel 3.9

Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 3

No	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi	%
1	Program Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertibaUmum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	304.433.000	303.433.333	99,67
2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	204.999.800	204.999.800	100
Rata-rata		509.432.800	508.433.133	99,80

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Karakter Orang Muda Wawasan Kebangsaan adalah Rp. 508.433.133,- dari target Rp. 509.432.800,- atau sebesar 99,80%.

Tabel 3.10

Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan

NO	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja tahun 2022
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,34	7,30	99,46	7,3	7	95,9
2	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	%	48	67,54	140,71	48	70,33	146,5
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	91,02	88,47	97,20	99,50	90,07	90,5
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	71,62	69,9	97,60	82,33	68,72	83,5
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	46	89,63	194,85	46	97,34	211,6
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	105	101,57	96,73	103	101,90	98,9
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	99	94,64	95,69	96,85	92,08	95,1
8	Angka Melek Huruf	%	99,85	99,52	99,97	0,2	0,48	240
9	Angka melanjutkan pendidikan ke SD	%	100	100	100	100	100	100,0
10	Angka melanjutkan pendidikan ke SMP	%	97,59	110,26	113	98,50	100	101,5
11	Angka kelulusan SD/MI	%	99,99	100	100,01	99,99	100	100
12	Angka kelulusan SMP/MTs	%	98,8	100	100,21	99,28	100	100,7
13	Guru yang memenuhi kelulusan S1	%	100	81,05	81,05	100	82,96	82,96
14	Persentase sarana prasarana pendidikan SD dalam kondisi baik	%	60,24	22,95	38,10	42,00	27,55	65,6
15	Persentase sarana prasarana pendidikan SMP kondisi baik	%	70,02	26,94	38,47	26,00	43,82	168,5
Rata-rata					99,53			118,75

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 15 indikator sasaran **Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan**, dengan rincian 5 indikator dengan kategori **Baik Sekali**, 9 indikator dengan kategori **Baik**, dan 1 indikator dengan kategori **Cukup**, sehingga capaian indikator pada sasaran 4 yaitu 118,75 dengan kategori **Baik Sekali**. Nilai Capaian diperoleh dari:

1. Nilai Capaian APM PAUD mencapai nilai 146,5 dengan kategori **Baik Sekali** dan nilai capaian APK PAUD 211,6% dengan kategori **Baik Sekali**, hal ini menunjukkan bahwa masih ada anak usia sekolah Paud (5-6 Tahun) yang belum bersekolah

sehingga pemerintah perlu melakukan pendampingan/Sosialisasi terhadap pentingnya program pendidikan anak usia dini bagi masyarakat.

2. Berdasarkan tabel dapat di lihat bahwa APK SD memiliki nilai Capaian 98,9% dengan kategori **Baik** hal ini menunjukkan bahwa ada penduduk yang bersekolah dengan usia di bawah 7 tahun atau lebih 12 tahun yang bersekolah pada jenjang SD, untuk APM SD memiliki nilai capaian 90,5% dengan kategori **Baik** hal ini menunjukan bahwa tidak semua anak yang bersekolah tepat waktu atau sesuai dengan usia dan jenjang pedidikannya, sedangkan APK SMP memiliki nilai capaian 95,1% dengan kategori **Baik**, hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya partisipasi penduduk yang bersekolah pada jenjang SMP, capaian nilai APM SMP yaitu 83,5% dengan kategori **Baik** hal ini menunjukkan bahwa belum maksimalnya usia anak yang bersekolah SMP tepat pada waktunya.
Selain itu ketercapaian target dari meningkatnya APK, APM wajib bekajar 9 tahun dapat juga di lihat dari pencapaian target atau indikator kinerja utama lainnya yaitu :
 - a. Angka melanjutkan pendidikan ke SD dengan capaian nilai 100 dengan kategori **Baik**;
 - b. Angka melanjutkan pendidikan ke SMP dengan capaian nilai 101,5 dengan kategori **Baik Sekali**;
 - c. Angka kelulusan SD/ Mi dengan capaian nilai 100 dengan kategori **Baik**;
 - d. Angka Kelulusan SMP/MTs dengan capaian nilai 100,7 dengan kategori **Baik Sekali**
 - e. Fasilitas pendidikan sekolah pendidikan SD dalam kondisi bangunan baik dengan capaian nilai 65,6 dengan kategori **Cukup Baik**
 - f. Fasilitas pendidikan sekolah pendidikan SMP dalam kondisi bangunan baik dengan capaian nilai 168,5 dengan kategori **Baik Sekali**
3. Presentase peningkatan kualitas pendidikan non formal merupakan salah satu sasaran strtegis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk meningkatkan angka melek huruf di Kabupaten Flores Timur, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Realisasi penurunan anka buat huruf hanya mencapai 0,48% dari target 0,2 % data ini merujuk pada data BPS tahun 2021
4. Presentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1 termaksud dalam kategori **Baik** dengan dengan realisasi kinerja sebesar 82,96% dari target 100% sehingga capaian kinerja di tahun 2022 yaitu 82,96 sehingga dapat dilihat bahwa presentase jumlah di kabupaten Flores Timur (SD,SMP) yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV realisasi melebihi di pengaruhi oleh kurangnya perguruan

tinggi yang ada di kabupaten Flores Timur sehingga usaha tenaga pendidikan untuk memenuhi standar kualifikasi mendapat kendala yang cukup berat khususnya untuk biaya pendidikan tersebut.

Beberapa hal yang berhasil diidentifikasi sebagai penyebab dari belum tercapainya tingkat kinerja yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya alokasi anggaran untuk mendukung penyusunan program dan kegiatan serta pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Penyelesaian sejumlah paket pekerjaan tidak tepat waktu
3. Pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS baik Satdik Negeri dan Swasta belum tertib dan tepat waktu
4. Terbatasnya sarana yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan.
5. Terbatasnya sumber daya manusia aparatur SKPD dinas PKO (aspek jumlah, pendidikan, disiplin dan kinerja).
6. Pengendalian dan pengawasan internal SKPD belum maksimal.

Strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan adalah :

1. Pengalokasian anggaran dan peralatan yang memadai untuk mendukung kegiatan pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi [pelaksanaan kegiatan.
2. Ketaatan pelaksanaan program/kegiatan sesuai kalender kerja tahunan yang telah ditetapkan.
3. Perlu adanya koordinasi yang terintegrasi sejak awal tahun anggaran dalam rangka perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana BOS.
4. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja secara intern.
6. Menegakan integritas nilai etika dan praktik pembinaan sumber daya manusia melalui penyusunan dan penyerapan aturan perilaku serta kebijakan lain yang berisi tentang standar perilaku etis, serta tindak disiplin yang tepat.

Tabel 3.11

Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 4

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program pengelolaan pendidikan	65.571.077.986	59.130.058.984	90,18
2	Program pendidik dan tenaga kependidikan	259.839.800	252.639.800	97,23
Rata-rata		65.830.917.786	59.382.698.784	90,20

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan adalah Rp. 59.382.698.784,- dari target Rp. 65.830.917.786,- atau sebesar 90,20%.

Tabel 3.12

**Analisis Pencapaian Sasaran 5
Meningkatkan Drajat Kesehatan Masyarakat**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja tahun 2022
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	66,9	65,7	98,20	65	65,4	100,4
2	Angka Kematian Bayi	%	17/1000	11,1/1000	153,15	16/1000	12,37/1000	122,69
3	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KH)	%	110/100.000	1449/100.000	73,83	102/100.000	227/100.000	22,55
4	Angka Gizi Buruk	%	0,3	0,4	75,00	0	0,6	60
5	Cakupan Pelayanan Anak Usia Pendidikan Dasar	%	100	35	35	100	35	35,0
6	Cakupan Pelayanan Usia Produktif	%	90	34,6	38,44	100	40	40,0
7	Cakupan Penanganan Kasus Penyakit Menular	Kasus	88	74	84	9850,0	8358	84,85
8	Cakupan Penanganan Kasus Penyakit Tidak Menular	Kasus	50	54	108	100	84,85	84,85
9	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan	%	100	99,4	99,40	100	99,8	99,8

10	Penemuan Penderita Baru Penyakit TB – BTA+	%	95	19	20	100	29,31	29,3
11	Cakupan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	75	58	77,33	80	58	72,5
13	Cakupan Peserta KB Aktif	%	65	31,2	48,00	68	38,2	56,2
14	Cakupan Pelayanan KB Keluarga Miskin	%	89	76	83,39	89	76	85,4
Rata-rata					78,12			74,1

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 14 indikator sasaran **Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**, terdapat 1 indikator dengan kategori **Baik Sekali**, 6 Indikator dengan kategori **Baik**, 3 Indikator dengan kategori **Cukup**, dan 4 Indikator dengan kategori **Kurang**. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 71,00% dengan kategori **Cukup**. Nilai capaian ini diperoleh dari :

1. Usia Harapan Hidup dengan capaian 100,4 kategori **Baik Sekali**
2. Angka Kematian Bayi, pencapaian melebihi target yang di tetapkan 12,3/1000 KLH dari 16/1000KLH dengan jumlah kematian bayi 49 orang dari 3.959 KLH indikator-indikator pendukung yang mempengaruhi pencapaian target AKB ini seperti cakupan neonatus dengan komplikasi yang di tangani sebesar 100% cakupan kunjungan Neonatal 100%, dan cakupan kunjungan bayi hanya 87,5%. Walaupun melebihi dari target yang di tetapkan namun jumlah kematian bayi masih cukup tinggi sehingga perlu berbagai upaya seperti melakukan pemeriksaan bayi /Neonatus yang lebih berkualitas pada saat kunjungan Neonatal dan kunjungan bayi serta pertolongan yang tepat pada saat ke gawat daruratan yang terjadi pada bayi maka nilai capaian pada angka kematian bayi adalah 112,69.
3. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2022 yaitu sebesar 227/100.000 KH dengan jumlah kasus kematian 9 orang dari 3.960 KH dengan nilai capaian yang di dapat yaitu 22,55%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 dimana AKI sebesar 149/100.000 KH maka kematian ibu di tahun 2022 meningkat dari tahun 2021.

4. Untuk kondisi gizi balita di Kabupaten Flores Timur memiliki capaian sebesar 60% sehingga masih menjadi masalah dengan tingginya kasus gizi Buruk untuk tahun 2022 yaitu sebanyak 105 balita atau 0,6 % dari 18.228 balita yang ditimbang. Capaian ini dibawah target yang ditetapkan yaitu 0,1 %. Indikator gizi lainnya seperti Prevalensi Stunting juga masih tinggi walaupun capaiannya melebihi target yaitu 15,6 % dari target 28 % dengan jumlah balita stunting sebanyak 2.845 balita. Permasalahan gizi dipengaruhi oleh Indikator-indikator pendukung seperti cakupan balita ditimbang di posyandu 98,67 %, bayi baru lahir mendapat inisiasi menyusui dini (IMD) 77,4 %, dan cakupan bayi usia 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif 61,5 %. Indikator pendukung ini belum mencapai target yang ditetapkan.
5. pengendalian penyakit menular maupun penyakit tidak menular sebagian sudah mencapai target dan sebagian belum mencapai target. Beberapa Penyakit Menular seperti penyakit TB rata-rata indikatornya belum mencapai target dengan indikator utama yaitu cakupan terduga TB yang dilayani capaiannya 69,7 % dari target 100 % dan Angka Keberhasilan Pengobatan dengan capaian 92,6 % dari target 100 %. Pada penyakit HIV/AIDS, Indikator presentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan HIV sesuai standar pencapaiannya 77,1 % dari target 100 % dimana dari 6.931 sasaran pada beberapa kelompok resiko baru terdapat 6.931 sasaran yang dilayani. Sedangkan pada indikator kasus HIV yang diobati capaiannya sudah 100 % dari target 94 %, dari 35 kasus baru yang ditemukan semuanya diobati . Untuk kasus penyakit menular lainnya seperti penyakit DBD,malaria dari indikator utama yang digunakan sudah menggambarkan penanganan yang maksimal. Untuk indikator imunisasi yang mendukung pengendalian penyakit menular pada indikator anak usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap capaiannya masih dibawah target yaitu 74 % dari 100 %. Jumlah bayi yang diimunisasi lengkap sampai pada imunisasi Campak di Tahun 2022 adalah 3.960 bayi.
6. Penyakit Tidak Menular sebagian tercapai dan sebagian belum tercapai. Pada indikator pelayanan kesehatan penderita Hipertensi capaian kinerja baru mencapai 17 % target 100 %. Dari perkiraan penderita Hipertensi sejumlah 59.323 jiwa, hanya 10.087 jiwa yang dilayani atau dilakukan skrining pada posbindu di desa-desa ataupun di puskesmas. Untuk Diabetes Melitus dengan indikator pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus pencapaiannya masih dibawah target 77,9 % dengan jumlah kasus 1.219 jiwa dari perkiraan 1.565 jiwa. pada indikator perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara dengan melakukan pemeriksaan capaian masih jauh dibawah target

yaitu 8,4 % dari target 100 %. Untuk pelayanan kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sudah melebihi target yaitu lebih dari 100 % dari target 100 %. Di Kabupaten Flores Timur tahun 2022 terdapat 498 ODGJ berat yang dilayani.

7. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin pencapaiannya baru 72,5 % dengan kategori **Cukup**, dari target 80 % dan realisasi 58% dengan jumlah masyarakat Flores Timur yang dibiayai jaminan kesehatannya sebesar 172.839 jiwa.
8. Cakupan Peserta KB Aktif dengan nilai target 68%, realisasi sebesar 38,2% dengan capaian kinerja 56,2 % dalam kategori **Cukup Baik**.
9. Cakupan Peserta KB Keluarga Miskin dengan nilai target sebesar 89%, realisasi sebesar 76% sehingga capaian kinerja 85,4% dalam kategori **Baik**.

Strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan adalah :

1. Menambah tenaga kesehatan terutama Tenaga Dokter dan Ahli Gizi dan Pemerataan Tenaga Kesehatan khususnya pada daerah-daerah yang sulit dijangkau.
2. Meningkatkan upaya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), baik langsung maupun tidak langsung melalui lisan maupun media cetak dan elektronik.
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang Kesehatan
4. Meningkatkan koordinasi Lintas sektor mulai dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
5. Meningkatkan Efektifitas Anggaran yang ada untuk kegiatan-kegiatan prioritas.

Hambatan dan masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Jumlah tenaga yang belum memadai terutama pada daerah yang sulit dijangkau.
2. Faktor perilaku masyarakat yang tidak serta merta mengadopsi semua pesan yang diberikan oleh petugas kesehatan.
3. Kurangnya alokasi anggaran sehingga sehingga banyak hal yang direncanakan namun tidak terakomodir dalam anggaran.

Strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan adalah :

1. Menambah tenaga kesehatan terutama Tenaga Dokter, Ahli Gizi, dan bidan serta Pemerataan Tenaga Kesehatan khususnya pada daerah-daerah yang sulit dijangkau maupun yang padat penduduknya.

2. Meningkatkan upaya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), baik langsung maupun tidak langsung melalui lisan maupun media cetak dan elektronik.
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang Kesehatan
4. Meningkatkan koordinasi Lintas sektor mulai dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
5. Meningkatkan Efektifitas Anggaran yang ada untuk kegiatan-kegiatan prioritas.

Tabel 3.13

Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 5

No	Program / kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi	%
1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	32.358.492.166	27.807.302.264	85,94
Rata-rata		32.358.492.166	27.807.302.264	85,94

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat adalah Rp. 27.807.302.264,- dari target Rp. 32.358.492.166,- atau sebesar 85,94%.

Tabel 3.14

Analisis Pencapaian Sasaran 6
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang atas Kesejahteraan Sosial

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja tahun 2022
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Ditangani	%	6,70	2,85	42,54	6,77	53,3	131,2
Rata-rata					42,54			131,2

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 Indikator Sasaran **Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang atas Kesejahteraan Sosial**, 1 Indikator Sasaran mencapai target yaitu memiliki nilai capaian 131,2 dengan kategori **Baik Sekali**, indikator ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya ketentraman dan ketertiban yang ada di masyarakat.

Tabel 3.15

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 6

No	Program / kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi	%
1	Program pemberdayaan social	5.829.141.600	5.795.088.800	99,42
2	Program rehabilitasi social	268.549.600	259.698.000	96,70
3	Program Perlindungan dan jaminan social	182.110.000	180.504.000	99,12
Rata-rata		6.279.801.200	6.235.290.800	99,29

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah Rp. 6.235.290.800,- dari target Rp. 6.279.801.200,- atau sebesar 99,29%.

Tabel 3.16

Analisis Pencapaian Sasaran 7
Meningkatkan Peran Perempuan Anak Serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja tahun 2022
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Partisipasi Perempuan Dalam Jabatan Publik	%	42,50	27,5	64,71	43	55	129,4
2	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	65	29	44,62	65	62,8	96,6
3	Menurunnya Kasus Kekerasan Terhadap Anak	%	20	20	100	20	20	100,0
Rata-rata					69,77			108,67

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 3 Indikator Kinerja Sasaran **Meningkatkan Peran Perempuan Anak Serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak**, 1 indikator dengan kategori **Baik Sekali** dan 2 indikator dengan kategori **Baik**. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 108,7%, dengan kategori **Baik Sekali**.

Kendala dalam pencapaian target dikarenakan :

1. Belum memiliki *Grand Design* kependudukan;
2. Belum optimalnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB secara merata kepada masyarakat terutama di wilayah DPPK dan miskin perkotaan;
3. Rasio tenaga PKB dan PLKB di bandingkan dengan wilayah binaan;
4. Pengetahuan dan keterampilan pengelola dan pelaksana program KKBPK di tingkat Kabupaten/Kota masih rendah karena sering terjadi mutasi;
5. Kuantitas maupun kualitas pencatatan dan pelaporan dari tingkat lapangan sering terlambat dan belum akurat.

Solusi :

1. Pembentukan forum data base terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta mengaktifkan kembali sistem pelaporan SIMFONI (Pelatihan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak);
2. Memperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga dalam penyelenggaraan program KB;
3. Perlunya penambahan tenaga lini lapangan;
4. Membuat *Grand Design* kependudukan;
5. Adanya kebijakan daerah yang menyangkut tentang perlindungan perempuan dan anak.

Tabel 3.17

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 7

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi	%
1	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	85.000.000	82.925.000	97,56
2	Program perlindungan perempuan	30.000.000	29.905.000	99,68
3	Program pengelolaan system data gender dan anak	20.000.000	20.000.000	100,00
4	Program pemenuhan hak anak (PHA)	25.000.000	25.000.000	100,00
Rata-rata		160.000.000	157.830.000	98,64

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Peran Perempuan Anak Serta Perlindungan Terhadap

Perempuan dan Anak adalah Rp. 157.830.000,- dari target Rp. 160.000.000,- atau sebesar 96,64%

Misi 2: Selamatkan Infrastruktur Flores Timur

Diukur melalui 6 sasaran dengan 14 indikator kinerja sasaran dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran diuraikan melalui tabel pengukuran kinerja sasaran dan dengan penjelasan tabel sebagai berikut di bawah ini.

Tabel 3.18

Analisis Pencapaian Sasaran 8 Meningkatkan Kinerja Transportasi

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja tahun 2022
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Prasarana Transportasi Dalam Kondisi Baik	Unit	1	1	100	103,25	31	30,0
2	Pengujian Angkutan Umum Laik Jalan	Kali	609	79	12,97	609	0	0,0
3	Pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Unit	15	6	40	400	0	0,0
4	Rasio Izin Trayek	Dok	35	32	91	35	0,1	0,3
Rata-rata					60,99			7,59

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4 Indikator Kinerja Sasaran **Meningkatkan Kinerja Transportasi**, 4 indikator tidak mencapai target dengan Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 7,59 % dengan kategori **Kurang**.

Tabel 3.19

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 8

No.	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi	%
1	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	2.237.630.900	2.231.264.566	99,72
2	Program pengelolaan pelayaran	7.190.915.752	7.190.837.712	100,00
Rata-rata		9.428.546.652	9.422.102.278	99,93

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Kinerja Transportasi adalah Rp. 9.422.102.278,- dari target Rp. 9.428.546.652,- atau sebesar 99,93%.

Tabel 3.20

Analisis Pencapaian Sasaran 9
Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Untuk Mendukung
Aktivitas Ekonomi Sosial Budaya

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja tahun 2022
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Rasio Jaringan Irigasi	%	0,41	0,39	95,12	1	1	100,0
2	Akses Air Minum Aman	%	100	81,58	81,58	1873	1372	73,3
3	Presentase Daerah Mata Air yang dikonservasi	Lokasi	3	0	0	5	7	140,0
Rata-rata					58,9			104,41

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 3 indikator kinerja sasaran **Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Untuk Mendukung Aktivitas Ekonomi Sosial Budaya**, 1 Indikator dengan kategori **Baik Sekali**, 1 indikator dengan kategori **Baik**, dan 1 Indikator dengan kategori **Cukup**. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 104,15%. dengan kategori **Baik Sekali**. Nilai realisasi tahun 2022 ini diperoleh dari :

1. Rasio jaringan irigasi dengan uraian kegiatan yaitu pengerukan sedimen D. I Waiwadan SID Irigasi Kabupaten Flore Timur dengan nilai capaian 100% dengan kategori **Baik**;
2. Akses Air minum aman, dengan uraian kegiatan yaitu terbangunnya instalasi air minum/ air bersih dan sanitasi yang menjangkau masyarakat dengan nilai target 1873 SR, realisasinya 1372 SR dan capaian 73,3% dengan kategori **Cukup**;
3. Daerah mata air yang di konservasi memiliki target 5 mata air dan realisasi 7 mata air sehingga capaian yang di dapat 140% dengan kategori **Baik Sekali**.

Pencapaian diatas tidak luput pula dari hambatan/kendala yang dihadapi. Hambatan dan Kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya perhatian mengenai kesesuaian antara Renstra, Tapkin dan data untuk penyusunan LKIP.

2. Ada beberapa kegiatan yang gagal lelang karena kurangnya penyedia barang dan jasa.
3. Kurang memperhatikan yang bersifat urgensi akan Paket dari pada Program Kegiatan.
4. Kurang Efisiensi dan efektivitas dalam proses kinerja.
5. Masalah yang muncul di Lapangan ketika pelaksanaan Program Kegiatan
6. Keterbatasan Sumber daya manusia
7. Keterbatasan alokasi Dana

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut diperlukan upaya-upaya untuk mendapatkan solusi diantaranya:

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka pemenuhan data yang melibatkan Elemen - elemen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan . Selanjutnya kedepan perlu diadakan persamaan persepsi melalui peningkatan pemahaman seluruh bidang mengenai akuntabilitas kinerja terutama LKIP.
2. Seluruh kegiatan proses pelelangan dipercepat terutama untuk pelelangan penyedia Konsultasi Perencanaan.
3. Skala Prioritas yang bersifat urgensi akan Paket daripada Program Kegiatan.
4. Efisiensi dan efektivitas di utamakan dalam proses kinerja.
5. Meminimalisir masalah yang muncul di Lapangan ketika pelaksanaan Program Kegiatan
6. Menggali potensi sumber dana sebagai Pendapatan
7. Meningkatkan Potensi Sumber Daya Manusia

Tabel 3.21

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 9

No	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi	%
1	Program pengelolaan sumber daya air	523.429.600	468.912.280	89,58
2	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1.124.995.600	1.024.027.585	91,03
Rata-rata		1.648.425.200	1.492.939.865	90,57

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Untuk Mendukung Aktivitas Ekonomi

Sosial Budaya di tahun 2022 adalah Rp. 1.492.939.865,- dari target Rp. 1.648.425.200,- atau sebesar 90,57%.

Tabel 3.22

Analisis Pencapaian Sasaran 10
Mengurangi Resiko Akibat Bencana

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja tahun 2022
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai yang dibangun	%	100	100	100	4500	79,5	1,8
Rata-rata					100			1,8

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 Indikator Sasaran **Mengurangi Resiko Akibat Bencana Alam**, 1 Indikator Sasaran mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 dengan nilai target 4500 dan realisasinya 79,5 maka capaian yang di dapat 1,8 % dengan kategori **Kurang**.

Tabel 3.23

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 10

No	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi	%
1	Progam Penanggulangan Bencana	792.184.800	789.726.072	99,69
Rata-rata		792.184.800	789.726.072	99,69

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Mengurangi Resiko Akibat Bencana Alam di tahun 2022 adalah Rp. 789.726.072,- dari target Rp. 792.184.800,- atau sebesar 99,69%.

Tabel 3.24

Analisis Pencapaian Sasaran 11
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja tahun 2022
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Presentase Usaha wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen izin lingkungan	Jenis Usaha	154	154	100	50	21	42,0
Rata-rata					100			42,0

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 Indikator Sasaran **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**, 1 indikator sasaran tidak mencapai target dengan nilai capaian 42,0 kategori **Kurang**. Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur telah menerbitkan 21 rekomendasi kelayakan lingkungan bagi usaha perorangan, kelompok ataupun lembaga, yang terdiri dari :

- o AMDAL/DELH : 1 rekomendasi
- o UKL-UPL : - rekomendasi
- o SPPL : 20 rekomendasi

Capaian indicator kinerja sasaran dari target 50 rekomendasi kelayakan lingkungan dan sebanyak 21 rekomendasi yang dikeluarkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur untuk tahun 2022, prosentase yang dicapai sebesar 42%, rekapan rekomendasi kelayakan lingkungan terlampir

Masalah yang dihadapi sehingga prosentase menurun karena :

- o Penerbitan persetujuan lingkungan sesuai dengan PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana persetujuan lingkungan sekarang sudah menggunakan Sistem OSS (Online Sistem Submission)
- o Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk mengurus persetujuan lingkungan masih rendah.

Dari Tahun 2018 sampai tahun 2022 rekomendasi kelayakan lingkungan yang telah dikeluarkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores sebanyak 796 rekomendasi persetujuan lingkungan.

Indikator kinerja sasaran ini dicapai melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan atau Kegiatan

Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH.

Tabel 3.25

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 11

No	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program perencanaan lingkungan hidup	54.999.800	54.975.800	99,96
2	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1.124.995.600	1.024.027.585	91,03
3	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	105.039.800	103.644.800	98,67
4	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20.000.000	20.000.000	100,00
Rata-rata		1.305.035.200	1.202.648.185	92,15

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di tahun 2022 adalah Rp.1.202.648.185,- dari target Rp. 1.305.035.200,- atau sebesar 99,79%.

Tabel 3.26

Analisis Pencapaian Sasaran 12
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja tahun 2022
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Rumah tidak layak huni	Unit	195	46	23,59	66	66	100,0
2	Presentasi Sampah Perkotaan yang ditangani	%	100	80,93	80,93	12	12	100,0
Rata-rata					52,26			100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 Indikator Sasaran **Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman**, 2 indikator sasaran mencapai. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 100% kategori **Baik**. Nilai capaian ini diperoleh dari

1. Perbaikan rumah tidak layak huni. Target pembangunan Rumah Tidak Layak Huni pada tahun 2022 adalah 66 dengan realisasinya 66 Unit, sehingga mendapat nilai capaian 100%
2. Presentase sampah perkotaan memiliki target 12 % dan realisasinya 12 % sehingga nilai capaian yang di dapat 100%

Tabel 3.27 Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 12

No	Program/kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program kawasan pemukiman	2.300.877.000	2.300.562.318	99,99
2	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3	14.999.700	14.975.700	99,84
3	Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum	7.732.350.896	6.861.162.611	88,73
4	Program pengembangan system dan pengelolaan dan persampahan regional	665.001.400	638.194.400	95,97
5	Program pengelolaan persampahan	1.289.997.585	1.003.459.414	77,79
Rata-rata		12.003.226.581	10.818.354.443	90,13

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman di tahun 2022 adalah Rp.10.818.354.443,- dari target Rp.12.003.226.581,- atau sebesar 90,13%.

Tabel 3.28

Analisis Pencapaian Sasaran 13
Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang Kota

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2010		Capaian kinerja tahun 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja tahun 2022
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dok	2	2	100	3	3	100,0
2	Cakupan Pengendalian dan	%	100	100	100	100	100	100,0

	Pemanfaatan Ruang							
3	Pemenuhan Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan	Lokasi	2	2	100	2	2	100,0
Rata-rata					100			100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 3 indikator sasaran **Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang Kota**. 3 Indikator sasaran mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 100% dengan kategori **Baik**. Nilai capaian diperoleh dari :

1. Jumlah dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, realisasi tercapai 3 dokumen atau 100%. Yang terdiri dari 3 Dokumen Perencanaan.
2. Cakupan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan kegiatan Pengawasan pemanfaatan ruang mencapai sasaran ini sebesar 100 % dengan output jumlah Rekomendasi IMB sebesar 100% yang berdampak pada tertatanya kawasan sesuai dengan konsep penataan ruang.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur pada tahun 2022 mempunyai Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatannya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dimana dengan sejumlah anggaran maka dilakukan Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota pada 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Larantuka (8 lokasi) dan Kecamatan Adonara Timur (2 lokasi), dengan luasannya 4,067 ha. Tahun 2022 ada penambahan 1 lokasi di Kecamatan Adonara Timur (Luas RTH pada lampiran 5).

Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 adalah :

1. Penanaman dan pemangkasan pohon dan bunga di taman kota Felix Fernandez.
2. Perbaikan saluran/instalasi air di Taman Balela dan Taman Pohon Sirih.
3. Pemasangan saluran/instalasi air di Taman Kota Waiwerang.
4. Pembukaan areal taman baru di wilayah Taman Waiwerang Kota

Dalam mendukung pengembangan Ruang Terbuka Hijau maka tahun anggaran 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur memberikan bantuan anakan Pinang ke masyarakat di desa Nuhablolon Kecamatan Solor Barat dan Anakan pinang ke masyarakat Desa Hokeng Jaya Kecamatan Wulanggintang untuk ditanam di pekarangan rumah atau kebun masyarakat.

Tabel 3.29

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 13

No	Program/kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1.774.345.200	1.766.797.840	99,57
2	Program penyelenggaraan penataan ruang	30.000.000	29.950.000	99,83
3	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	344.959.336	316.925.250	91,87
Rata-rata		2.149.304.536	2.113.673.090	98,34

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang Kota di tahun 2022 adalah Rp. 2.113.673.090,- dari target Rp. 2.149.304.536,- atau sebesar 98,34%.

Misi 3 : Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur

Diukur melalui 2 sasaran dengan 10 indikator kinerja sasaran dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran diuraikan melalui tabel pengukuran kinerja sasaran dan dengan penjelasan tabel sebagai berikut di bawah ini.

Tabel 3.30

Analisis Pencapaian Sasaran 14
Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis
Potensi Lokal

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja tahun 2022
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tanaman Perkebunan Jambu Mete	Ton	2687	1126	41,91	3507	13530	385,8
2	Tanaman perkebunan Kelapa	Ton	4687	842	17,96	6034	10672	176,9

3	Tanaman perkebunan Kakao	Ton	0	0	0	4593	2366	51,5
4	Meningkatnya produksi pertanian							
	Benih jagung komposit	Kg	0	0	0	40	40	100,0
	Benih Padi Sawah	Kg	0	0	0	40	40	100,0
	Pupuk NPK	Kg	0	0	0	300	300	100,0
	Pupuk Urea	Kg	0	0	0	250	250	100,0
	Kantong pelastik pengemas benih	Kg	0	0	0	5	5	100,0
	Kantong pelastik pengepak benih	Kg	0	0	0	50	50	100,0
5	Luas Lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman Perkebunan	Ha	300	293,38	97,79	34809,420	35452	101,8
6	Ketersediaan Pangan Energi	Kkap	3,243	3,243	100	2870	2.870	100
7	Ketersediaan Pangan Protein	Gr	85,41	85,41	100	74,72	74,72	100
8	Ketersediaan Pangan Lemak	%	65,54	65,54	100	60,35	60,35	100
9	Presentasi Konsumsi Pangan	%	80,6	89,3	110,794	75,7	75,7	100
Rata-rata					81,207			108,7

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 9 indikator kinerja sasaran **Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal**, 3 indikator dengan berkategori **Baik Sekali**, 5 Indikator berkategori **Baik**, dan 1 Indikator berkategori **Kurang**. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 108,7% dengan kategori **Baik Sekali**. Nilai capaian ini diperoleh dari :

1. Tanaman Perkebunan Jambu Mente. Realisasi hasil produksi jambu mente sebesar 1.240 ton, dimana merupakan hasil produksi jambu mente pada 5 Kecamatan utama sasaran Manja Mente tahun 2019 (data statistik Perkebunan tahun 2019). Hasil produksi jambu mente tahun 2020 baru dapat diketahui pada tahun 2021 dengan realisasinya 13.529 ton dari target 3507 Ton.
2. Tanaman Perkebunan Tembakau menggunakan dana bagi Hasil-Cukai tembakau (DBH-CHT) baik dari APBD II maupun APBD I, dari dana APBD II lebih diarahkan bagi 3 kelompok tani.
3. Tanaman Perkebunan Kelapa hasil realisasinya 10.672 Ton dengan target awal 6.034 Ton dengan capaian sebesar 176,9%.
4. Meningkatnya produksi pertanian diperoleh dari

- a. Benih jangung komposit dengan target 40 kg dan realisasinya 40 kg, sehingga capaian 100 kategori **Baik**;
 - b. Benih padi sawah dengan target 40 kg dan realisasinya 40 kg, sehingga capaian 100 kategori **Baik**;
 - c. Pupuk NPK dengan target 300 kg dan realisasinya 300 kg, sehingga capaian 100 kategori **Baik**;
 - d. Pupuk urea dengan target 250 kg dan realisasinya 250 kg, sehingga capaian 100 kategori **Baik**;
 - e. Kantong plastik pengemas benih dengan target 5 kg dan realisasinya 5 kg, sehingga capaian 100 kategori **Baik**;
 - f. Karung plastik pengepak beni dengan target 50 Buah dan realisasinya 50 Buah, sehingga capaian 100 Kategori **Baik**.
5. Luas Lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman perkebunan dengan target 34.809 Ha dan realisasinya 35.452 Ha, sehingga capaian 101,8 Kategori **Baik Sekali**;
 6. Ketersediaan pangan energi dengan target 2.870 kkap dan realisasinya 2.870 kkap, sehingga capaian 100 Kategori **Baik**;
 7. Ketersediaan pangan protein dengan target 74,72 gr dan realisasinya 74,72 gr, sehingga capaian 100 Kategori **Baik**;
 8. Ketersediaan pangan lemak dengan target 60,35 gr dan realisasinya 60,35 gr, sehingga capaian 100 Kategori **Baik**;
 9. Presentase konsumsi pangan dengan target 75,7% dan realisasinya 75,7%, sehingga capaian 100% Kategori **Baik**.

Beberapa faktor yang berhasil diidentifikasi sebagai penyebab dari belum tercapainya sasaran antara lain :

1. Terbatasnya kapasitas sumber daya petani dan kelompok tani dalam menguasai dan menerapkan teknologi berusaha tani secara modern.
2. Kurangnya modal bagi petani untuk menyediakan sarana produksi yang dibutuhkan
3. Masih terbatasnya aparatur dinas yang berkualifikasi spesialis di bidang pertanian
4. Kurangnya kesadaran petani/keompok tani dalam upaya pemeliharaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian yang telah dibangun
5. Terbatasnya personil, dana, maupun fasilitas pendukung dalam upaya pencegahan dan penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT)

6. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman
7. Kondisi iklim dan cuaca seperti angin kencang dan hujan yang tidak menentu telah banyak merugikan petani. Cenderung bergesernya musim tanam telah membuat petani merubah jadwal tanam dan berpotensi mengorbankan benih yang telah disiapkan. Hal ini telah menguras waktu, tenaga dan biaya dari petani dan pihak dinas dalam upaya mengatasinya.

Strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan pelaksanaan pelatihan/bimtek/magang dan demonstrasi penggunaan teknologi berusaha tani secara baik dan benar
2. Bekerja sama dengan mitra usaha petani/peternak seperti koperasi atau bank yang menyediakan paket-paket kredit usaha untuk menambah modal usaha petani/peternak
3. Memperjuangkan tambahan personil teknis yang berkualitas di bidang pertanian
4. Melaksanakan pelatihan atau bimtek bagi aparatur dinas di bidang pertanian
5. Meningkatkan pemantauan/monitoring dan pembinaan penggunaan prasarana dan sarana bagi petani dan kelompok tani penerima manfaat
6. Memerjuangkan Fasilitas pendukung kegiatan dan biaya operasional dalam memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan dinas
7. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama dengan badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang ada di Kabupaten, Provinsi dan Pusat untuk mendapatkan informasi penting tentang cuaca dan memperjuangkan fasilitas pendukung untuk pencatatan data-data cuaca yang di butuhkan.
8. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan program dan kegiatan pertanian secara berjenjang dan bersinergis dari tingkat petani/kelompok tani demi meningkatkan pembangunan pertanian dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan petani pada khususnya serta umumnya masyarakat Flores Timur.

Tabel 3.31

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 14

No	Program/kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program pengembangan prasarana pertanian	81.902.400	81.459.000	99,46

2	Program pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	279.127.500	274.279.500	98,26
3	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	5.228.209.350	3.026.071.197	57,88
4	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	56.332.900	55.308.608	98,18
Rata-rata		5.645.572.150	3.437.118.305	60,88

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokasi tahun 2022 adalah Rp. 3.437.118.305,- dari target Rp. 5.645.572.150,- atau sebesar 60,88%.

Tabel 3.32

Analisis Pencapaian Sasaran 15
Meningkatkan Volume Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja tahun 2022
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Penguatan Sistem jaringan informasi Perdagangan		1	1	100	2	1	50,0
Rata-rata					100			50,0

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 Indikator Sasaran **Meningkatkan Volume Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah**, 1 indikator sasaran tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 50%, dengan kategori **Kurang** Penguatan Sistem Pemasaran, nilai realisasi capaian diperoleh dari Kegiatan Pengambilan data dan Publikasi Informasi Perdagangan melalui 2 Media yaitu media Cetak Flores Pos dan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.

Adapun hambatan / kendala :

1. Dalam melakukan proses pendataan khusus urusan perdagangan petugas seringkali mengalami kendala dimana pihak pelaku usaha yang keberatan memberikan data yang sebenarnya.
2. Masih terbatasnya sarana mobilitas dan sarana penunjang lainnya.

Tabel 3.33

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 15

No	Program/kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	187.420.000	186.539.600	99,53
Rata-rata		187.420.000	186.539.600	99,53

Realisasi anggaran untuk Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri tahun 2022 melalui pelaksanaan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri adalah Rp. 186.539.600,- dari target Rp. 187.420.000,- atau sebesar 99,53 %.

Misi 4 : Selamatkan Laut Flores Timur

Diukur melalui 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja sasaran dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran diuraikan melalui tabel pengukuran kinerja sasaran dan dengan penjelasan tabel sebagai berikut di bawah ini.

Tabel 3.34

**Analisis Pencapaian Sasaran 16
Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja tahun 2022
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Penanganan <i>Illegal Fishing</i> dan <i>destruktive e-fishing</i>	Kasus	10	10	100	1	0	100,0

2	Kawasan Konservasi Laut dalam Keadaan Baik (Biota Laut)	Jenis	10	10	100	15	9	60,0
Rata-rata					100			80

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 Indikator Sasaran **Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut**, 1 indikator dengan kategori **Baik** dan 1 Indikator dengan kategori **Cukup**. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 80 %, dengan kategori **Baik**.

Adapun kendala yang dihadapi, minimnya pengetahuan masyarakat nelayan terhadap dampak negatif akibat penangkapan ikan secara *destructive fishing* dan *illegal fishing*. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, meningkatkan peran aktif Pokmas Peduli Lingkungan untuk bersama-sama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur dalam upaya menjaga kelestarian sumberdaya laut dan perikanan.

Tabel 3.35

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 16

No	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	109.882.500	109.703.400	99,84
Rata-rata		109.882.500	109.703.400	99,84

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut di tahun 2022 adalah Rp. 109.703.400,- dari target Rp. 109.882.500,- atau sebesar 98,84 %.

Tabel 3.36

Analisis Pencapaian Sasaran 17
Meningkatnya Produksi Perikanan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja tahun 2022
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	15.587	15.864	102	15479	15.786	102,0
2	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	304,6	156	54,2	314	125,8	40,1
3	Jumlah Kelompok Budidaya Perikanan	Kelompok	45	50	111,11	520	38	7,3
Rata-rata					66,82			49,81

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 3 Indikator Kinerja Sasaran **Meningkatnya Produksi Perikanan**, 1 indikator dengan kategori **Baik Sekali** dan 2 indikator dengan kategori **Kurang**. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 49,81%, dengan kategori **Kurang**. Nilai capaian ini diperoleh dari :

1. Indikator Peningkatan produksi perikanan tangkap dengan target 15.479 Ton dan realisasinya 15.786, sehingga capaian 102% Kategori **Baik Sekali**;
2. Peningkatan produksi perikanan budidaya dengan target 314 Ton dan realisasinya 125,85 Ton, sehingga capaian 40,1% Kategori **Kurang**;
3. Jumlah kelompok budidaya perikanan dengan target 520 kelompok dan realisasinya 38 kelompok, sehingga capaian 7,3% Kategori **Kurang**;

permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, membuat kewenangan pengelolaan perairan laut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi berkurang.
2. Terbatasnya sarana prasarana budidaya rumput laut, adanya serangan penyakit dan kondisi cuaca yang ekstrim (badai seroja) mengakibatkan gagal panen dan kerusakan sarana prasarana budidaya, yang mempengaruhi capaian nilai produksi perikanan budidaya.

3. Masih rendahnya daya saing produk olahan, serta penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat pengolah dan pemasar yang belum optimal.
4. Terbatasnya dana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dengan indikator output yang telah direncanakan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat diupayakan langkah – langkah sebagai berikut :

- Meningkatkan ketersediaan dana dan bantuan melalui beberapa sumber pembiayaan antara lain APBD II, APBD I dan APBN.
- Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam upaya melakukan pengawasan pengamanan sumberdaya kelautan dan perikanan di perairan Flores Timur sebagai upaya mencegah tingkat kerusakan lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- Peningkatan kegiatan pembinaan/pendampingan dan fasilitasi rantai dan akses pemasaran pada kelompok binaan
- Peningkatan diversifikasi produk olahan yang higienis, berkualitas dan sesuai permintaan pasar.

Tabel 3.37

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 17

No	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program Perikanan Tangkap	4.387.175.745	4.153.912.815	94,68
2	Program Pengembangan Budidaya Perikanan Tangkap	1.414.348.505	1.376.359.150	97,31
Rata-rata		5.801.524.250	5.530.271.965	95,32

Realisasi anggaran 2022 untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Produksi Perikanan adalah Rp. 5.530.271.965,- dari target Rp. 5.801.524.250,- atau sebesar 99,32 %.

Misi 5 : Reformasi Birokrasi

Diukur melalui 2 sasaran dengan 20 indikator kinerja sasaran dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran diuraikan melalui tabel pengukuran kinerja sasaran dan dengan penjelasan tabel sebagai berikut di bawah ini.

Tabel 3.38

Analisis Pencapaian Sasaran 18
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja tahun 2022
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah OPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan	OPD	7	7	100	7	7	100
2	Jumlah OPD yang memiliki SOP	OPD	3	3	100	4	4	100,0
3	Rasio Penduduk yang Ber KTP per satu penduduk	%	90	95	105,55	1000	13680	1368,0
4	Rasio Pasangan yang Ber Akta Nikah	%	22	22	100	100	52,03	52,0
5	Rasio Penduduk yang Ber Akte Kelahiran	Akte	54	75	138,88	6000	9266	154,4
6	Jumlah Izin yang dilayani tiap tahun	Izin	2400	1281	53,38	2500	3317	132,7
7	Pola Pengembangan Karier ASN daerah	Oran g	206	183	88,83	350	116	33,1
8	Ketersediaan dokumen Perencanaan	Dok	ada	Ada	100	3	3	100,0
9	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada	Ada	100	ada	Ada	ada	100,0
10	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada	Ada	100	ada	Ada	Ada	100,0
11	Penilaian terhadap kinerja pengelola keuangan daerah	WTP	-	-	WTP	WTP	WTP	100,0
12	OPD yang menerapkan Sisten Informasi Keuangan Daerah yang terintegrasi	30	30	100	30	31	31	100,0
13	Desa Sadar Hukum dan Komunitas	100	4,40	4,4	100	20	16	80,0
14	Jumlah Konflik sosial yang terjadi dimasyarakat	2	2	100	2	4	1	25,0
15	Cakupan pelayanan Korban Bencana	100	100	100	100	100	93	93,0
Rata-rata capaian					86,06			175,9

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 15 indikator kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**, terdapat 3 indikator dengan kategori **Baik Sekali**, 9 indikator dengan kategori **Baik** dan 3 indikator dengan kategori **Kurang**. Rata-rata

capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 175,9% kategori **baik**. Nilai capaian ini diperoleh dari :

1. Jumlah OPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan, mencapai target, dimana terdapat 7 OPD pelaksanaan dengan 6 bidang pelayanan antara lain :
 - 1) Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
 - 2) Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
 - 3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 4) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - 5) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 6) Bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial
1. Jumlah OPD yang memiliki SOP, pada tahun 2022 mencapai target, karena melakukan koordinasi dengan baik kepada semua OPD baik melalui surat maupun konsultasi. 4 SOP tersebut antara lain :
 - 1) Perbup No 41 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur.
 - 2) Perbup No 42 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur.
 - 3) Perbup No 43 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur.
 - 4) Perbup No 4 Tahun 2023 tentang SOP UPTD Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez.
2. Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk dengan capaian sebanyak 1368, Rasio pasangan berakta nikah dengan capaian sebanyak 52% dan Rasio penduduk berakte kelahiran dengan capaian sebanyak 154,4%.
3. Jumlah Izin yang dilayani tiap tahun belum mencapai taget yang ditetapkan dengan realisasi 132,7 perizinan. Hal ini menunjukkan semakin menurunnya kesadaran masyarakat yang bergerak di bidang usaha dalam pengurusan ijin.
4. Pola Pengembangan karier ASN Daerah, realisasi di tahun 2021 sebesar 116% dari target 350% dan capaian kinerja 33,1%.

5. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 Tentang RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022.
 6. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2022.
 7. Penilaian terhadap kinerja Pengelolah Keuangan Daerah Tahun 2022 masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sehingga hasil penilaian masih berproses.
 8. OPD yang menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang terintegrasi mencapai target karena tahun 2022 semua OPD sudah menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
 9. Desa Sadar Hukum dan Komunitas memiliki nilai capaiannya 80% dengan target 20 Perdes dan Realisasinya 16 Perdes.
 10. Cakupan Pelayanan Korban Bencana belum mencapai target. Adapun Permasalahan yang terjadi :
 - 1) Belum disediakan dana siap pakai (DSP) yang dipangkukan dalam RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 99 (2), sehingga dalam upaya penanganan darurat kebencanaan sering terlambat hanya karena alasan “birokrasi” keuangan;
 - 2) Adanya wabah covid 19 yang merambah secara menggelobal yang membuat roda pemerintahan serta penghidupan masyarakat hampir lumpuh pada semua lini serta penghidupan masyarakat tidak berjalan normal sebagaimana seperti tahun-tahun sebelumnya.
 - 3) Dana/Penganggaran untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana dalam hal ini Bantuan Stimulan yang diberikan kepada korban bencana dipangkukan dalam Dana Tak Terduga Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur sehingga proses pencairan dana tersebut sampai ke rekening korban harus membutuhkan waktu karena harus melalui beberapa tahapan.
- Sehingga Solusinya antara lain :
- 1) Penanganan darurat bencana untuk sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan akibat bencana yaitu BPBD Kabupaten Flores Timur mengajukan proposal ke BNPB RI terkait kerusakan tersebut untuk mendapatkan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) agar penanganan darurat bencana segera

dilaksanakan untuk mengembalikan kondisi fisik sarana dan prasarana yang rusak.

- 2) Perlunya diterapkan aturan yang baku baik pada lini pemerintahan maupun masyarakat secara umumnya agar kehidupan dalam masa *new normal* semua elemen masyarakat tetap patuh dan taat akan protokol kesehatan yang sudah dicanangkan bersama dan memperhatikan efek yang diterima apabila protokol kesehatan tidak diterapkan.
- 3) Untuk penanganan sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana/pasca bencana, BPBD Kabupaten Flores Timur terus berkoordinasi dengan BNPB RI melalui pengajuan proposal yang dilakukan setiap tahun untuk mendapatkan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk mengembalikan kondisi fisik yang rusak sehingga kehidupan masyarakat di sekitar lokasi akan menjadi nyaman.
- 4) Perlunya disikapi secara cepat dan tepat agar dana hibah yang dipangkukan pada APBD Tahun Anggaran 2020-2021 untuk kegiatan fisik pasca bencana agar segera dilaksanakan tepat waktu guna untuk menjaga normalisasi serta ikatan kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Tabel 3.39

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 18

No	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program fasilitasi pelayanan public dan tata laksana	131.175.000	128.169.320	97,71
2	Program pendaftaran penduduk	440.874.400	436.615.216	99,03
3	Program pencatatan sipil	256.724.400	265.368.400	103,37
4	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	124.728.800	123.130.096	98,72
5	Program pelayanan penanaman modal	70.000.000	70.000.000	100,00
6	Program kepegawaian daerah	1.784.305.200	1.704.052.333	95,50
7	Program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1.774.345.200	1.766.797.840	99,57
8	Program pengelolaan keuangan daerah	1.148.829.140	1.135.502.829	98,84
9	Program pemerintah dan kesejahteraan rakyat Kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	354.568.300	349.156.700	98,47

10	Program penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	304.433.000	303.433.333	99,67
11	Program penanggulangan bencana	792.184.800	789.726.072	99,69
Rata-rata		7.182.168.240	7.071.952.139	98,47

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik adalah Rp 7.071.952.139,- dari target Rp. 7.182.168.240,- atau sebesar 98,47%.

Tabel 3.40

**Analisis Pencapaian Sasaran 19
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja tahun 2022
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Desa Sangat Tertinggal	%	0	0	100	0	0	100,0
2	Desa Tertinggal	%	4,57	10,48	229	24	22	91,7
3	Desa Berkembang	%	31,65	72,49	229	106	109	102,8
4	Desa Maju	%	6,86	15,72	229	36	110	305,6
5	Desa Mandiri	%	0,57	1,31	230	3	8	266,7
Rata-rata					203,4			216,68

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 5 Indikator Kinerja Sasaran **Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif**, 3 indikator dengan kategori **Baik Sekali** dan 2 indikator dengan kategori **Baik**. Rata-rata capaian 216,68 kategori **Baik Sekali**. untuk kategori Desa Mandiri di Tahun 2021 dari 3 desa meningkat menjadi 8 Desa di tahun 2022. Target RENSTRA untuk Tahun 2022 adalah 3 desa hal ini tentu sangat membanggakan kita semua. Sementara Kondisi Desa Tertinggal masih tersisa 2 Desa yaitu Desa Latonliwo II Kecamatan Tanjung Bunda dan Desa Lewotanah Ole Kecamatan Solor Barat. Dengan adanya pendampingan-pendampingan dari semua aspek diharapkan agar di tahun 2023 tahun awal Perencanaan yang baru tidak ada lagi Desa Tertinggal di kabupaten Flores Timur dan semakin banyak desa meningkat statusnya menjadi desa mandiri..

Keberhasilan Pencapaian Kegiatan secara efektif dan efisien disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Perencanaan jumlah anggaran yang memadai dengan rencana tingkat output yang diinginkan.
2. Tersedianya SDM pelaksana yang mempunyai kemampuan baik secara administratif maupun teknis.

Sedangkan penyebab terjadinya penurunan atau kegagalan pencapaian sasaran diantaranya adalah :

1. Terbatasnya dana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dengan indikator output yang telah direncanakan.
2. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah desa dan pelaku - pelaku program/kegiatan
3. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kelompok - kelompok usaha ekonomi produktif di desa/kelurahan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat diupayakan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Penyediaan anggaran yang maksimal setiap tahunnya sesuai indikator output kinerja yang telah ditetapkan agar dapat mencapai target kinerja yang diinginkan dan juga untuk kesinambungan kegiatan pendampingan, evaluasi dan monitoring agar keberhasilan program-program/kegiatan lembaga kemasyarakatan di desa untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan ketahanan lingkungan yang berdampak pada perubahan status Desa.
2. Meningkatkan intensitas kegiatan terutama kegiatan-kegiatan berupa Pendidikan dan Pelatihan bagi pelaku pengelola lembaga pemberdayaan masyarakat (BUMDESa), pelaku wirausaha dan juga peningkatan kapasitas untuk aparatur pemerintah desa

Tabel 3.41

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 19

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi	%
1	Program Penataan Desa	50.000.000	49.958.082	99,99
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	598.957.600	595.544.200	99,81

3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	115.818.600	115.448.600	99,86
Rata-rata		764.776.200	760.950.882	99,50

Realisasi anggaran tahun 2022 untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif, adalah Rp. 760.950.882,- dari target Rp. 764.776.200,- atau sebesar 99,50 %.

3.3 Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kab. Flores Timur

Akuntabilitas keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan aspek keuangan yang digunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMD maupun Indikator Kinerja Utama. Gambaran Realisasi APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.43

Anggaran dan Realisasi APBD Kab. Flores Timur TA. 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	%
4	PENDAPATAN DAERAH	1.105.565.803.666,00	1.091.825.204.969,95	98,76
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	46.040.657.021,00	40.991.361.391,95	89,03
04.01.01	Pajak Daerah	15.968.000.000,00	13.645.899.893,75	85,46
04.01.02	Retribusi Daerah	21.699.010.522,00	19.780.222.232,00	91,16
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.605.530.029,00	2.777.813.291,00	106,61
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.768.116.470,00	4.787.425.975,20	83
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.009.470.121.008,00	1.001.474.745.620,00	99,21
04.02.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANAPERIMBANGAN	805.392.014.356,00	803.391.381.686,00	99,75
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil	10.890.026.979,00	11.383.613.332,00	104,53
4.2.1.2	Dana Alokasi Umum	582.404.485.000,00	582.187.042.950,00	99,96
4.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	212.097.502.377,00	209.820.725.404,00	98,93

04.02.02	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	173.900.119.000,00	173.824.841.800,00	99,96
4.2.2.1	Dana Insentif Daerah	2.713.288.000,00	2.713.288.000,00	100
4.2.2.2	Dana Desa	171.186.831.000,00	171.111.553.800,00	99,96
04.02.03	TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI	30.177.987.652,00	24.258.522.134,00	80,38
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	29.677.987.652,00	23.758.522.134,00	80,05
4.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	500.000.000,00	500.000.000,00	100
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	50.055.025.637,00	49.359.097.958,00	98,61
04.03.01	Pendapatan Hibah	-	-	
04.03.02	Pendapatan Lainnya	50.055.025.637,00	49.359.097.958,00	98,61
5	BELANJA DAERAH	1.141.795.657.659,00	1.072.240.806.885,85	93,91
5,1	BELANJA OPERASI	779.980.327.465,00	724.049.863.304,85	92,83
05.01.01	Belanja Pegawai	461.047.152.451,00	423.830.844.970,00	91,93
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	301.538.958.485,00	283.570.084.105,85	94,04
05.01.04	Belanja Subsidi	95.850.000,00	95.550.000,00	99,69
05.01.05	Belanja Hibah	11.867.216.529,00	11.154.922.529,00	94
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	5.431.150.000,00	5.398.461.700,00	99,4
5,2	BELANJA MODAL	106.301.176.682,00	96.084.026.458,00	90,39
05.02.01	Belanja Modal Tanah	2.846.836.083,00	2.821.836.083,00	99,12
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.479.757.890,00	24.315.339.422,00	88,48
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.684.831.000,00	27.536.070.226,00	92,76
05.02.04	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	44.752.491.209,00	40.107.551.275,00	89,62
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.537.260.500,00	1.303.229.452,00	84,78
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.865.925.152,00	1.724.661.532,00	35,44
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	4.865.925.152,00	1.724.661.532,00	35,44
5,4	BELANJA TRANSFER	250.648.228.360,00	250.382.255.591,00	99,89
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	1.578.000.000,00	1.390.104.431,00	88,09
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	249.070.228.360,00	248.992.151.160,00	99,97

	SURPLUS/(DEFISIT)	-36.229.853.993,00	19.584.398.084,10	-54,06
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40.229.853.993,00	40.202.118.598,09	99,93
06.01.05	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.129.853.993,00	40.144.523.598,09	100,04
6.1.01.06	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100.000.000,00	57.595.000,00	57,6
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100
	PEMBIAYAAN NETTO	36.229.853.993,00	36.202.118.598,09	99,92
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN	-	55.786.516.682,19	

Sumber : Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Flores Timur Tahun 2022 (Sebelum Audit BPK RI)

Secara umum pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp. **1.105.565.803.666,00-** dan mencapai realisasi sebesar Rp. **1.091.825.204.969,95** atau **98,76%**. Capaian realisasi dari 3 komponen utama pembentuk Pendapatan adalah PAD mencapai 89,03%, Pendapatan Transfer dengan Capaian sebesar 99,21% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai 98,61%. Pada Daerah secara total ditargetkan sebesar Rp. **1.141.795.657.659,00-** dan mencapai realisasi sebesar Rp. **1.072.240.806.885,85** atau dengan capaian 93,91%. Belanja Daerah terdiri dari 4 kelompok yakni Belanja Operasi dengan nilai capaian 92,83%, Belanja Modal dengan nilai capaian 90,39%, Belanja Tidak Terduga dengan nilai capaian 35,44% dan Belanja Transfer dengan capaian 99,89%. Belanja Operasi adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial. Secara total Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp. 779.980.327.465,00- dan mencapai realisasi sebesar Rp. 724.049.863.304,85 atau 92,83%. Belanja Modal adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi, Dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Secara total Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 106.301.176.682,00- dan mencapai realisasi sebesar Rp. 96.084.026.458,00- atau 90,39%. Belanja Tidak Terduga terdiri target Rp. 4.865.925.152,00- dan Mencapai realisasi Rp. 1.724.661.532,00- atau 34,55%. Sedangkan Belanja Transfer adalah belanja

yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Bantuan Keuangan. Secara total Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp. 250.648.228.360,00- dan mencapai realisasi sebesar Rp. 250.382.255.591,00- atau 99,89%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 19 sasaran yang mencakup 85 indikator sasaran, bahwa sasaran 1 dengan total capaian 12,7 % sasaran 2 dengan total capaian 100%, sasaran 3 dengan total capaian 100%, sasaran 4 dengan total capaian 118,75%, sasaran 5 dengan total capaian 71,0%, sasaran 6 dengan total capaian 131,2%, sasaran 7 dengan total capaian 108,67%, sasaran 8 dengan total capaian 7,59%, sasaran 9 dengan total capaian 104,41%, sasaran 10 dengan total capaian 1,8%, sasaran 11 dengan total capaian 42%, sasaran 12 dengan total capaian 100%, sasaran 13 dengan total capaian 100%, sasaran 14 dengan total capaian 108,79%, sasaran 15 dengan total capaian 50%, sasaran 16 dengan total capaian 80%, sasaran 17 dengan total capaian 49,81%, sasaran 18 dengan total capaian 281,42%, sasaran 19 dengan total capaian 216,68%.Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai **93,94%** dengan kategori **Baik**. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2022 **Baik**.

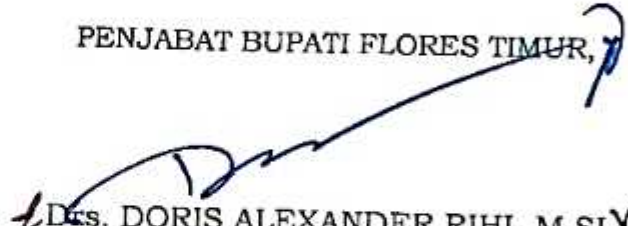
4.2 Saran Tindak Lanjut

Hal-hal yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan melanjutkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, antara lain :

1. Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan, baik dari sisi substansi sasaran dan indikator kinerjanya sehingga dapat berorientasi hasil/ *outcome* dan memberi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
2. Menentukan indikator sasaran yang dapat diukur sehingga keberhasilan kinerja daerah dapat diyakini.

3. Perlu dilaksanakannya bimbingan teknik penyusunan indikator kinerja utama pada setiap OPD, dalam proses penyusunan RENSTRA OPD yang merupakan acuan perencanaan program dan kegiatan OPD sehingga adanya keselarasan disetiap dokumen dan dapat menggambarkan kinerja Daerah sepenuhnya didukung oleh kinerja pada unit dibawahnya serta individu pada jabatan yang ada.
4. Perlu peningkatan pengendalian, evaluasi dan pemantapan koordinasi serta sistem informasi kinerja yang dapat dipublikasikan tentang kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor dan keterlibatan stakeholders untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program dan kegiatan pada semua tingkatan pemerintahan.

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,


Drs. DORIS ALEXANDER RIHI, M.Si

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Ile Lewotolok, No. : - Telp. (0383) 21091 Fx. (0383) 21091
L A R A N T U K A

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Larantuka, 24 Maret 2023

Inspektur Daerah
Kabupaten Flores Timur.

Antonius Lebi Raya, S.Sos., MAP

Pembina Utama Muda

NIP. 19651023 199503 1 002

PENGUKURAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya kemandirian orang muda	1) Jumlah wirausahawan baru	UMKM	19783	2508	12,678	KURANG
2	Meningkatkan kesempatan kerja	2) Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,48	3,48	100	BAIK
3	Meningkatkan karakter orang muda dan wawasan kebangsaan	3) Jumlah konflik sosial antar pemuda	Kasus	4	0	100	BAIK
4	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan	4) Rata Lama Sekolah	Tahun	7,3	7	95,9	BAIK
		5) Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	%	48	70,33	146,5	BAIK SEKALI
		6) Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	99,50	90,07	90,5	BAIK
		7) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	82,33	68,72	83,5	BAIK
		8) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	46	97,34	211,6	BAIK SEKALI
		9) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	103	101,90	98,9	BAIK
		10) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	96,85	92,08	95,1	BAIK
		11) Angka melek huruf	%	0,2	0,48	240	BAIK SEKALI
		12) Angka melanjutkan pendidikan Ke SD	%	100	100	100	BAIK

		13) Angka melanjutkan pendidikan Ke SMP	%	98,50	100	101,5	BAIK SEKALI
		14) Angka kelulusan (AL) SD /MI	%	99,99	100	100	BAIK
		15) Angka kelulusan (AL) SMP /MTs	%	99,28	100	100,7	BAIK SEKALI
		16) Guru yang memenuhi kualifikasi S1	%	100	82,96	82,96	BAIK
		17) Persentase sarana prasarana pendidikan SD dalam kondisi baik	%	42	27,55	65,6	CUKUP
		18) Persentase sarana prasarana pendidikan SMP dalam kondisi baik	%	26	43,82	168,5	BAIK SEKALI
5	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	19) Usia Harapan Hidup	Tahun	65,12	65,4	100,4	BAIK
		20) Angka Kematian Bayi	%	16/1000	12,37/1000	122,69	BAIK S
		21) Angka kematian Ibu (Per 100.000 KH)	%	102/100.000	227/100.000	22,55	KURANG
		22) Angka gizi buruk	%	0,10	0,6	60	CUKUP
		23) Cakupan pelayanan anak usia pendidikan dasar	%	100	35	35	KURANG
		24) Cakupan pelayanan usia produktif	%	100	40	40	KURANG
		25) Cakupan penanganan kasus penyakit menular	%	9850	8357,725	84,85	BAIK
		26) Cakupan penanganan kasus penyakit tidak menular	%	100	84,85	84,85	BAIK

		27) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	%	100	99,8	99,8	BAIK
		28) Penemuan penderita baru penyakit TB - BTA+	%	100	29,31	29,3	KURANG
		29) Cakupan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100,0	BAIK
		30) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	80	58	72,5	CUKUP
		31) Cakupan peserta KB aktif	%	68	38,2	56,2	CUKUP
		32) Cakupan pelayanan KB keluarga miskin	%	89	76	85,4	BAIK
6	Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	33) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani	%	6,77	53,3	131,2	BAIK SEKALI
7	Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	34) Partisipasi perempuan pada jabatan public	%	43	55	129,4	BAIK SEKALI
		35) Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	65	62,8	96,6	BAIK
		36) Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	%	20	20	100,0	BAIK
8	Meningkatnya kinerja transportasi	37) Prasarana transportasi dalam kondisi baik	Unit/ %	103,25	31	30	KURANG

		38) Pengujian Angkutan umum laik jalan	Kali	609	0	0	KURANG
		39) Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan	Unit	400	0	0	KURANG
		40) Dokumen/ Rasio izin trayek	Dok	35	0,1	0,3	KURANG
9	Pemenuhan kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya	41) Rasio jaringan irigasi	Paket	1	1	100	BAIK
		42) Akses air minum aman (SPAM = jaringan perpipaan)	SR	1873	1372	73,3	CUKUP
		43) Presentase mata air yang dikonservasi	Mata air	5	7	140	BAIK SEKALI
10	Mengurangi resiko akibat bencana	44) Persentase pengendalian banjir dan pengamanan pantai yang dibangun	M ¹	4500	79,5	1,8	KURANG
11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	45) Usaha wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen izin lingkungan	Jenis Usaha	50	21	42,0	KURANG
12	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman	46) Rumah tidak layak huni	Unit	66	66	100	BAIK
		47) Persentase Sampah perkotaan yang ditangani	%	12	12	100	BAIK
13	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	48) Jumlah dokumen perencanaan	Dok	3	3	100	BAIK

		49) Cakupan pengendalian dan pemanfaatan ruang	%	100	100	100	BAIK
		50) Pemenuhan penyediaan RTH dikawasan perkotaan	Lokasi	2	2	100	BAIK
14	Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi local	51) Tanaman perkebunan Jambu Mente	Ton	3507	13529	192,9	BAIK SEKALI
		52) Tanaman perkebunan Kelapa	Ton	6034	10672,21	176,9	BAIK SEKALI
		53) Tanaman Perkebunan Kakao	Ton	4593	2365,63	51,5	KURANG
		54) Meningkatnya produksi pertanian					
		▪ Benih jagung komposit	Kg	40	40	100	BAIK
		▪ Benih padi sawah	Kg	40	40	100	BAIK
		▪ Pupuk NPK	Kg	300	300	100	BAIK
		▪ Pupuk urea	Kg	250	250	100	BAIK
		▪ Kantong plastik pengemas benih	Kg	5	5	100	BAIK
		▪ Karung plastik pengepak benih	Buah	50	50	100	BAIK
		55) Luas lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman perkebunan	Ha	34809,420	35451,91	101,8	BAIK SEKALI
		56) Ketersediaan pangan energi	lkap	2870	2.870	100	BAIK
		57) Ketersediaan Pangan Protein	gr	74,72	74,72	100	BAIK
		58) Ketersediaan Pangan Lemak	gr	60,35	60,35	100	BAIK
		59) Persentasi Konsumsi Pangan	%	75,7	75,7	100	BAIK

15	Meningkatnya volume perdagangan komoditas unggulan daerah	60) Penguatan sistem jaringan informasi perdagangan	kali	2	1	50	KURANG
16	Meningkatnya kelestarian sumberdaya hayati laut	61) Penanganan <i>illegal fishing</i> dan <i>destructive fishing</i>	Kasus	1	0	100	BAIK
		62) Kawasan konservasi laut dalam keadaan baik (Biota Laut)	Jenis	15	9	60	CUKUP
17	Meningkatnya produksi perikanan	63) Peningkatan produksi perikanan tangkap	Ton	15479	15.786	102	BAIK SEKALI
		64) Peningkatan produksi perikanan budidaya	Ton	313,5	125,845	40,1	KURANG
		65) Jumlah kelompok budidaya perikanan	kelompok	520	38	7,3	KURANG
18	Meningkatnya kualitas pelayanan public	66) Jumlah OPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan	OPD	7	7	100	BAIK
		67) Jumlah OPD yang memiliki SOP	OPD	4	4	100	BAIK
		68) Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	1000	13680	136,8	BAIK SEKALI
		69) Rasio pasangan berakta nikah	%	100	52,03	52,0	KURANG
		70) Rasio penduduk berakte kelahiran	%	6000	9266	154,4	BAIK SEKALI
		71) Jumlah izin yang dilayani tiap tahun	Izin	2500	3317	132,7	BAIK SEKALI
		72) Pola pengembangan karier ASN daerah	Orang	350	116	33,1	KURANG

		73) Ketersediaan dokumen perencanaan	Dok	3	3	100	BAIK
		74) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda	Dok	Ada	ada	100	BAIK
		75) Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Dok	Ada	Ada	100	BAIK
		76) Penilaian terhadap kinerja pengelola keuangan daerah	Opini	WTP	-	100	BAIK
		77) OPD yang menerapkan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi	OPD	31	31	100	BAIK
		78) Desa sadar hukum dan komunitas	perdes	20	16	80	BAIK
		79) Jumlah Konflik sosial yang terjadi dimasyarakat	Kasus	4	1	25	KURANG
		80) Cakupan pelayanan korban bencana	%	100	93	93	BAIK
19	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif	81) Desa sangat tertinggal	%	0	0	100	BAIK
		82) Desa tertinggal	%	24	22	91,7	BAIK
		83) Desa berkembang	%	106	109	102,8	BAIK SEKALI

		84) Desa maju	%	36	110	305,6	BAIK SEKALI
		85) Desa mandiri	%	3	8	266,7	BAIK SEKALI
TOTAL						93,94	BAIK

Larantuka, Maret 2023

BUPATI FLORES TIMUR,


Drs. DORIS ALEXANDER RIHI, M.SI



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KABUPATEN FLORES TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON, ST
Jabatan : BUPATI FLORES TIMUR

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Larantuka, Maret 2022

BUPATI FLORES TIMUR,

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON, ST

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kabupaten Flores Timur

LAMPIRAN :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KABUPATEN FLORES TIMUR**

NO	SABARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
Misi 1 Selamatkan Orang Muda Flores Timur				
1.	Meningkatnya Kemandirian Orang Muda	1 Jumlah Wirausahawan Baru	Wirausaha	150,00
2.	Meningkatkan kesempatan kerja	2 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,15
3.	Meningkatkan karakter orang muda dan wawasan kebangsaan	3 Jumlah konflik sosial antar pemuda	Kasus	-
4.	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan	4 Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,30
		5 Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	53,00
		6 Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	91,02
		7 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	71,62
		8 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	48,00
		9 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	105,00
		10 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	99,00
		11 Angka melek huruf	%	99,32
		12 Angka melanjutkan pendidikan Ke SD	%	100,00
		13 * Angka melanjutkan pendidikan Ke SMP	%	98,50
		14 Angka kelulusan (AL) SD / MI	%	99,99
		15 Angka kelulusan (AL) SMP / MTs	%	99,28
		16 Guru yang memenuhi kualifikasi S1	%	39,00
		17 Persentase sarana prasarana pendidikan SD dalam kondisi baik	%	42,00
		18 Persentase sarana prasarana pendidikan SMP dalam kondisi baik	%	26,00
5.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	19 Usia Harapan Hidup	Tahun	67,00
		20 Angka Kematian Bayi (AKB)	%	16/1.000
		21 Angka kematian Ibu (AKI)	%	102/100.000
		22 Angka ga bunak	%	0,10
		23 Cakupan pelayanan anak usia	%	100,00
		24 Cakupan pelayanan usia produktif	%	36,00
		25 Cakupan penanganan kasus penyakit menular (HIV yang di obati)	%	94,00
		26 Cakupan penanganan kasus penyakit tidak menular (Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi)	%	100,00
		27 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	%	100,00
		28 Penemuan penderita baru penyakit TB - BTA+	%	100,00
		29 Cakupan penanganan penderita penyakit DBD	%	100,00
		30 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien Masyarakat Miskin	%	80,00
		31 Cakupan peserta KB aktif	%	70,00
		32 Cakupan pelayanan KB keluarga miskin	%	76,00
6.	Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	33 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani	%	63,04

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kabupaten Flores Timur

7.	Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	34	Partisipasi perempuan pada jabatan politik	%	45,72
		35	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	97,00
		36	Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	%	20,00
Misi 2 Selamatkan Infrastruktur Flores Timur					
8.	Meningkatnya kinerja transportasi	37	Prasarana transportasi dalam kondisi baik	Lokasi	5,00
		38	Pengujian Angkutan umum laik jalan	Kali	609,00
		39	Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan	Unit	400,00
		40	Dokumen izin trayek	Kali	6,00
		41	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal	Unit	2,00
		42	Pengendalian dan Pengawasan jaringan lalu lintas penyebrangan	Kali	12,00
9.	Pemenuhan kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas ekonomi, social dan budaya	43	Daerah mata air yang dikonservasi	mata air	5,00
10.	Mengurangi resiko akibat bencana	44	Pembangunan Talud pengaman pantai	m	1.875,00
11.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	45	Jumlah Usaha yang memiliki dokumen izin (AMDAL,UKL-UPL dan SPPL)	Jenis	100,00
12.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman	46	Rumah tidak layak huni	Rumah	46,00
		47	Tersedianya sarana pengolahan limbah domestik	Desa/Unit	15 (550)
		48	Akses air minum aman	Desa/SR	12 (1873)
		49	Persentase Sampah perkotaan yang ditangani	%	100,00
		50	Terbangunnya saluran drainase	m'	1.200,00
13.	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	51	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	3,00
		52	Cakupan pengendalian dan pemanfaatan ruang	%	100,00
		53	Pemenuhan penyediaan RTH dikawasan perkotaan	Lokasi	2,00
Misi 3 Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur					
14.	Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal	54	Produksi pertanian tanaman pangan padi	Kg	40,00
		55	Produksi pertanian tanaman pangan jagung	Kg	40,00
		56	Tanaman Holtikultura bibit porang	kg	56,00
		57	Tanaman Holtikultura benih jagung komposit label ungu	Kg	1.710,00
		58	Tanaman perkebunan Kopi	Anakan	300,00
		59	Luas lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman perkebunan	Ha	100,00
		60	Ketersediaan pangan Energi	kcal/kap/hr	3.243,00
		61	Ketersediaan Pangan Protein	gr/kap/hr	85,41
		62	Ketersediaan Pangan Lemak	gr/kap/hr	65,54
		63	Persentasi Konsumsi Pangan	%	80,60

15.	Meningkatnya volume perdagangan komoditas unggulan daerah	64	Penguatan sistem pemasaran	Kecamatan	19,00
Misi 4 Selamatkan Laut Flores Timur					
16.	Meningkatnya kelestarian sumber daya hayati laut	65	Penurunan kasus ilegal fishing dan destructive fishing	kasus	10,00
		66	Jenis biota laut yang dilindungi	Jenis	10,00
		67	Jumlah Pokmaswas	Pokmaswas	25,00
		68	jumlah sarana dan prasarana pengawasan	unit kendaraan roda 2	2,00
17.	Meningkatnya produksi perikanan	69	Jumlah sarana dan prasarana penangkapan	Jenis	12,00
		70	Jumlah produksi tangkapan	ton	15.453,00
		71	Jumlah jenis ikan unggul dan non ikan	Jenis	2 / 1 non ikan
		72	Jumlah produksi budidaya (ikan dan non ikan)	ton	301,60
18.	Menguatnya kelembagaan kelompok usaha perikanan	73	Jumlah pembakul ikan	kelompok	510,00
		74	Jumlah pemasar dan pengepul ikan	kelompok	50,00
		75	Jumlah kelompok pengolah ikan	kelompok	45,00
		76	Jumlah kelompok perikanan budidaya	kelompok	40,00
		77	- Jumlah kelompok perikanan tangkap	kelompok	120,00
Misi 5 Reformasi Birokrasi					
18.	Meningkatnya kualitas pelayanan public	78	Jumlah OPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan	OPD	7,00
		79	Jumlah OPD yang memiliki SOP	OPD	4,00
		80	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	91,00
		81	Rasio pasangan berakta nikah	%	23,00
		82	Rasio penduduk berakte kelahiran	%	52,00
		83	Jumlah izin yang dilayani tiap tahun	Izin	2.500,00
		84	Pola pengembangan karier ASN daerah	Orang	300,00
		85	Ketersediaan dokumen perencanaan	Dokumen	Ada
		86	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan	Dokumen	Ada
		87	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah di tetapkan dengan Perda	Dokumen	Ada
		88	Penilaian terhadap kinerja pengelola keuangan daerah	Opini	WTP
		89	OPD yang menerapkan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi	%	100,00
		90	Desa Sadar Hukum dan Komunitas	Perdes	20,00
		91	Jumlah Konflik sosial yang terjadi dimasyarakat	Kasus	-
		92	Jumlah Kasus Kriminal di Masyarakat	Kasus	-
		93	Cakupan pelayanan korban bencana	%	100,00
		94	Konsolidasi Demokrasi dan Kapasitas Organisasi Politik serta Kemasyarakatan	Kecamatan	-
		95	Pemberdayaan Forum Kemitraan Pemerintah	Orang	150,00
		96	Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan Politik	%	-
19.	Meningkatkan penyelenggaraan	97	Desa sangat tertinggal	%	0,00

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kabupaten Flores Timur

pemerintahan yang bersih dan efektif

98	Desa tertinggal	%	10,48
99	Desa berkembang	%	72,49
100	Desa maju	%	15,72
101	Desa mandiri	%	1,31

10	Sasaran 10 : Mengurangi Resiko Akibat Bencana		
1)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	359.999.600,00	APBD
11	Sasaran 11 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		
1)	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	105.039.800,00	DAU
2)	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20.000.000,00	DAU
12	Sasaran 12 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman		
1)	Program Kawasan Permukiman	17.013.070.900,00	APBD
2)	Program Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	370.000.000,00	APBD
3)	Program Pengembangan Sistem dan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional	665.001.400,00	DAU
4)	Program Pengelolaan Persampahan	939.997.585,00	DAU
13	Sasaran 13 : Terwujudnya Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota		
1)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.283.905.200,00	APBD
2)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	30.000.000,00	APBD
3)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	494.959.470,00	DAU
Misi 3 Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur			
14	Sasaran 14 : Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal		
1)	Program Penyuluh Pertanian	513.229.500,00	APBD
2)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	199.122.500,00	APBD
3)	Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana	5.547.971.750,00	APBD
4)	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian (Dinas Perkebunan dan Peternakan)	843.000.000,00	APBD
5)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Dinas Perkebunan dan Peternakan)	35.000.000,00	APBD
15	Sasaran 15 : Meningkatnya Volume Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah		
1)	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	20.000.000,00	APBD
16	Sasaran 16 : Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut		
1)	Program Pengawasan Sumber Daya Laut Perikanan	79.997.500,00	DAU
17	Sasaran 17 : Meningkatnya Produksi Perikanan		
1)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.284.603.750,00	DAU
2)	Program Pengelolaan Budidaya Perikanan	2.014.347.800,00	DAU

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Misi 1 Selamatkan Orang Muda Flores Timur			
1	Sasaran 1 : Meningkatkan Kemandirian Orang Muda		
1)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	24.999.900,00	APBD
2	Sasaran 2 : Meningkatkan kesempatan kerja		
1)	Program Penempatan Tenaga Kerja	334.999.400,00	APBD
2)	Program Hubungan Industrial	74.999.900,00	APBD
3)	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	49.997.000,00	APBD
3	Sasaran 3 : Meningkatkan Karakter Orang Muda dan Wawasan Kebangsaan		
1)	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	224.999.800,00	APBD
2)	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	199.994.800,00	APBD
3)	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	502.316.529,00	APBD
4	Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan		
1)	Program Pengelolaan Pendidikan	66.775.854.114,00	APBD
2)	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	135.000.000,00	PKO
5	Sasaran 5 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		
1)	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	25.000.000,00	APBD
2)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	23.415.048.655,00	APBD
3)	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	20.000.000,00	APBD
6	Sasaran 6 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		
1)	Program Pemberdayaan Sosial	2.613.000.000,00	APBD
2)	Program Rehabilitasi Sosial	231.999.800,00	APBD
3)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	110.000.000,00	APBD
7	Sasaran 7 : Meningkatkan Peran Perempuan, Anak Serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak		
1)	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	20.000.000,00	APBD
2)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	85.000.000,00	APBD
3)	Program Perlindungan Perempuan	30.000.000,00	APBD
4)	Program Pemenuhan Hak Anak	25.000.000,00	APBD
Misi 2 Selamatkan Infrastruktur Flores Timur			
8	Sasaran 8 : Meningkatkan Kinerja Transportasi		
1)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.969.756.000,00	APBD
2)	Program Pengelolaan Penyebrangan	7.444.186.012,00	APBD
9	Sasaran 9 : Meningkatkan Pemenuhan Air Baku Untuk Mendukung Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya		
1)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.548.329.951,00	APBD
2)	Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan	764.999.800,00	DAU

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kabupaten Flores Timur

10 <i>Babakron 10 : Meningkatkan Kualitas Aktivitas Ekonomi</i>		
1)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	359.999.600,00 APBD
11 <i>Babakron 11 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup</i>		
1)	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Iain Lingkungan dan Iain Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PTLIP)	105.039.800,00 DAU
2)	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20.000.000,00 DAU
12 <i>Babakron 12 : Meningkatkan Kualitas dan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Perumahan</i>		
1)	Program Kawasan Perumahan	17.013.070.900,00 APBD
2)	Program Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	370.000.000,00 APBD
3)	Program Pengembangan Sistem dan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional	665.001.400,00 DAU
4)	Program Pengelolaan Persampahan	939.997.585,00 DAU
13 <i>Babakron 13 : Terwujudnya Perencanaan Pemukiman dan Pengendalian Tata Ruang Kota</i>		
1)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.283.905.200,00 APBD
2)	Program Penyelenggaraan Pemetaan Ruang	30.000.000,00 APBD
3)	Program Pengelolaan Kelembagaan Hayati (KEHATI)	494.959.470,00 DAU
Misi 3 : Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur		
14 <i>Babakron 14 : Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal</i>		
1)	Program Penyuluh Pertanian	313.229.500,00 APBD
2)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	199.122.500,00 APBD
3)	Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana	5.547.971.750,00 APBD
4)	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian (Dinas Perkebunan dan Peternakari)	843.000.000,00 APBD
5)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Dinas Perkebunan dan Peternakari)	35.000.000,00 APBD
15 <i>Babakron 15 : Meningkatkan Volume Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah</i>		
1)	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	20.000.000,00 APBD
16 <i>Babakron 16 : Meningkatkan Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut</i>		
1)	Program Pengawasan Sumber Daya Laut Perikanan	79.997.500,00 DAU
17 <i>Babakron 17 : Meningkatkan Produk Perikanan</i>		
1)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.284.603.750,00 DAU
2)	Program Pengelolaan Budidaya Perikanan	2.014.347.800,00 DAU

IKAN			
18	Sasaran 18 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		
1)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	120.000.000,00	DAU
2)	Program Pendaftaran Penduduk	249.999.900,00	APBD II
3)	Program Pencatatan Sipil	249.999.800,00	APBD II
4)	Program Pelayanan Penanaman Modal	70.000.000,00	APBD
5)	Program Kepegawaian Daerah	374.849.500,00	APBD
6)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	262.873.846.860,00	APBD
7)	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	200.000.000,00	APBD
8)	Program Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	258.046.800,00	APBD
9)	Program Penanggulangan Bencana	592.100.000,00	APBD
10)	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	502.316.529,00	APBD
11)	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	49.999.800,00	APBD
19	Sasaran 19 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Efektif		
1)	Program Penataan Desa	50.000.000,00	APBD

Larantuka, Maret 2022

BUPATI FLORES TIMUR,

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON, ST

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Flores Timur memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Salah satu kewajiban tersebut adalah Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) setiap tahun sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dapat memberikan gambaran tentang rencana kinerja yang hendak dilaksanakan dalam satu anggaran yang merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Gambaran tentang Rencana Kinerja Tahunan dimaksud agar semua stakeholders dapat mengetahui komitmen Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan tahapan pelaksanaan perencanaan yang telah tertuang dalam Dokumen RPD untuk diwujudkan setiap tahun.

Pencapaian Tujuan dan Sasaran dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan guna menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi di daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini adalah sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Rencana Kinerja yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Adapun Tujuan dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini adalah :

- a. Untuk menyajikan informasi tentang Rencana Kinerja Tahunan sesuai Dokumen Rencana Pembangunan Daerah kepada semua Stakeholders khususnya kepada Pemerintah Daerah.
- b. Untuk melaksanakan Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Flores Timur memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Salah satu kewajiban tersebut adalah Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) setiap tahun sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dapat memberikan gambaran tentang rencana kinerja yang hendak dilaksanakan dalam satu anggaran yang merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Gambaran tentang Rencana Kinerja Tahunan dimaksud agar semua stakeholders dapat mengetahui komitmen Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan tahapan pelaksanaan perencanaan yang telah tertuang dalam Dokumen RPD untuk diwujudkan setiap tahun.

Pencapaian Tujuan dan Sasaran dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan guna menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi di daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini adalah sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Rencana Kinerja yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Adapun Tujuan dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini adalah :

- a. Untuk menyajikan informasi tentang Rencana Kinerja Tahunan sesuai Dokumen Rencana Pembangunan Daerah kepada semua Stakeholders khususnya kepada Pemerintah Daerah.
- b. Untuk melaksanakan Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3.1 Kedudukan

Kedudukan Pemerintah Kabupaten Flores Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai Daerah Otonom, yakni Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.3.2 Tugas Pokok Dan Fungsi

Untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sebagai penjabaran lebih lanjut atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya yang mengatur tentang kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur terdiri dari :

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar :

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

1.3.1 Kedudukan

Kedudukan Pemerintah Kabupaten Flores Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai Daerah Otonom, yakni Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.3.2 Tugas Pokok Dan Fungsi

Untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sebagai penjabaran lebih lanjut atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya yang mengatur tentang kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur terdiri dari :

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar :

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Urusan Pemerintahan pilihan, meliputi :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Selanjutnya berbagai kewenangan tersebut dijabarkan menjadi tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, dalam rangka mewujudkan upaya mencerdaskan, mensejahterakan dan melindungi masyarakat kabupaten melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat secara profesional, akuntabel, transparan dan partisipatif.

- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Urusan Pemerintahan pilihan, meliputi :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Selanjutnya berbagai kewenangan tersebut dijabarkan menjadi tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, dalam rangka mewujudkan upaya mencerdaskan, mensejahterakan dan melindungi masyarakat kabupaten melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat secara profesional, akuntabel, transparan dan partisipatif.

1.3.3 Struktur Organisasi

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur telah mengalami perubahan, seiring adanya kebijakan politik, untuk melakukan penataan birokrasi termaksud didalamnya, penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Flores Timur, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Adapun Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dimaksud sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan unsur staf yang diwadahi dalam Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pelayanan administrasi dan memberi dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang diwadahi dalam Sekretariat DPRD Tipe C;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwadahi dalam Inspektorat Daerah Tipe A;
4. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana yang diwadahi dalam dinas- dinas daerah, terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan serta urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
 - c. Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - d. Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 - e. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

1.3.3 Struktur Organisasi

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur telah mengalami perubahan, seiring adanya kebijakan politik, untuk melakukan penataan birokrasi termaksud didalamnya, penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Flores Timur, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Adapun Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dimaksud sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan unsur staf yang diwadahi dalam Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pelayanan administrasi dan memberi dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang diwadahi dalam Sekretariat DPRD Tipe C;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwadahi dalam Inspektorat Daerah Tipe A;
4. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana yang diwadahi dalam dinas- dinas daerah, terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan serta urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
 - c. Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - d. Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 - e. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta sub urusan Kebakaran;
- i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- k. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- l. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
- m. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
- n. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
- o. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- f Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta sub urusan Kebakaran;
- i Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- k Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- l Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
- m Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
- n Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
- o Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur

- Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- p Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 - q Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 - r Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Pangan;
 - s Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Perkebunan dan Peternakan;
 - t Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan sub urusan Perikanan;dan
 - u Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan.
5. Badan Daerah merupakan unsur penunjang yang diwadahi dalam badan-badan daerah, terdiri dari:
- a Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan Pembangunan, serta fungsi penunjang urusan Penelitian dan Pengembangan;
 - b Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Keuangan, sub urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - c Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Keuangan, sub urusan Pendapatan;dan
 - d Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- p Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 - q Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 - r Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Pangan;
 - s Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Perkebunan dan Peternakan;
 - t Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan sub urusan Perikanan;dan
 - u Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan.
5. Badan Daerah merupakan unsur penunjang yang diwadahi dalam badan-badan daerah, terdiri dari:
- a Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan Pembangunan, serta fungsi penunjang urusan Penelitian dan Pengembangan;
 - b Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Keuangan, sub urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - c Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Keuangan, sub urusan Pendapatan;dan
 - d Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

6. Kecamatan, terdiri dari:
- a Kecamatan Larantuka dengan Tipe A;
 - b Kecamatan Adonara Timur dengan Tipe A;
 - c Kecamatan Adonara Barat dengan Tipe A;
 - d Kecamatan Adonara dengan Tipe A;
 - e Kecamatan Adonara Tengah dengan Tipe A;
 - f Kecamatan Kelubagolit dengan Tipe A;
 - g Kecamatan Witihamo dengan Tipe A;
 - h Kecamatan Ile Boleng dengan Tipe A;
 - i Kecamatan Wotan Ulumado dengan Tipe A;
 - j Kecamatan Tanjung Bunga dengan Tipe A;
 - k Kecamatan Wulanggitang dengan Tipe A;
 - l Kecamatan Titehena dengan Tipe A;
 - m Kecamatan Lewolema dengan Tipe A;
 - n Kecamatan Ile Mandiri dengan Tipe A;
 - o Kecamatan Ile Bura dengan Tipe A;
 - p Kecamatan Demon Pagong dengan Tipe A;
 - q Kecamatan Solor Timur dengan Tipe A;
 - r Kecamatan Solor Barat dengan Tipe A; dan
 - s Kecamatan Solor Selatan dengan Tipe A.

1.4

Permasalahan Daerah

Berdasarkan gambaran umum daerah dan hasil evaluasi kinerja Pembangunan Daerah, maka teridentifikasi berbagai permasalahan yang menjadi perhatian di tahun 2023 sebagai berikut:

1.4.1 Permasalahan Terkait Program Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan kajian terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta RPJPD tahun 2005-2025 yang disajikan dalam gambaran umum kondisi daerah. Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah tersebut maka dirumuskan beberapa permasalahan Pembangunan Daerah, sebagai berikut:

- 1) Rendahnya daya saing daerah khususnya di bidang ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur;

6. Kecamatan, terdiri dari:
- a Kecamatan Larantuka dengan Tipe A;
 - b Kecamatan Adonara Timur dengan Tipe A;
 - c Kecamatan Adonara Barat dengan Tipe A;
 - d Kecamatan Adonara dengan Tipe A;
 - e Kecamatan Adonara Tengah dengan Tipe A;
 - f Kecamatan Kelubagolit dengan Tipe A;
 - g Kecamatan Witihamo dengan Tipe A;
 - h Kecamatan Ile Boleng dengan Tipe A;
 - i Kecamatan Wotan Ulumado dengan Tipe A;
 - j Kecamatan Tanjung Bunga dengan Tipe A;
 - k Kecamatan Wulanggitang dengan Tipe A;
 - l Kecamatan Titehena dengan Tipe A;
 - m Kecamatan Lewolema dengan Tipe A;
 - n Kecamatan Ile Mandiri dengan Tipe A;
 - o Kecamatan Ile Bura dengan Tipe A;
 - p Kecamatan Demon Pagong dengan Tipe A;
 - q Kecamatan Solor Timur dengan Tipe A;
 - r Kecamatan Solor Barat dengan Tipe A; dan
 - s Kecamatan Solor Selatan dengan Tipe A.

1.4

Permasalahan Daerah

Berdasarkan gambaran umum daerah dan hasil evaluasi kinerja Pembangunan Daerah, maka teridentifikasi berbagai permasalahan yang menjadi perhatian di tahun 2023 sebagai berikut:

1.4.1 Permasalahan Terkait Program Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan kajian terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta RPJPD tahun 2005-2025 yang disajikan dalam gambaran umum kondisi daerah. Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah tersebut maka dirumuskan beberapa permasalahan Pembangunan Daerah, sebagai berikut:

- 1) Rendahnya daya saing daerah khususnya di bidang ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur;

- 2) Kemiskinan, stunting dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat semakin lebar;
- 3) Menurunnya kualitas lingkungan hidup;
- 4) Menurunnya kualitas layanan pendidikan masyarakat;
- 5) Menurunnya kualitas layanan kesehatan masyarakat;
- 6) Rendahnya derajat kesehatan masyarakat;
- 7) Rendahnya kesejahteraan sosial masyarakat;
- 8) Pengaruh utama gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum maksimal;
- 9) Menurunnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dan;
- 10) Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik belum maksimal.

1.4.2 Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

A. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- Layanan pendidikan belum berjalan sesuai harapan. Hal ini ditandai dengan rendahnya angka partisipasi sekolah;
- Jumlah dan kualitas sarana prasarana pendidikan masih kurang dan belum memenuhi standar serta belum memadai kebutuhan tumbuh kembang anak. Selain itu fasilitas penunjang pendidikan termasuk pengembangan laboratorium dan perpustakaan sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai;
- Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan pengembangan wajib belajar 12 tahun terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum berjalan sesuai harapan;
- Kompetensi dan jumlah tenaga pendidik kurang memadai
- Masih rendahnya aksesibilitas Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan masyarakat, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi serta sumber daya pendukung.

2. Kesehatan

- Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) hamil dan melahirkan relatif tinggi, serta adanya kecenderungan meningkatnya kejadian kehamilan remaja di bawah usia 20 tahun;

- 2) Kemiskinan, stunting dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat semakin lebar;
- 3) Menurunnya kualitas lingkungan hidup;
- 4) Menurunnya kualitas layanan pendidikan masyarakat;
- 5) Menurunnya kualitas layanan kesehatan masyarakat;
- 6) Rendahnya derajat kesehatan masyarakat;
- 7) Rendahnya kesejahteraan sosial masyarakat;
- 8) Pengaruh utama gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum maksimal;
- 9) Menurunnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dan;
- 10) Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik belum maksimal.

1.4.2 Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

A. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- Layanan pendidikan belum berjalan sesuai harapan. Hal ini ditandai dengan rendahnya angka partisipasi sekolah;
- Jumlah dan kualitas sarana prasarana pendidikan masih kurang dan belum memenuhi standar serta belum memadai kebutuhan tumbuh kembang anak. Selain itu fasilitas penunjang pendidikan termasuk pengembangan laboratorium dan perpustakaan sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai;
- Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan pengembangan wajib belajar 12 tahun terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum berjalan sesuai harapan;
- Kompetensi dan jumlah tenaga pendidik kurang memadai
- Masih rendahnya aksesibilitas Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan masyarakat, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi serta sumber daya pendukung.

2. Kesehatan

- Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) hamil dan melahirkan relatif tinggi, serta adanya kecenderungan meningkatnya kejadian kehamilan remaja di bawah usia 20 tahun;

- Kerawanan gizi yang ditunjukkan dengan masih banyaknya ibu hamil mengalami kondisi kurang energi kronis, masih terdapat bayi dan balita dalam keadaan gizi buruk dan kurang gizi;
- Belum optimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya;
- Masih rendahnya kualitas tenaga kesehatan, serta masih terbatasnya kuantitas tenaga kesehatan dengan basis ilmu tertentu seperti gizi, kesehatan lingkungan dan manajemen kesehatan;
- Pandemi Covid-19 masih mewabah serta adanya penyakit *endemik* yang berjangkit dan sulit dikendalikan karena pengaruh perubahan cuaca seperti infeksi saluran pernapasan akut, demam berdarah, penyakit infeksi khronis seperti TBC, HIV dan malaria.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur memegang peranan penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pembanguana terus dilaksanakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Namun demikian, upaya-upaya itu belum mampu menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan infrastruktur daerah.

Infrastruktur belum mampu memberi dukungan maksimal terhadap upaya menciptakan transportasi yang aman, efisien dan efektif.

Permasalahan transportasi darat adalah tingginya tingkat kerusakan jalan akibat longsir dan banjir, rendahnya akses jalan menuju kantong-kantong produksi serta minimnya ketersedianya sarana transportasi darat untuk daerah pedalaman. Sementara itu permasalahan transportasi laut adalah belum memadainya kualitas sarana dan daya tampung ruang kota. Sedangkan permasalahan transportasi udara adalah panjang landasan yang tidak memungkinkan untuk didarati jenis pesawat terbang berukuran besar. Berbagai permasalahan transportasi di atas memberikan dampak terhadap mahalnya biaya dan tidak efektifnya transportasi.

Daya dukung sumber air baku untuk mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat belum optimal. Saluran irigasi belum mampu

- Kerawanan gizi yang ditunjukkan dengan masih banyaknya ibu hamil mengalami kondisi kurang energi kronis, masih terdapat bayi dan balita dalam keadaan gizi buruk dan kurang gizi;
- Belum optimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya;
- Masih rendahnya kualitas tenaga kesehatan, serta masih terbatasnya kuantitas tenaga kesehatan dengan basis ilmu tertentu seperti gizi, kesehatan lingkungan dan manajemen kesehatan;
- Pandemi Covid-19 masih mewabah serta adanya penyakit *endemik* yang berjangkit dan sulit dikendalikan karena pengaruh perubahan cuaca seperti infeksi saluran pernapasan akut, demam berdarah, penyakit infeksi khronis seperti TBC, HIV dan malaria.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur memegang peranan penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pembanguana terus dilaksanakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Namun demikian, upaya-upaya itu belum mampu menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan infrastruktur daerah.

Infrastruktur belum mampu memberi dukungan maksimal terhadap upaya menciptakan transportasi yang aman, efisien dan efektif.

Permasalahan transportasi darat adalah tingginya tingkat kerusakan jalan akibat longsir dan banjir, rendahnya akses jalan menuju kantong-kantong produksi serta minimnya ketersedianya sarana transportasi darat untuk daerah pedalaman. Sementara itu permasalahan transportasi laut adalah belum memadainya kualitas sarana dan daya tampung ruang kota. Sedangkan permasalahan transportasi udara adalah panjang landasan yang tidak memungkinkan untuk didarati jenis pesawat terbang berukuran besar. Berbagai permasalahan transportasi di atas memberikan dampak terhadap mahalnya biaya dan tidak efektifnya transportasi.

Daya dukung sumber air baku untuk mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat belum optimal. Saluran irigasi belum mampu

memenuhi kebutuhan air bagi kegiatan budidaya pertanian. Masih tersedia lahan potensial yang cukup untuk perluasan areal budidaya pertanian namun belum terlayani jaringan irigasi teknis. Selain itu ketersediaan air baku juga belum mampu mengatasi kebutuhan air bersih yang terus meningkat sejalan dengan terus bertambahnya jumlah penduduk.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kebutuhan akan perumahan layak huni dan lingkungan permukiman yang berkualitas juga belum teratasi secara optimal. Pemenuhan kebutuhan hunian layak masih dihadapkan pada rendahnya tingkat keterjangkauan rumah layak bagi masyarakat. Masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah menetap pada rumah tidak layak huni dan sebagiannya tidak memiliki rumah. Kebutuhan akan rumah bagi masyarakat terus meningkat yang tidak diiringi dengan kemampuan orang yang memiliki rumah sehingga meningkatkan jumlah rumah tangga sharing. Hal ini memberi dampak pada penurunan kualitas rumah dan menciptakan rumah tidak layak huni baru.

Minimnya ketersediaan sarana prasarana dasar memberikan dampak pada tidak berkurangnya lingkungan kumuh bahkan memungkinkan terciptanya lingkungan kumuh baru. Kinerja pelayanan air bersih/minum masih perlu ditingkatkan dalam rangka mencapai target *universal acces*. Demikian juga pada sektor sanitasi yang meliputi limbah domestik, sampah dan drainase. Prasarana permukiman lain seperti jalan lingkungan, talud pengaman permukiman dari longsor dan abrasi serta ketersediaan listrik juga belum menunjukkan kinerja optimal sehingga memberi dampak pada penurunan kualitas lingkungan.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Pengamanan dan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur perlu ditingkatkan
- Perlu diadakan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- Konflik sosial antar kampung, batas wilayah dan hak ulayat perlu dicegah.

memenuhi kebutuhan air bagi kegiatan budidaya pertanian. Masih tersedia lahan potensial yang cukup untuk perluasan areal budidaya pertanian namun belum terlayani jaringan irigasi teknis. Selain itu ketersediaan air baku juga belum mampu mengatasi kebutuhan air bersih yang terus meningkat sejalan dengan terus bertambahnya jumlah penduduk.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kebutuhan akan perumahan layak huni dan lingkungan permukiman yang berkualitas juga belum teratasi secara optimal. Pemenuhan kebutuhan hunian layak masih dihadapkan pada rendahnya tingkat keterjangkauan rumah layak bagi masyarakat. Masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah menetap pada rumah tidak layak huni dan sebagiannya tidak memiliki rumah. Kebutuhan akan rumah bagi masyarakat terus meningkat yang tidak diiringi dengan kemampuan orang yang memiliki rumah sehingga meningkatkan jumlah rumah tangga sharing. Hal ini memberi dampak pada penurunan kualitas rumah dan menciptakan rumah tidak layak huni baru.

Minimnya ketersediaan sarana prasarana dasar memberikan dampak pada tidak berkurangnya lingkungan kumuh bahkan memungkinkan terciptanya lingkungan kumuh baru. Kinerja pelayanan air bersih/minum masih perlu ditingkatkan dalam rangka mencapai target *universal acces*. Demikian juga pada sektor sanitasi yang meliputi limbah domestik, sampah dan drainase. Prasarana permukiman lain seperti jalan lingkungan, talud pengaman permukiman dari longsor dan abrasi serta ketersediaan listrik juga belum menunjukkan kinerja optimal sehingga memberi dampak pada penurunan kualitas lingkungan.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Pengamanan dan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur perlu ditingkatkan
- Perlu diadakan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- Konflik sosial antar kampung, batas wilayah dan hak ulayat perlu dicegah.

6. Sosial

- Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar bagi pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masih kurang dan belum optimal peran berbagai pihak termasuk masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat yang belum efektif
- Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal
- Pola-pola penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia, didukung prasarana yang memadai dan berkualitas, serta dengan mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial belum berjalan seperti yang diharapkan
- Pengaruh negatif globalisasi bagi anak dan remaja relatif tinggi.

6. Sosial

- Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar bagi pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masih kurang dan belum optimal peran berbagai pihak termasuk masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat yang belum efektif
- Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal
- Pola-pola penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia, didukung prasarana yang memadai dan berkualitas, serta dengan mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial belum berjalan seperti yang diharapkan
- Pengaruh negatif globalisasi bagi anak dan remaja relatif tinggi.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 - 2022 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.1

Visi

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan pada periode lima tahunan terakhir dalam rangka pencapaian visi RPJPD Kabupaten Flores Timur tahun 2005-2025. Visi tersebut adalah **“Flores Timur yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, dan Berdaya Saing”**.

Berdasarkan visi tersebut, sasaran pembangunan jangka menengah tahap keempat/ terakhir yang ingin dicapai adalah:

- 1) Terwujudnya jaminan kehidupan bermartabat

BAB II

RENCANA STRATEGIS

Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 - 2022 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.1

Visi

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan pada periode lima tahunan terakhir dalam rangka pencapaian visi RPJPD Kabupaten Flores Timur tahun 2005-2025. Visi tersebut adalah **“Flores Timur yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, dan Berdaya Saing”**.

Berdasarkan visi tersebut, sasaran pembangunan jangka menengah tahap keempat/ terakhir yang ingin dicapai adalah:

- 1) Terwujudnya jaminan kehidupan bermartabat

- 2) Meningkatnya kemampuan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan
- 3) Pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkendali
- 4) Meningkatnya kualitas SDM
- 5) Tersedianya tenaga kerja produktif di sektor usaha ekonomi daerah
- 6) Meningkatnya infrastruktur dasar dan transportasi untuk mendukung perekonomian daerah
- 7) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
- 8) Meningkatnya kesejahteraan sosial

Mengacu pada sasaran pembangunan di atas, serta memperhatikan kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi, kondusif faktual, permasalahan dan isu-isu strategis maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.



Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan melalui pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dapat dicapai dan rasional, untuk dapat dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan tahapan perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai pedoman utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Sasaran merupakan gambaran dampak (*impact*) keberhasilan pembanguan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program pembangunan daerah. Capaian sasaran pembangunan selain menunjukkan tercapainya tujuan pembangunan jangkauan jangka menengah daerah, juga berisikan sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Dengan demikian capaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah melalui RPD tahun 2023-2026 merupakan kontribusi periode terakhir untuk mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang

- 2) Meningkatnya kemampuan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan
- 3) Pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkendali
- 4) Meningkatnya kualitas SDM
- 5) Tersedianya tenaga kerja produktif di sektor usaha ekonomi daerah
- 6) Meningkatnya infrastruktur dasar dan transportasi untuk mendukung perekonomian daerah
- 7) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
- 8) Meningkatnya kesejahteraan sosial

Mengacu pada sasaran pembangunan di atas, serta memperhatikan kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi, kondusif faktual, permasalahan dan isu-isu strategis maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.



Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan melalui pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dapat dicapai dan rasional, untuk dapat dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan tahapan perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai pedoman utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Sasaran merupakan gambaran dampak (*impact*) keberhasilan pembanguana yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program pembangunan daerah. Capaian sasaran pembangunan selain menunjukkan tercapainya tujuan pembangunan jangkauan jangka menengah daerah, juga berisikan sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Dengan demikian capaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah melalui RPD tahun 2023-2026 merupakan kontribusi periode terakhir untuk mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang

(RPJPD) tahun 2005-2025. Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Terwujudnya daya saing daerah

Sasaran :

1) Terwujudnya daya saing ekonomi

Indikator Kinerja :

- a. Persetasi lembaga petani tingkat madya
- b. Rasio penyuluh perdesa
- c. Cakupan pemenuhan sarana pertanian
- d. Cakupan pemenuhan prasarana pertanian
- e. Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap
- f. Persentasi hasil olahan produk perikanan yang dipasarkan
- g. Persentasi UMKM yang bergerak di bidang pertanian yang memiliki badan hukum
- h. Persentase industri skala kecil dan menengah yang mengelolah hasil pertanian
- i. Cakupan sarana distribusi perdagangan
- j. Terkendalnya harga barang (perbandingan harga pasar dengan harga dasar (Laporan)
- k. Cakupan IKM yang difasilitasi
- l. Persentasi pengembangan iklim penanaman modal
- m. Persentase fasilitasi pelayanan perizinan
- n. Persentase prasarana dan sarana pariwisata
- o. Persentase SDM pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya
- p. Persentase promosi dan pemasaran pariwisata
- q. Persentase BUMDES aktif
- r. Persentase peningkatan desa tertib administrasi
- s. Persentase aparatur desa yang ditingkatkan kapasitasnya
- t. Persentase desa yang PADesanya meningkat

2) Terwujudnya daya saing SDM

Indikator Kinerja :

- a. APK PAUD
- b. APK SD
- c. APM SD

(RPJPD) tahun 2005-2025. Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Terwujudnya daya saing daerah

Sasaran :

1) Terwujudnya daya saing ekonomi

Indikator Kinerja :

- a. Persetasi lembaga petani tingkat madya
- b. Rasio penyuluh perdesa
- c. Cakupan pemenuhan sarana pertanian
- d. Cakupan pemenuhan prasarana pertanian
- e. Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap
- f. Persentasi hasil olahan produk perikanan yang dipasarkan
- g. Persentasi UMKM yang bergerak di bidang pertanian yang memiliki badan hukum
- h. Persentase industri skala kecil dan menengah yang mengelolah hasil pertanian
- i. Cakupan sarana distribusi perdagangan
- j. Terkendalnya harga barang (perbandingan harga pasar dengan harga dasar (Laporan)
- k. Cakupan IKM yang difasilitasi
- l. Persentasi pengembangan iklim penanaman modal
- m. Persentase fasilitasi pelayanan perizinan
- n. Persentase prasarana dan sarana pariwisata
- o. Persentase SDM pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya
- p. Persentase promosi dan pemasaran pariwisata
- q. Persentase BUMDES aktif
- r. Persentase peningkatan desa tertib administrasi
- s. Persentase aparatur desa yang ditingkatkan kapasitasnya
- t. Persentase desa yang PADesanya meningkat

2) Terwujudnya daya saing SDM

Indikator Kinerja :

- a. APK PAUD
- b. APK SD
- c. APM SD

- d. APK SMP
- e. APM SMP
- f. Penurunan buta huruf
- g. Angka DO
- h. Angka melanjutkan pendidikan SD ke SMP
- i. Angka melanjutkan pendidikan SMP ke SMA
- j. Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik
- k. Angka kelulusan (AL) SD/MI
- l. Angka kelulusan SMP/MTS
- m. Persentase PAUD terakreditasi B
- n. Persentase SD terakreditasi minimal B
- o. Persentase SMP terakreditasi minimal B
- p. Jumlah siswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa (mahasiswa)
- q. Cakupan penyelenggaraan perpustakaan
- r. Cakupan PHBS
- s. Cakupan penanganan penyakit menular
- t. Cakupan penanganan penyakit tidak menular
- u. Persentase puskesmas yang terakreditasi utama
- v. Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar
- w. Angka gizi buruk
- x. Cakupan desa/kelurahan STBM
- y. Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
- z. Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar
- aa. Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar
- bb. Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
- cc. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
- dd. Cakupan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar
- ee. Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
- ff. Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar
- gg. Cakupan pelayanan vaksin covid-19
- hh. Persentase penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan

- d. APK SMP
- e. APM SMP
- f. Penurunan buta huruf
- g. Angka DO
- h. Angka melanjutkan pendidikan SD ke SMP
- i. Angka melanjutkan pendidikan SMP ke SMA
- j. Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik
- k. Angka kelulusan (AL) SD/MI
- l. Angka kelulusan SMP/MTS
- m. Persentase PAUD terakreditasi B
- n. Persentase SD terakreditasi minimal B
- o. Persentase SMP terakreditasi minimal B
- p. Jumlah siswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa (mahasiswa)
- q. Cakupan penyelenggaraan perpustakaan
- r. Cakupan PHBS
- s. Cakupan penanganan penyakit menular
- t. Cakupan penanganan penyakit tidak menular
- u. Persentase puskesmas yang terakreditasi utama
- v. Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar
- w. Angka gizi buruk
- x. Cakupan desa/kelurahan STBM
- y. Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
- z. Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar
- aa. Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar
- bb. Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
- cc. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
- dd. Cakupan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar
- ee. Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
- ff. Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar
- gg. Cakupan pelayanan vaksin covid-19
- hh. Persentase penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan

- ii. Persentasi angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan
- jj. Persentasi pemenuhan sarana pelatihan BLK
- 3) Terwujudnya daya saing infrastruktur
 - a. Persentasi jalan yang ditangani
 - b. Persentasi irigasi kondisi baik (Bendungan)
 - c. Persentasi penduduk berakses air minum
 - d. Persentasi sarana dan prasarana sampah
 - e. Akses limbah domestik layak
 - f. Persentasi peningkatan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik
 - g. Persentasi peningkatan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik
 - h. Persentasi pengadaan tanah pemda yang difasilitasi
 - i. Persentasi peningkatan jaringan intra pemerintah

Tujuan 2 : Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan

Sasaran :

- 1) Terpenuhnya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata

Indikator Kinerja :

- a. Persentasi anak terlantar yang ditangani
- b. Cakupan rumah layak huni
- c. Cakupan PSU

- 2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indikator Kinerja :

- a. Persentasi laporan kualitas lingkungan hidup
- b. Cakupan daerah yang dikonservasi
- c. Persentasi penanganan sampah
- d. Persentasi pengurangan sampah
- e. Ketaatan terhadap penata ruang

Tujuan 3 : Terwujudnya manusia dan masyarakat yang berkualitas

- ii. Persentasi angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan
- jj. Persentasi pemenuhan sarana pelatihan BLK
- 3) Terwujudnya daya saing infrastruktur
 - a. Persentasi jalan yang ditangani
 - b. Persentasi irigasi kondisi baik (Bendungan)
 - c. Persentasi penduduk berakses air minum
 - d. Persentasi sarana dan prasarana sampah
 - e. Akses limbah domestik layak
 - f. Persentasi peningkatan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik
 - g. Persentasi peningkatan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik
 - h. Persentasi pengadaan tanah pemda yang difasilitasi
 - i. Persentasi peningkatan jaringan intra pemerintah

Tujuan 2 : Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan

Sasaran :

- 1) Terpenuhnya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata

Indikator Kinerja :

- a. Persentasi anak terlantar yang ditangani
- b. Cakupan rumah layak huni
- c. Cakupan PSU

- 2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indikator Kinerja :

- a. Persentasi laporan kualitas lingkungan hidup
- b. Cakupan daerah yang dikonservasi
- c. Persentasi penanganan sampah
- d. Persentasi pengurangan sampah
- e. Ketaatan terhadap penata ruang

Tujuan 3 : Terwujudnya manusia dan masyarakat yang berkualitas

Sasaran :

1) Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat

Indikator Kinerja :

- a. APK PAUD
- b. APM PAUD
- c. APK SD
- d. APM SD
- e. APK SMP
- f. APM SMP
- g. Penurunan buta huruf
- h. Angka DO
- i. Angka melanjutkan pendidikan SMP ke SMA
- j. Persentasi sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik
- k. Angka kelulusan (AL) SD/MI
- l. Persentasi PAUD terakreditasi B
- m. Persentasi SD terakreditasi minimal B
- n. Persentasi SMP terakreditasi minimal B
- o. Cakupan tenaga pendidikan dan kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi

2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Indikator Kinerja :

- a. Cakupan PHBS
- b. Cakupan penanganan penyakit menular
- c. Cakupan penanganan penyakit tidak menular
- d. Persentasi puskesmas yang terakreditasi utama
- e. Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar
- f. Angka gizi buruk
- g. Cakupan desa/kelurahan STBM
- h. Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
- i. Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar
- j. Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar
- k. Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
- l. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
- m. Cakupan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar

Sasaran :

1) Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat

Indikator Kinerja :

- a. APK PAUD
- b. APM PAUD
- c. APK SD
- d. APM SD
- e. APK SMP
- f. APM SMP
- g. Penurunan buta huruf
- h. Angka DO
- i. Angka melanjutkan pendidikan SMP ke SMA
- j. Persentasi sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik
- k. Angka kelulusan (AL) SD/MI
- l. Persentasi PAUD terakreditasi B
- m. Persentasi SD terakreditasi minimal B
- n. Persentasi SMP terakreditasi minimal B
- o. Cakupan tenaga pendidikan dan kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi

2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Indikator Kinerja :

- a. Cakupan PHBS
- b. Cakupan penanganan penyakit menular
- c. Cakupan penanganan penyakit tidak menular
- d. Persentasi puskesmas yang terakreditasi utama
- e. Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar
- f. Angka gizi buruk
- g. Cakupan desa/kelurahan STBM
- h. Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
- i. Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar
- j. Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar
- k. Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
- l. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
- m. Cakupan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar

- n. Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
 - o. Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar
 - p. Cakupan pelayanan vaksin covid-19
 - q. Persentasi penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan
 - r. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan miskin
 - s. Persentasi penerapan SOP
 - t. Cakupan pemulihan kesehatan
 - u. Cakupan penerapan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi
 - v. Cakupan mutu pelayanan RS
 - w. Persentasi sarana/prasarana RS dalam kondisi baik
 - x. Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
 - y. Persentasi penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan
 - z. Cakupan pengawasan obat dan makanan
 - aa. Cakupan desa yang menerapkan PERDES KIBBLA
 - bb. Persentasi tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas
- 3) Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk dan layanan KB
- Indikator Kinerja:
- a. Cakupan PUS peserta KB aktif
 - b. Cakupan akseptor baru
- 4) Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat
- Indikator Kinerja:
- a. Persentase anak terlantar yang ditangani
 - b. Persentasi fakir miskin yang mendapatkan bantuan
 - c. Persentasi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas
- 5) Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan anak
- Indikator kinerja:
- a. Persentasi perempuan yang berpartisipasi disektor publik
 - b. Persentasi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terselesaikan
 - c. Persentasi kasus kekerasan terhadap anak
 - d. Persentasi desa/kelurahan layak anak
- 6) Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah
- Indikator:

- n. Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
 - o. Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar
 - p. Cakupan pelayanan vaksin covid-19
 - q. Persentasi penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan
 - r. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan miskin
 - s. Persentasi penerapan SOP
 - t. Cakupan pemulihan kesehatan
 - u. Cakupan penerapan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi
 - v. Cakupan mutu pelayanan RS
 - w. Persentasi sarana/prasarana RS dalam kondisi baik
 - x. Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
 - y. Persentasi penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan
 - z. Cakupan pengawasan obat dan makanan
 - aa. Cakupan desa yang menerapkan PERDES KIBBLA
 - bb. Persentasi tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas
- 3) Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk dan layanan KB
- Indikator Kinerja:
- a. Cakupan PUS peserta KB aktif
 - b. Cakupan akseptor baru
- 4) Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat
- Indikator Kinerja:
- a. Persentase anak terlantar yang ditangani
 - b. Persentasi fakir miskin yang mendapatkan bantuan
 - c. Persentasi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas
- 5) Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan anak
- Indikator kinerja:
- a. Persentasi perempuan yang berpartisipasi disektor publik
 - b. Persentasi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terselesaikan
 - c. Persentasi kasus kekerasan terhadap anak
 - d. Persentasi desa/keurahan layak anak
- 6) Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah
- Indikator:

- a. Persentasi organisasi pemuda yang aktif
- b. Persentasi pemuda yang menjadi wirausaha mandiri
- c. Persentasi fasilitas olahraga yang memenuhi standar

Tujuan 4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran :

- 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Indikator Kinerja :

- a. Cakupan penerapan SPM sesuai standar
- b. Cakupan penerapan SOP sesuai standar
- c. Rasio penduduk ber-KTP
- d. Rasio penduduk ber-KK
- e. Rasio anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA
- f. Rasio penduduk ber-AKTA kelahiran
- g. Rasio penduduk ber-AKTA nikah
- h. Persentasi fasilitas pelayanan perizinan
- i. Persentasi ASN yang memiliki sertifikat fungsional sesuai jabatan
- j. Persentasi ASN yang memiliki sertifikat penjenjangan sesuai jabatan
- k. Persentasi peningkatan PAD
- l. Persentasi penatausahaan keuangan
- m. Persentasi penatausahaan aset
- n. Persentasi tindaklanjut LHP
- o. Persentasi keterlibatan lembaga politik dalam pendidikan politik masyarakat
- p. Cakupan layanan media komunikasi dan informasi publik
- q. Persentasi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD
- r. Persentasi realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD
- s. Persentasi konsistensi program kegiatan RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja
- t. Persentasi kasus sosial yang ditangani
- u. Persentasi kasus kriminal yang ditangani

- a. Persentasi organisasi pemuda yang aktif
- b. Persentasi pemuda yang menjadi wirausaha mandiri
- c. Persentasi fasilitas olahraga yang memenuhi standar

Tujuan 4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran :

- 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Indikator Kinerja :

- a. Cakupan penerapan SPM sesuai standar
- b. Cakupan penerapan SOP sesuai standar
- c. Rasio penduduk ber-KTP
- d. Rasio penduduk ber-KK
- e. Rasio anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA
- f. Rasio penduduk ber-AKTA kelahiran
- g. Rasio penduduk ber-AKTA nikah
- h. Persentasi fasilitas pelayanan perizinan
- i. Persentasi ASN yang memiliki sertifikat fungsional sesuai jabatan
- j. Persentasi ASN yang memiliki sertifikat penjenjangan sesuai jabatan
- k. Persentasi peningkatan PAD
- l. Persentasi penatausahaan keuangan
- m. Persentasi penatausahaan aset
- n. Persentasi tindaklanjut LHP
- o. Persentasi keterlibatan lembaga politik dalam pendidikan politik masyarakat
- p. Cakupan layanan media komunikasi dan informasi publik
- q. Persentasi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD
- r. Persentasi realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD
- s. Persentasi konsistensi program kegiatan RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja
- t. Persentasi kasus sosial yang ditangani
- u. Persentasi kasus kriminal yang ditangani

- v. Persentasi peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- w. Persentasi penurunan resiko bencana
- x. Persentasi cakupan penanganan bencana
- y. Persentasi cakupan rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana
- z. Persentasi pelayanan dan penanganan sosial korban bencana
 - aa. Persentasi desa/kelurahan siaga bencana
 - bb. Jumlah penelitian yang dimanfaatkan
 - cc. Jumlah inovasi yang dihasilkan
 - dd. Persentasi BUMDES aktif
 - ee. Persentasi peningkatan desa tertib administrasi
 - ff. Persentasi aparatur desa yang ditingkatkan kapasitasnya

- v. Persentasi peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- w. Persentasi penurunan resiko bencana
- x. Persentasi cakupan penanganan bencana
- y. Persentasi cakupan rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana
- z. Persentasi pelayanan dan penanganan sosial korban bencana
 - aa. Persentasi desa/kelurahan siaga bencana
 - bb. Jumlah penelitian yang dimanfaatkan
 - cc. Jumlah inovasi yang dihasilkan
 - dd. Persentasi BUMDES aktif
 - ee. Persentasi peningkatan desa tertib administrasi
 - ff. Persentasi aparatur desa yang ditingkatkan kapasitasnya

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rencana hasil yang akan dicapai Pemerintah Kabupaten Flores Timur selama satu tahun anggaran. RKT ini ditetapkan sebagai implementasi dari RPD tahun 2023-2026 untuk mendukung 12 sasaran strategis, dengan tetap mempertimbangkan perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi serta tetap berpedoman pada kebijakan Pemerintah, dengan tidak mengurangi esensi Perencanaan Strategis tersebut.

Dalam penyusunan RKT Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Flores Timur selain memperhatikan program-program juga memperhatikan target capaian kinerja masing-masing program tersebut, yang nantinya akan dituangkan dalam dokumen "Perjanjian Kinerja". Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Adapun tujuan khusus dari penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; serta
5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Untuk itu, RKT Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rencana hasil yang akan dicapai Pemerintah Kabupaten Flores Timur selama satu tahun anggaran. RKT ini ditetapkan sebagai implementasi dari RPD tahun 2023-2026 untuk mendukung 12 sasaran strategis, dengan tetap mempertimbangkan perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi serta tetap berpedoman pada kebijakan Pemerintah, dengan tidak mengurangi esensi Perencanaan Strategis tersebut.

Dalam penyusunan RKT Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Flores Timur selain memperhatikan program-program juga memperhatikan target capaian kinerja masing-masing program tersebut, yang nantinya akan dituangkan dalam dokumen "Perjanjian Kinerja". Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Adapun tujuan khusus dari penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; serta
5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Untuk itu, RKT Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

3.1

Rencana Kinerja Tahunan Kab. Flores Timur Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
I.	BIDANG PENDIDIKAN		
1.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Rata-rata lama sekolah	8,04%
2.	Meningkatnya angka harapan lama sekolah	Angka harapan lama sekolah	13,44%
3.	Meningkatnya angka melek huruf	Angka melek huruf	99,54
4.	Menurunnya angka drop out	Angka drop out	1%
5.	Meningkatnya APK PAUD/TK	APK PAUD/TK	57%
6.	Meningkatnya APK SD/MI/ Paket A	APK SD/MI/ Paket A	97%
7.	Meningkatnya APK SMP/MTs/ Paket B	APK SMP/MTs/ Paket B	96%
8.	Meningkatnya APM PAUD/TK	APM PAUD/TK	57%
9.	Meningkatnya APM SD/MI/ Paket A	APM SD/MI/ Paket A	89%
10.	Meningkatnya APM SMP/MTs/ Paket B	APM SMP/MTs/ Paket B	67%
11.	Tercapainya angka melanjutkan pendidikan SD ke SMP yang ideal	Angka melanjutkan pendidikan SD ke SMP	100%
12.	Tercapainya angka melanjutkan pendidikan SMP ke SMA yang ideal	Angka melanjutkan pendidikan SMP ke SMA	100%
2.	BIDANG KESEHATAN		
1.	Angka kematian ibu	1. UHH 2. AKI/100.000 KLH 3. Pelayanan kesehatan ibu hamil 4. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 5. Pelayanan kesehatan ibu bersalin 6. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 7. Cakupan pelayanan nifas 8. Persentasi ibu hamil KEK 9. Persentase ibu hamil kurang energi kronik mendapat makanan tambahan 10. Persentasi ibu hamil anemia 11. Cakupan ibu hamil mendapat tablet Fe 90 tablet	65,7 124 100 100 100 99,6 96 20 97 40 94

3.1

Rencana Kinerja Tahunan Kab. Flores Timur Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
I.	BIDANG PENDIDIKAN		
1.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Rata-rata lama sekolah	8,04%
2.	Meningkatnya angka harapan lama sekolah	Angka harapan lama sekolah	13,44%
3.	Meningkatnya angka melek huruf	Angka melek huruf	99,54
4.	Menurunnya angka drop out	Angka drop out	1%
5.	Meningkatnya APK PAUD/TK	APK PAUD/TK	57%
6.	Meningkatnya APK SD/MI/ Paket A	APK SD/MI/ Paket A	97%
7.	Meningkatnya APK SMP/MTs/ Paket B	APK SMP/MTs/ Paket B	96%
8.	Meningkatnya APM PAUD/TK	APM PAUD/TK	57%
9.	Meningkatnya APM SD/MI/ Paket A	APM SD/MI/ Paket A	89%
10.	Meningkatnya APM SMP/MTs/ Paket B	APM SMP/MTs/ Paket B	67%
11.	Tercapainya angka melanjutkan pendidikan SD ke SMP yang ideal	Angka melanjutkan pendidikan SD ke SMP	100%
12.	Tercapainya angka melanjutkan pendidikan SMP ke SMA yang ideal	Angka melanjutkan pendidikan SMP ke SMA	100%
2.	BIDANG KESEHATAN		
1.	Angka kematian ibu	1. UHH 2. AKI/100.000 KLH 3. Pelayanan kesehatan ibu hamil 4. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 5. Pelayanan kesehatan ibu bersalin 6. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 7. Cakupan pelayanan nifas 8. Persentasi ibu hamil KEK 9. Persentase ibu hamil kurang energi kronik mendapat makanan tambahan 10. Persentasi ibu hamil anemia 11. Cakupan ibu hamil mendapat tablet Fe 90 tablet	65,7 124 100 100 100 99,6 96 20 97 40 94

		12. Persentasi puskesmas yang menyelenggarakan kelas ibu hamil minimal 50% desa 13. Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup 14. Persentasi puskesmas dengan tempat tidur yang memberikan pelayanan dengan kegawatdaruraan maternal dan neonatal	34 10 20
2.	Angka kematian bayi	1. AKB/1000 KLH 2. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 3. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 4. Cakupan kunjungan neonatal pertama 5. Angka kelangsungan hidup bayi 6. Cakupan kunjungan bayi 7. Cakupan bayi dengan BBLR 8. Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	9,9 100 70 99,8 1 sampai 20 90 6 17,4
3.	Prevalensi stunting	1. Persentase puskesmas yang melakukan pendekatan MTBS 2. Persentasi puskesmas yang melaksanakan SDIDTK 3. Pelayanan kesehatan balita 4. Prevalensi stunting 5. Angka gizi buruk 6. Prevalensi kekurangan gizi 7. Prevalensi underweight 8. Cakupan balita gizi kurang mendapat PMT pemulihan 9. Cakupan balita yang mendapat KMS 10. Cakupan balita yang ditimbang di posyandu (N/D) 11. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan 12. Persentase bayi baru lahir mendapat inisiasi menyusui dini (IMD) 13. Cakupan bayi 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	24 100 100 17 0,3 8 20 50 100 94 100 83 80

		12. Persentasi puskesmas yang menyelenggarakan kelas ibu hamil minimal 50% desa 13. Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup 14. Persentasi puskesmas dengan tempat tidur yang memberikan pelayanan dengan kegawatdaruraan maternal dan neonatal	34 10 20
2.	Angka kematian bayi	1. AKB/1000 KLH 2. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 3. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 4. Cakupan kunjungan neonatal pertama 5. Angka kelangsungan hidup bayi 6. Cakupan kunjungan bayi 7. Cakupan bayi dengan BBLR 8. Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	9,9 100 70 99,8 1 sampai 20 90 6 17,4
3.	Prevalensi stunting	1. Persentase puskesmas yang melakukan pendekatan MTBS 2. Persentasi puskesmas yang melaksanakan SDIDTK 3. Pelayanan kesehatan balita 4. Prevalensi stunting 5. Angka gizi buruk 6. Prevalensi kekurangan gizi 7. Prevalensi underweight 8. Cakupan balita gizi kurang mendapat PMT pemulihan 9. Cakupan balita yang mendapat KMS 10. Cakupan balita yang ditimbang di posyandu (N/D) 11. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan 12. Persentase bayi baru lahir mendapat inisiasi menyusui dini (IMD) 13. Cakupan bayi 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	24 100 100 17 0,3 8 20 50 100 94 100 83 80

		14. Cakupan balita 6-59 bulan mendapat vitamin A	98
		15. Cakupan rumah tangga mengkonsumsi garam yodium	20
		16. Cakupan remaja putri mendapat tablet tambah darah	60
4.	Indeks keluarga sehat	1. Cakupan peserta KB aktif	33
		2. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100
		3. Pelayanan kesehatan usia produktif	100
		4. Pelayanan kesehatan usia lanjut	100
		5. Indeks keluarga sehat	0,29
		6. Cakupan desa siaga aktif	83
		7. Rasio posyandu persatuan balita	28,30
		8. Persentase posyandu persatuan balita	81
		9. Persentase posyandu purnama + mandiri	40
		10. Cakupan puskesmas yang menerapkan kebijakan GERMAS	77
		11. Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	74
		12. Persentase rumah tangga dengan air minum bersih	92
		13. Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	67
		14. Cakupan rumah sehat	
		15. Cakupan pemeriksaan tes kebugaran	60
		16. Cakupan pos UKK	5
			8
5.	Angka kesakitan	1. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100
		2. Prevalensi tuberkulosis	85
		3. Angka keberhasilan pengobatan penderita TB	90
		4. Persentase penemuan penderita baru TB	20
		5. Angka notifikasi semua kasus TB (CNR)	
		6. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	60
		7. Persentase pasien TB yang mengetahui status HIV	100
			3

		14. Cakupan balita 6-59 bulan mendapat vitamin A	98
		15. Cakupan rumah tangga mengkonsumsi garam yodium	20
		16. Cakupan remaja putri mendapat tablet tambah darah	60
4.	Indeks keluarga sehat	1. Cakupan peserta KB aktif	33
		2. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100
		3. Pelayanan kesehatan usia produktif	100
		4. Pelayanan kesehatan usia lanjut	100
		5. Indeks keluarga sehat	0,29
		6. Cakupan desa siaga aktif	83
		7. Rasio posyandu persatuan balita	28,30
		8. Persentase posyandu persatuan balita	81
		9. Persentase posyandu purnama + mandiri	40
		10. Cakupan puskesmas yang menerapkan kebijakan GERMAS	77
		11. Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	74
		12. Persentase rumah tangga dengan air minum bersih	92
		13. Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	67
		14. Cakupan rumah sehat	
		15. Cakupan pemeriksaan tes kebugaran	60
		16. Cakupan pos UKK	5
			8
5.	Angka kesakitan	1. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100
		2. Prevalensi tuberkulosis	85
		3. Angka keberhasilan pengobatan penderita TB	90
		4. Persentase penemuan penderita baru TB	20
		5. Angka notifikasi semua kasus TB (CNR)	
		6. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	60
		7. Persentase pasien TB yang mengetahui status HIV	100
			3

		8. Persentase penemuan dan pengobatan kasus pneumonia pada balita 9. Persentase demam berdarah dangue (DBD) yang ditangani 10. Persentase angka kematian rabies per 10.000 penduduk 11. Persentase penemuan kasus diare 12. Angka kejadian malaria (API)/1000 penduduk 13. Cakupan ABER 14. Tingkat kematian akibat malaria 15. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta /10.000 penduduk 16. Angka kesembuhan kusta (RTF) 17. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) 18. Persentase angka kasus HIV yang diobati 19. Prevalensi HIV/AIDS 20. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan pos pembinaan terpadu (Posbindu) PTM 21. Pelayanan kesehatan hipertensi 22. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 23. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa	100 100 0 7,5 0,5 25 0,5 14 100 100 70 0,053 100 100 100
6.	Umur harapan hidup	1. Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara 2. Persentase penderita gangguan mental emosional pada penduduk usia > 15 tahun yang mendapat pelayanan sesuai standar 3. Persentase fasyankes yang menyelenggarakan layanan upaya berhenti merokok	30 20 50

		8. Persentase penemuan dan pengobatan kasus pneumonia pada balita 9. Persentase demam berdarah dangue (DBD) yang ditangani 10. Persentase angka kematian rabies per 10.000 penduduk 11. Persentase penemuan kasus diare 12. Angka kejadian malaria (API)/1000 penduduk 13. Cakupan ABER 14. Tingkat kematian akibat malaria 15. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta /10.000 penduduk 16. Angka kesembuhan kusta (RTF) 17. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) 18. Persentase angka kasus HIV yang diobati 19. Prevalensi HIV/AIDS 20. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan pos pembinaan terpadu (Posbindu) PTM 21. Pelayanan kesehatan hipertensi 22. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 23. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa	100 100 0 7,5 0,5 25 0,5 14 100 100 70 0,053 100 100 100 100
6.	Umur harapan hidup	1. Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara 2. Persentase penderita gangguan mental emosional pada penduduk usia > 15 tahun yang mendapat pelayanan sesuai standar 3. Persentase fasyankes yang menyelenggarakan layanan upaya berhenti merokok	30 20 50

	4. Persentasi sekolah atau TTU yang menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR)	5
	5. Persentase puskesmas yang melaksanakan posyandu PTM	100
	6. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	85
	7. Cakupan desa uci	
	8. Cakupan vaksinasi covid-19	80
	9. Rasio rumah sakit persatuan penduduk	75
	10. Cakupan puskesmas	0,00043
	11. Cakupan puskesmas pembantu	110,5
	12. Cakupan angka kontak peserta BPJS/1000	21,83
	13. Ratio peserta prolans yang terkendali	150
	14. Ratio rujukan rawat jalan non spesialis	
	15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	5% ≤2%
	16. Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	17,75
	17. Rasio dokter umum	38,09
	18. Rasio dokter gigi	
	19. Rasio perawat	11
	20. Rasio bidan	4
	21. Rasio apoteker	87
	22. Rasio tenaga nutrisisionis	92
	23. Rasio tenaga sanitasi lingkungan	16
	24. Rasio tenaga promkes dan ilmu perilaku	11
	25. Tenaga ahli teknologi laboratorium medik	20
	26. Tenaga terapis gigi mulut	9
	27. Tenaga elektromedik	74
	28. Tenaga rekam medik	88
	29. Tenaga fisioterapis	24
	30. Tenaga sistem informasi kesehatan	24
	31. Tenaga manajemen farmasi	50
	32. Tenaga kesehatan masyarakat	24
	33. Tenaga administrasi keuangan	50
	34. Tenaga informatika	60
	35. Tenaga hukum kesehatan	24
	36. Tenaga ketatausahaan	10
	37. Cakupan tenaga kesehatan yang	50

4.	Persentase sekolah atau TTU yang menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR)	5
5.	Persentase puskesmas yang melaksanakan posyandu PTM	100
6.	Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	85
7.	Cakupan desa uci	
8.	Cakupan vaksinasi covid-19	80
9.	Rasio rumah sakit persatuan penduduk	75
10.	Cakupan puskesmas	0,00043
11.	Cakupan puskesmas pembantu	110,5
12.	Cakupan angka kontak peserta BPJS/1000	21,83
13.	Ratio peserta prolans yang terkendali	150
14.	Ratio rujukan rawat jalan non spesialis	
15.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	5% ≤2%
16.	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	17,75
17.	Rasio dokter umum	38,09
18.	Rasio dokter gigi	
19.	vat	11
20.	,	4
21.	Rasio apoteker	87
22.	Rasio tenaga nutrisisionis	92
23.	Rasio tenaga sanitasi lingkungan	16
24.	Rasio tenaga promkes dan ilmu perilaku	11
25.	Tenaga ahli teknologi laboratorium medik	20
26.	Tenaga terapis gigi mulut	9
27.	Tenaga elektromedik	74
28.	Tenaga rekam medik	88
29.	Tenaga fisioterapis	24
30.	Tenaga sistem informasi kesehatan	24
31.	Tenaga manajemen farmasi	50
32.	Tenaga kesehatan masyarakat	24
33.	Tenaga administrasi keuangan	50
34.	Tenaga informatika	60
35.	Tenaga hukum kesehatan	24
36.	Tenaga ketatausahaan	10
37.	Cakupan tenaga kesehatan yang	50

		mengikuti pendidikan formal strata 1	24
		38. Cakupan tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan profesi	26
		39. Cakupan tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan formal strata 2	11
		40. Cakupan tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	8
		41. Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas	30
		42. Cakupan ketersediaan peralatan kesehatan di puskesmas	94
		43. Cakupan pengawasan mutu obat, sediaan farmasi dan produk pangan	78
			70
3.	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.	Meningkatkan kualitas kemantapan jalan dan jembatan	Tingkat kemantapan jalan	74,33%
2.	Meningkatnya pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat dan pertanian (Bendungan)	Persentasi jaringan irigasi dalam kondisi baik	21,58%
3.	Tercapainya universal acces air minum dan sanitasi	Akses air minum aman	86,34%
		Akses sanitasi aman dan layak	72,18%

4.	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1.	Jumlah dokumen kebijakan bidang PKP yang tersusun	Jumlah dokumen kebijakan bidang PKP yang tersusun/terreview/terlegalisasi	2 dokumen
2.	Terlaksananya pembangunan rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	620 unit
3.	Terlaksananya urusan penyelenggaraan prasarana sarana dan utilitas (PSU)	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	2 lokasi
4.	Tersusunnya dokumen penyelesaian sengketa tanah garapan	Jumlah data sengketa, konflik dan perkara dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen
5.	Tersusunnya dokumen sidang panitia pertimbangan Landreform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah	Jumlah dokumen sidang panitia pertimbangan Landreform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah	4 dokumen

		mengikuti pendidikan formal strata 1	24
		38. Cakupan tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan profesi	26
		39. Cakupan tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan formal strata 2	11
		40. Cakupan tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	8
		41. Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas	30
		42. Cakupan ketersediaan peralatan kesehatan di puskesmas	94
		43. Cakupan pengawasan mutu obat, sediaan farmasi dan produk pangan	78
			70
3.	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.	Meningkatkan kualitas kemantapan jalan dan jembatan	Tingkat kemantapan jalan	74,33%
2.	Meningkatnya pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat dan pertanian (Bendungan)	Persentasi jaringan irigasi dalam kondisi baik	21,58%
3.	Tercapainya universal acces air minum dan sanitasi	Akses air minum aman	86,34%
		Akses sanitasi aman dan layak	72,18%

4.	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1.	Jumlah dokumen kebijakan bidang PKP yang tersusun	Jumlah dokumen kebijakan bidang PKP yang tersusun/terreview/terlegalisasi	2 dokumen
2.	Terlaksananya pembangunan rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	620 unit
3.	Terlaksananya urusan penyelenggaraan prasarana sarana dan utilitas (PSU)	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	2 lokasi
4.	Tersusunnya dokumen penyelesaian sengketa tanah garapan	Jumlah data sengketa, konflik dan perkara dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen
5.	Tersusunnya dokumen sidang panitia pertimbangan Landreform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah	Jumlah dokumen sidang panitia pertimbangan Landreform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah	4 dokumen

5.	BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN		
1.	Penaangguhan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengaman dan pengawalan	5 kasus
		Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	5 kasus
		Jumlah dokumen hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	5 dokumen
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	15 orang
		Jumlah dokumen hasil kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	5 dokumen
6.	BIDANG SOSIAL		
1.	Menurunnya persentasi PMKS	1. persentasi PMKS	10,42%
		2. Persentasi penyandang disabilitas dan lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100%
2.	Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentasi tingkat kemiskinan	10%
B.	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
I.	BIDANG TENAGA KERJA		

5.	BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN		
1.	Penaangguan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengaman dan pengawalan	5 kasus
		Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	5 kasus
		Jumlah dokumen hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	5 dokumen
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	15 orang
		Jumlah dokumen hasil kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	5 dokumen
6.	BIDANG SOSIAL		
1.	Menurunnya persentasi PMKS	1. persentasi PMKS	10,42%
		2. Persentasi penyandang disabilitas dan lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100%
2.	Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentasi tingkat kemiskinan	10%
B.	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
I.	BIDANG TENAGA KERJA		

1.	Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	1. Persentasi angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan 2. Jumlah sarana dan prasarana pelatihan kerja yang memenuhi standar 3. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	2,86% - 30 orang
2.	Penempatan tenaga kerja	1. Persentasi penyerapan tenaga kerja 2. Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online	47,2% -
3.	Hubungan industrial	1. Persentasi perkara perselisihan yang ditangani 2. Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahaan peraturan perusahaan yang terdaftar dengan Hub WKLP online	80% 10 perusahaan
4.	Ketransmigrasian	1. Jumlah dokumen identifikasi potensi kawasan transmigrasi 2. Jumlah UPT yang di bangun 3. Persentase unit pemukiman transmigrasi (UPT) yang dikembangkan	2 dokumen - 100%
2.	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1.	Meningkatkan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan	1. Indeks pembangunan gender 2. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan 3. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	46,00% 0,001% 0,02%

1.	Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	1. Persentasi angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan 2. Jumlah sarana dan prasarana pelatihan kerja yang memenuhi standar 3. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	2,86% - 30 orang
2.	Penempatan tenaga kerja	1. Persentasi penyerapan tenaga kerja 2. Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online	47,2% -
3.	Hubungan industrial	1. Persentasi perkara perselisihan yang ditangani 2. Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahaan peraturan perusahaan yang terdaftar dengan Hub WKLP online	80% 10 perusahaan
4.	Ketransmigrasian	1. Jumlah dokumen identifikasi potensi kawasan transmigrasi 2. Jumlah UPT yang di bangun 3. Persentase unit pemukiman transmigrasi (UPT) yang dikembangkan	2 dokumen - 100%
2.	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1.	Meningkatkan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan	1. Indeks pembangunan gender 2. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan 3. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	46,00% 0,001% 0,02%

1	2	3	4
3.	BIDANG PANGAN		
1.	Terwujudnya daya saing ekonomi	1. Pelaksanaan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup wilayah daerah kabupaten • Beras / jagung giling 2. Pengadaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota • Beras jagung/ jagung giling 3. Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan (NBM) 4. Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan 5. Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan ketentraman pangan 6. Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun 7. Peningkatan ketahanan pangan • Keluarga • Belanja bahan bibit tanaman 8. Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota 9. Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota 10. Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal • Paket pengembangan pekarangan	14.100 Kg 2.050 Kg 4 laporan 4 dokumen 13 dokumen 3 dokumen 6 keluarga 1 paket 10 dokumen 1 sertifikat 4 paket

1	2	3	4
3.	BIDANG PANGAN		
1.	Terwujudnya daya saing ekonomi	1. Pelaksanaan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup wilayah daerah kabupaten • Beras / jagung giling 2. Pengadaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota • Beras jagung/ jagung giling 3. Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan (NBM) 4. Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan 5. Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan ketentraman pangan 6. Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun 7. Peningkatan ketahanan pangan • Keluarga • Belanja bahan bibit tanaman 8. Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota 9. Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota 10. Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal • Paket pengembangan pekarangan	14.100 Kg 2.050 Kg 4 laporan 4 dokumen 13 dokumen 3 dokumen 6 keluarga 1 paket 10 dokumen 1 sertifikat 4 paket

		12. Jumlah sampah yang dipilih, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA / TPST / SPA Kabupaten / Kota 13. Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat 14. Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	2 dokumen 8.078,44 ton 3 kelompok 1 unit
5.	BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
1.	Terselenggaranya penataan administrasi kependudukan	1. Jumlah laporan hasil peningkatan layanan pendaftaran penduduk 2. Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan 3. Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan 4. Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan 5. Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan 6. Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan 7. Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	3 laporan 2 layanan 1 dokumen 3 dokumen 5 dokumen 1 laporan 100 dokumen
6.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintah desa	1. Persentase desa yang melakukan penataan desa 2. Persentase peningkatan desa yang tertib administrasi	11,11% 79,04%
2.	Meningkatnya perekonomian desa	Persentase BUMDes yang aktif	46,72%

		12. Jumlah sampah yang dipilih, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA / TPST / SPA Kabupaten / Kota 13. Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat 14. Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	2 dokumen 8.078,44 ton 3 kelompok 1 unit
5.	BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
1.	Terselenggaranya penataan administrasi kependudukan	1. Jumlah laporan hasil peningkatan layanan pendaftaran penduduk 2. Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan 3. Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan 4. Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan 5. Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan 6. Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan 7. Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	3 laporan 2 layanan 1 dokumen 3 dokumen 5 dokumen 1 laporan 100 dokumen
6.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintah desa	1. Persentase desa yang melakukan penataan desa 2. Persentase peningkatan desa yang tertib administrasi	11,11% 79,04%
2.	Meningkatnya perekonomian desa	Persentase BUMDes yang aktif	46,72%

3.	Meningkatnya tata kelola pemerintah desa	Persentase peningkatan desa yang tertib administrasi	79,04%
4.	Meningkatnya perekonomian desa	Persentase desa yang PADesnya meningkat	10,53
7.	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1.	Meningkatkan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Menurunkan angka kelahiran total (TFR)	7 dokumen
8.	BIDANG PERHUBUNGAN		
1.	Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Persentase peningkatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	52%
2.	Meningkatnya kualitas pengolahan pelayaran	Persentase peningkatan kualitas pengolahan pelayaran	30,5%
9.	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
1.	Meningkatnya Kualitasnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Media Komunikasi dan Informasi Publik	40%
2.	Meningkatkan Cakupan Pelayanan Telekomunikasi	Persentase Peningkatan Jaringan Intra Pemerintah	72,22%
10.	BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
1.	Pengawas dan pemeriksaan koperasi	Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota	88 koperasi
2.	Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Jumlah unit koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	10 unit usaha
3.	Pendidikan dan latihan perkoperasian	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	60 orang
4.	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengemangan ekonomi lainnya	10 keluarga (kelompok embrio)
5.	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	240 unit usaha
6.	Pengembangan UMKM	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran SDM, serta desain dan teknologi pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	10 unit usaha
11.	BIDANG PENANAMAN MODAL		

3.	Meningkatnya tata kelola pemerintah desa	Persentase peningkatan desa yang tertib administrasi	79,04%
4.	Meningkatnya perekonomian desa	Persentase desa yang PADesnya meningkat	10,53
7.	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1.	Meningkatkan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Menurunkan angka kelahiran total (TFR)	7 dokumen
8.	BIDANG PERHUBUNGAN		
1.	Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Persentase peningkatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	52%
2.	Meningkatnya kualitas pengolahan pelayaran	Prosentase peningkatan kualitas pengolahan pelayaran	30,5%
9.	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
1.	Meningkatnya Kualitasnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Media Komunikasi dan Informasi Publik	40%
2.	Meningkatkan Cakupan Pelayanan Telekomunikasi	Prosentase Peningkatan Jaringan Intra Pemerintah	72,22%
10.	BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
1.	Pengawas dan pemeriksaan koperasi	Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota	88 koperasi
2.	Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Jumlah unit koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	10 unit usaha
3.	Pendidikan dan latihan perkoperasian	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	60 orang
4.	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengemangan ekonomi lainnya	10 keluarga (kelompok embrio)
5.	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	240 unit usaha
6.	Pengembangan UMKM	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran SDM, serta desain dan teknologi pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	10 unit usaha
11.	BIDANG PENANAMAN MODAL		

1.	Persentase sistem investasi yang dibangun	Jumlah dokumen penetapan kebijakan penanaman modal	2 dokumen
2.	Jumlah potensi unggulan daerah yang di promisi	Meningkatnya investasi daerah	1 video promosi
3.	Peningkatan pelayanan perizinan	Jumlah pelayanan perizinan	2000 izin usaha
4.	Meningkatnya jumlah investor PMA/PMDN	Meningkatnya investasi daerah	-
5.	Terlaksananya sistem pengembangan informasi penanaman modal	Tersedianya sistem pengembangan informasi penanaman modal	-
12.	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1.	Meningkatnya persentasi organisasi pemuda yang aktif	Persentase organisasi pemuda yang aktif	24,73%
2.	Meningkatnya persentase wirausaha muda	Persentasi pemuda yang menjadi wirausaha mandiri	1,70%
13.	BIDANG KEBUDAYAAN		
1.	Meningkatnya pengembangan budaya Lamaholot secara strategis dan terintegrasi	1. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan 2. Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisional 3. Pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal Kabupaten / Kota 4. Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	3 obyek 1 laporan 20 orang 1 dokumen
2.	Meningkatnya pengembangan budaya Lamaholot secara strategis dan integrasi	Pengembangan cagr budaya peringkat Kabupaten/Kota	10 objek
14.	BIDANG PERPUSTAKAAN		
1.	Terwujudnya daya saing SDM	1. Jumlah perpustakaan yang dikembangkan ditingkat daerah Kabupaten/Kota sesuai standar nasional perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya 2. Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan 3. Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat	1 perpustakaan 20 perpustakaan 20 orang

1.	Persentase sistem investasi yang dibangun	Jumlah dokumen penetapan kebijakan penanaman modal	2 dokumen
2.	Jumlah potensi unggulan daerah yang di promisi	Meningkatnya investasi daerah	1 video promosi
3.	Peningkatan pelayanan perizinan	Jumlah pelayanan perizinan	2000 izin usaha
4.	Meningkatnya jumlah investor PMA/PMDN	Meningkatnya investasi daerah	-
5.	Terlaksananya sistem pengembangan informasi penanaman modal	Tersedianya sistem pengembangan informasi penanaman modal	-
12.	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1.	Meningkatnya persentasi organisasi pemuda yang aktif	Persentase organisasi pemuda yang aktif	24,73%
2.	Meningkatnya persentase wirausaha muda	Persentasi pemuda yang menjadi wirausaha mandiri	1,70%
13.	BIDANG KEBUDAYAAN		
1.	Meningkatnya pengembangan budaya Lamaholot secara strategis dan terintegrasi	1. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	3 obyek
		2. Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisional	1 laporan
		3. Pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal Kabupaten / Kota	20 orang
		4. Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	1 dokumen
2.	Meningkatnya pengembangan budaya Lamaholot secara strategis dan integrasi	Pengembangan cagr budaya peringkat Kabupaten/Kota	10 objek
14.	BIDANG PERPUSTAKAAN		
1.	Terwujudnya daya saing SDM	1. Jumlah perpustakaan yang dikembangkan ditingkat daerah Kabupaten/Kota sesuai standar nasional perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya	1 perpustakaan
		2. Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	20 perpustakaan
		3. Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat	20 orang

		sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	200 eksemplar
		4. Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	15 lokus
		5. Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	10
		6. Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	perpustakaan
15	BIDANG KEARSIPAN		
1.	Peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan 2. Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan 3. Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota 4. Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	40 berkas 20 berkas 1 laporan 1 laporan
2.	Peningkatan kualitas layanan publik	1. Jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun 2. Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendampingan penyelamatan arsip bagi pemekaran daerah kecamatan	10 arsip 20 arsip
C.	URUSAN PILIHAN		
1.	BIDANG PERIKANAN		
1.	Meningkatnya produksi	1. Jumlah data dan informasi sumber daya ikan dan perairan darat dalam satu kabupaten/kota yang tersedia 2. Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	1 dokumen 4 layanan
2.	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil	228 kelompok

		sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	200 eksemplar
		4. Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	15 lokus
		5. Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	10
		6. Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	perpustakaan
15	BIDANG KEARSIPAN		
1.	Peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan 2. Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan 3. Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota 4. Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	40 berkas 20 berkas 1 laporan 1 laporan
2.	Peningkatan kualitas layanan publik	1. Jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun 2. Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendampingan penyelamatan arsip bagi pemekaran daerah kecamatan	10 arsip 20 arsip
C.	URUSAN PILIHAN		
1.	BIDANG PERIKANAN		
1.	Meningkatnya produksi	1. Jumlah data dan informasi sumber daya ikan dan perairan darat dalam satu kabupaten/kota yang tersedia 2. Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	1 dokumen 4 layanan
2.	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil	228 kelompok

	budidaya	yang mengikuti pengembangan kapasitas	
3.	Meningkatnya pengawasan sumber daya perikanan	Jumlah dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten kota	1 dokumen
4.	Meningkatnya produksi dan diverifikasi pangan	1. Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengelolaan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko 2. Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	1 dokumen 70 unit
2.	BIDANG PARIWISATA		
1.	Meningkatnya industri pariwisata	1. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota 2. Penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata	1 unit 4 dokumen
2.	Meningkatnya industri pariwisata	1. Penguatan promosi-promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik di dalam maupun luar negeri 2. Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik di dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata 3. Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata 4. Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	2 dokumen 2 laporan 20 orang 10 orang
3.	BIDANG PERTANIAN		
1.	Terwujudnya daya saing ekonomi	1. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan • Baycarb	160 liter

	budidaya	yang mengikuti pengembangan kapasitas	
3.	Meningkatnya pengawasan sumber daya perikanan	Jumlah dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten kota	1 dokumen
4.	Meningkatnya produksi dan diverifikasi pangan	1. Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengelolaan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko 2. Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	1 dokumen 70 unit
2.	BIDANG PARIWISATA		
1.	Meningkatnya industri pariwisata	1. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota 2. Penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata	1 unit 4 dokumen
2.	Meningkatnya industri pariwisata	1. Penguatan promosi-promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik di dalam maupun luar negeri 2. Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik di dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata 3. Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata 4. Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	2 dokumen 2 laporan 20 orang 10 orang
3.	BIDANG PERTANIAN		
1.	Terwujudnya daya saing ekonomi	1. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan • Baycarb	160 liter

		2. Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/ KP2B dan lahan berkelanjutan/ LCP2B • Pupuk organik 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa • Paket data internet • Paket pelatihan tematik • Sosialisasi pengukuran geospasial 4. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa • Penyusunan program penyuluhan pertanian Tk. Kabupaten 5. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani 6. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	- 19 paket 19 paket 19 paket 1 paket 2 unit 45 unit
4.	BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
1.	Tersedianya dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	6 dokumen
2.	Tersedianya dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Pertambangan dan lingkungan hidup	Terlaksananya kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Pertambangan dan lingkungan hidup	6 dokumen
3.	Tersedianya dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Energi dan air	Terlaksananya kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Energi dan air	4 dokumen
5.	BIDANG PERDAGANGAN		
1.	Meningkatkan pertumbuhan PDRB	1. Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana	1 dokumen

		2. Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/ KP2B dan lahan berkelanjutan/ LCP2B • Pupuk organik 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa • Paket data internet • Paket pelatihan tematik • Sosialisasi pengukuran geospasial 4. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa • Penyusunan program penyuluhan pertanian Tk. Kabupaten 5. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani 6. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	- 19 paket 19 paket 19 paket 1 paket 2 unit 45 unit
4.	BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
1.	Tersedianya dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	6 dokumen
2.	Tersedianya dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Pertambangan dan lingkungan hidup	Terlaksananya kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Pertambangan dan lingkungan hidup	6 dokumen
3.	Tersedianya dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Energi dan air	Terlaksananya kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Energi dan air	4 dokumen
5.	BIDANG PERDAGANGAN		
1.	Meningkatkan pertumbuhan PDRB	1. Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana	1 dokumen

		distribusi perdagangan 2. Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 kabupaten/kota 3. Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi 4. Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan ritail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM) 5. Jumlah data dan informasi sistem dan jaringan informasi perdagangan	1 laporan 1 laporan 3 UMKM 1 dokumen
2.	Menurunkan laju inflasi daerah	1. Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam satu kabupaten/kota 2. Jumlah peralatan UTTP yang ditera ulang 3. Jumlah pelaku usaha bidang metrologi legal yang di bina	1 laporan 415 unit 530 orang
6.	BIDANG PERINDUSTRIAN		
1.	Meningkatnya laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	1. Jumlah rencana pembangunan industri kabupaten/kota 2. Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1 dokumen 1 dokumen
D.	URUSAN PENUNJANG		
1.	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	1. Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan forkompimda (kali) 2. Jumlah dokumen laporan triwulan pejabat Bupati (4 dok) 3. Jumlah dokumen LKPJ pejabat Bupati Kab. Flores Timur yang disusun (2 dok) 4. Terlaksananya kegiatan koordinasi dan	100% 100% 100% 100%

		distribusi perdagangan 2. Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 kabupaten/kota 3. Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi 4. Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan ritail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM) 5. Jumlah data dan informasi sistem dan jaringan informasi perdagangan	1 laporan 1 laporan 3 UMKM 1 dokumen
2.	Menurunkan laju inflasi daerah	1. Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam satu kabupaten/kota 2. Jumlah peralatan UTTP yang ditera ulang 3. Jumlah pelaku usaha bidang metrologi legal yang di bina	1 laporan 415 unit 530 orang
6.	BIDANG PERINDUSTRIAN		
1.	Meningkatnya laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	1. Jumlah rencana pembangunan industri kabupaten/kota 2. Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1 dokumen 1 dokumen
D.	URUSAN PENUNJANG		
1.	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	1. Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan forkompimda (kali) 2. Jumlah dokumen laporan triwulan pejabat Bupati (4 dok) 3. Jumlah dokumen LKPJ pejabat Bupati Kab. Flores Timur yang disusun (2 dok) 4. Terlaksananya kegiatan koordinasi dan	100% 100% 100% 100%

		fasilitasi urusan pejabat negara (bupati/wakil bupati/DPRD) dan koordinasi pemerintahan umum (bulan)	
		5. Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kecamatan, kelurahan/desa (kecamatan)	100%
		6. Terlaksananya proses penegasan dan penetapan batas administrasi wilayah kecamatan dan kelurahan/desa (kecamatan)	100%
		7. Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan batas administrasi wilayah kabupaten flores timur (kecamatan)	100%
		8. Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan koordinasi proses penataan kecamatan (kecamatan)	100%
		9. Jumlah LPPD dan ILPPD kabupaten flores timur yang disusun (dokumen)	100%
		10. Jumlah evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang dilaksanakan (kali)	100%
		11. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi serta monitoring pelaksanaan kerjasama dan otonomi daerah di kabupaten flores timur (kali)	100%
		12. Jumlah dokumen SPM (buku)	100%
		13. Koordinasi kerja sama daerah kabupaten flores timur (paket)	100%
2.	BIDANG PENGAWAS		
1.	Terselenggaranya pengawasan internal	1. Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	12 laporan
		2. Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	5 laporan
		3. Jumlah laporan hasil reviu laporan	6 laporan
		4. Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	6 laporan
		5. Jumlah laporan hasil pengawasan desa	18 laporan
		6. Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi	

		fasilitasi urusan pejabat negara (bupati/wakil bupati/DPRD) dan koordinasi pemerintahan umum (bulan)	
		5. Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kecamatan, kelurahan/desa (kecamatan)	100%
		6. Terlaksananya proses penegasan dan penetapan batas administrasi wilayah kecamatan dan kelurahan/desa (kecamatan)	100%
		7. Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan batas administrasi wilayah kabupaten flores timur (kecamatan)	100%
		8. Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan koordinasi proses penataan kecamatan (kecamatan)	100%
		9. Jumlah LPPD dan ILPPD kabupaten flores timur yang disusun (dokumen)	100%
		10. Jumlah evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang dilaksanakan (kali)	100%
		11. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi serta monitoring pelaksanaan kerjasama dan otonomi daerah di kabupaten flores timur (kali)	100%
		12. Jumlah dokumen SPM (buku)	100%
		13. Koordinasi kerja sama daerah kabupaten flores timur (paket)	100%
2.	BIDANG PENGAWAS		
1.	Terselenggaranya pengawasan internal	1. Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	12 laporan
		2. Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	5 laporan
		3. Jumlah laporan hasil reviu laporan	6 laporan
		4. Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	6 laporan
		5. Jumlah laporan hasil pengawasan desa	18 laporan
		6. Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi	

		tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	7 dokumen
2.	Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu	1. Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara / Daerah yang ditangani 2. Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	2 laporan 6 laporan
3.	Terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	2 rekomendasi
4.	Terlaksananya pendampingan dan asistensi	1. Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah 2. Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi 3. Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi 4. Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	8 perangkat daerah 8 perangkat daerah 1 kegiatan 7 perangkat daerah
3.	BIDANG PERENCANAAN		
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1. Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD 2. Persentasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 3. Jumlah hasil kelitbangan 4. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	100% 100% 1 dokumen 100%
4.	BIDANG KEUANGAN		
1.	Pengelolaan keuangan daerah	Persentase penatausahaan keuangan daerah	55,00%
2.	Pengelolaan barang milik daerah	Persentase penatausahaan aset	13,75%
5.	BIDANG KEPEGAWAIAN		
1.	Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	1. Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis & jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	5 dokumen

		tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	7 dokumen
2.	Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu	1. Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara / Daerah yang ditangani 2. Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	2 laporan 6 laporan
3.	Terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	2 rekomendasi
4.	Terlaksananya pendampingan dan asistensi	1. Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah 2. Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi 3. Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi 4. Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	8 perangkat daerah 8 perangkat daerah 1 kegiatan 7 perangkat daerah
3.	BIDANG PERENCANAAN		
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1. Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD 2. Persentasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 3. Jumlah hasil kelitbangan 4. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	100% 100% 1 dokumen 100%
4.	BIDANG KEUANGAN		
1.	Pengelolaan keuangan daerah	Persentase penatausahaan keuangan daerah	55,00%
2.	Pengelolaan barang milik daerah	Persentase penatausahaan aset	13,75%
5.	BIDANG KEPEGAWAIAN		
1.	Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	1. Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis & jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	5 dokumen

		2. Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK 3. Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian 4. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian 5. Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	2 dokumen 7 dokumen 3 dokumen 4 dokumen
2.	Mutasi dan promosi ASN	1. Jumlah dokumen hasil pelaksanaan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah 2. Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN 3. Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	4 dokumen 3 dokumen 3 dokumen
3.	Pengembangan kompetensi ASN	1. Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN 2. Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan 3. Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitas sertifikasi jabatan fungsional ASN	2 dokumen 100 orang 100 orang
4.	Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1. Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur 2. Jumlah ASN yang diberikan penghargaan 3. Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	2 dokumen 20 orang 20 laporan
5.	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah ASN yang tersertifikasi lingkup kabupaten/kota	75 orang

		2. Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK 3. Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian 4. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian 5. Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	2 dokumen 7 dokumen 3 dokumen 4 dokumen
2.	Mutasi dan promosi ASN	1. Jumlah dokumen hasil pelaksanaan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah 2. Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN 3. Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	4 dokumen 3 dokumen 3 dokumen
3.	Pengembangan kompetensi ASN	1. Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN 2. Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan 3. Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitas sertifikasi jabatan fungsional ASN	2 dokumen 100 orang 100 orang
4.	Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1. Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur 2. Jumlah ASN yang diberikan penghargaan 3. Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	2 dokumen 20 orang 20 laporan
5.	Sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah ASN yang tersertifikasi lingkup kabupaten/kota	75 orang

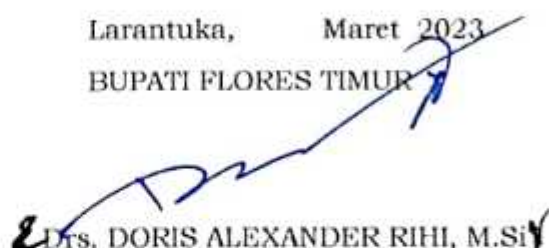
BAB IV

PENUTUP

Dengan telah ditetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023, diharapkan dapat dijadikan pedoman/Ukuran Kinerja Pelaksanaan Pembangunan yang ada di Kabupaten Flores Timur, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan Perjanjian Kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sejalan dengan penetapan RKT tersebut, diharapkan tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi ditunjang dengan kemampuan yang dapat menunjukan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Semoga dengan tersusunnya Dokumen RKT ini, dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana yang telah tertuang dalam RKT ini, maka diharapkan adanya komitmen dari seluruh aparatur guna bersama-sama melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKT Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

Larantuka, Maret 2023
BUPATI FLORES TIMUR


Dts. DORIS ALEXANDER RIHI, M.Si

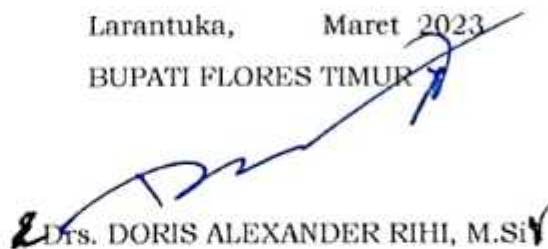
BAB IV

PENUTUP

Dengan telah ditetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023, diharapkan dapat dijadikan pedoman/Ukuran Kinerja Pelaksanaan Pembangunan yang ada di Kabupaten Flores Timur, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan Perjanjian Kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sejalan dengan penetapan RKT tersebut, diharapkan tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi ditunjang dengan kemampuan yang dapat menunjukan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Semoga dengan tersusunnya Dokumen RKT ini, dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana yang telah tertuang dalam RKT ini, maka diharapkan adanya komitmen dari seluruh aparatur guna bersama-sama melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKT Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

Larantuka, Maret 2023
BUPATI FLORES TIMUR


Drs. DORIS ALEXANDER RIHI, M.Si



**BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 88 TAHUN 2018**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur, diperlukan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. bahwa Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan merupakan Prosedur Kerja dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area perubahan ketatalaksanaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 28 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 28 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 71);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 71), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 74 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur; (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 74);
9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 81 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur.
5. Bagian adalah Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
6. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
9. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
10. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SOP-AP adalah Standar Operasional Prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai standarisasi prosedur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh ASN dalam melaksanakan tugas;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ASN dan organisasi secara keseluruhan;
- c. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- d. menjamin konsistensi pelayanan publik, baik dari sisi waktu maupun prosedur;
- e. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan;
- f. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh ASN dalam melaksanakan tugas;
- g. memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh ASN dalam melaksanakan tugas;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur.
5. Bagian adalah Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
6. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
9. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
10. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SOP-AP adalah Standar Operasional Prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai standarisasi prosedur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh ASN dalam melaksanakan tugas;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ASN dan organisasi secara keseluruhan;
- c. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- d. menjamin konsistensi pelayanan publik, baik dari sisi waktu maupun prosedur;
- e. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan;
- f. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh ASN dalam melaksanakan tugas;
- g. memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh ASN dalam melaksanakan tugas;

- h. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
- i. memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi; dan
- j. membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan sehingga dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berasaskan:

- a. Kemudahan dan kejelasan
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh ASN.
- b. Efisiensi dan efektifitas
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas.
- c. Keselarasan
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur-prosedur standar lain yang terkait.
- d. Keterukuran
Output dari prosedur-prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas atau mutu baku tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhaslilan.
- e. Dinamis
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
- f. Berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna (*customer's needs*) sehingga dapat memberikan *kepuasan* kepada pengguna.
- g. Kepatuhan hukum
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- h. Kepastian hukum
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati dan dilaksanakan.

Pasal 5

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Subyek dan Obyek; dan
- b. Jenis SOP-AP.

BAB III SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 6

- (1) Subyek SOP-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah ASN.
- (2) Obyek SOP-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah setiap jenis tugas dan fungsi ASN.

BAB IV JENIS STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 7

- (1) SOP-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bagian Kesejahteraan Rakyat:
 1. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan manasik haji; dan
 2. Pemberian bantuan beasiswa mahasiswa kedokteran.
 - b. Bagian Pemerintahan Umum:
 1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur;
 2. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Flores Timur; dan
 3. Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa/Kelurahan.
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat
Penyusunan Naskah Sambutan/pidato Bupati/Wakil Bupati Flores Timur.
 - d. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 1. Pengiriman Paket Lelang;
 2. Pendistribusian Paket Lelang;
 3. Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa;
 4. Pengiriman Hasil Lelang;
 5. Pengarsipan Paket Lelang;
 6. Kaji Ulang Dokumen Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Barang dan Jasa;
 7. Pendaftaran Penyedia;
 8. Pengajuan Perubahan Data Penyedia;
 9. Perubahan Jadwal Lelang;
 10. Pemeriksaan Fisik Lelang; dan
 11. Penanganan Sanggah dan Pengaduan.
 - e. Bagian Hukum:
 1. Penyusunan Program Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 2. Pembentukan Peraturan Daerah;
 3. Pembentukan Peraturan Bupati;

4. Pembentukan Keputusan Bupati;
 5. Penanganan Perkara;
 6. Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Desa;
 7. Pembentukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 8. Penyusunan Nota Kesepahaman;
 9. Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama;
 10. Penyusunan Lembaran Daerah;
 11. Penyusunan Berita Daerah; dan
 12. Pendokumentasian Produk Hukum Daerah.
- f. Bagian Organisasi;
1. Penyusunan LKIP Kabupaten Flores Timur;
 2. Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Flores Timur;
 3. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
 4. Penyusunan Dokumen Informasi Jabatan Kabupaten Flores Timur;
 5. Penyusunan SOP-AP Daerah;
 6. Penyusunan Dokumen Analisis Beban Kerja (ABK) Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur; dan
 7. Penyusunan Dokumen Standar Kompetensi Manajerial (SKM) Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.
- (2) Format Identitas SOP-AP dan Bagan Alir (*Flowcharts*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

SOP-AP yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini karena kekhususannya, tetap mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, ketentuan mengenai SOP-AP Sekretariat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 28 Desember 2018
BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 28 Desember 2018

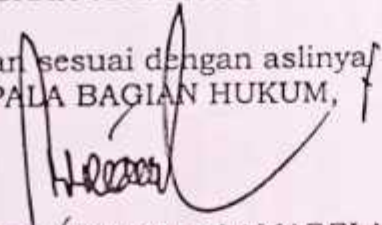
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700525 199703 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

SUB BAGIAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Desember 2017

Tanggal Revisi

November 2018

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

BUPATI FLORES TIMUR

Nama SOP

Penyusunan LKIP Kabupaten Flores Timur

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Daerah Kabupaten 11 Nomor 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur
4. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur

Keterkaitan SOP

1. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
2. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)

Peringatan

1. Pelaporan LKIP memiliki batas waktu yang wajib untuk diperhatikan agar tidak sampai terjadi keterlambatan dalam pengiriman LKIP ke Provinsi, Kemenpan dan RB, Kemendagri dan Bappenas

Kualifikasi Pelaksana

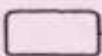
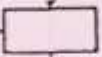
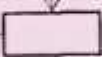
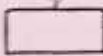
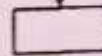
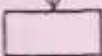
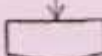
1. Sarjana Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Hukum
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi
3. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait persoalan yang ada
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
5. Memiliki tingkat ketelitian yang baik
6. Memiliki kemampuan terkait mekanisme pembuatan laporan

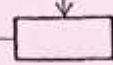
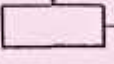
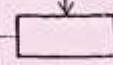
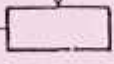
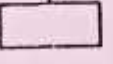
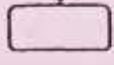
Peralatan/ Perlengkapan

Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer, Peraturan Perundangan-undangan terkait, Lembar Kerja/ Rencana Kerja

Pencatatan & Pendataan

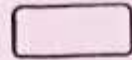
1. Disimpan dalam bentuk file softcopy dan hardcopy
2. Pada proses penyusunan LKIP Kabupaten Flores Timur, data agar dapat diterima dan dihimpun tepat waktu oleh Bagian Organisasi

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Bagian Organisasi	Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tim Sekretariat	Tim Penyusun LAKIP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur					SK Bupati	15 menit	SK Bupati	Pembentukan Tim dengan SK Bupati
2	Mengonsep surat untuk dikirim kepada SKPD dalam rangka permintaan data kinerja dan Laporan Kinerja SKPD					Konsep Surat Keluar	10 menit	Konsep Surat Keluar	Surat dikonsep Kasubag
3	Mengoreksi surat untuk yang dikonsep Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi					Konsep Surat Keluar	5 menit	Konsep Surat Keluar	Surat telah dikoreksi Kabag
4	Mengetik surat, mengagendakan dan mendistribusikan surat kepada SKPD dan Tim Penyusun dalam rangka permintaan LKIP SKPD serta Rapat awal penyusunan LKIP					Surat Keluar	30 menit	Surat Keluar	Surat siap didistribusi ke SKPD dan Tim Penyusun
5	Memberi petunjuk penyusunan LKIP Kabupaten Flores Timur kepada Kasubag Ketatalaksanaan dan Kinerja dan Staf Bagian Organisasi					Petunjuk teknis penyusunan LKIP	15 Menit	Petunjuk teknis penyusunan LKIP	Persiapan penyusunan LKIP Kabupaten
6	Memberikan pelayanan kepada SKPD terkait konsultasi penyusunan Laporan Kinerja SKPD					Petunjuk teknis penyusunan LKIP	1 minggu	Petunjuk teknis penyusunan LKIP	Persiapan penyusunan LKIP Kabupaten
7	Menerima dan menghimpun dokumen LKIP dari semua SKPD				 	Petunjuk teknis penyusunan LKIP	1 minggu	Petunjuk teknis penyusunan LKIP	Persiapan penyusunan LKIP Kabupaten

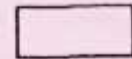
8	Menyusun draf dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur berdasarkan data Laporan Kinerja SKPD				Laporan Kinerja SKPD, Perjanjian Kinerja, RENSTRA SKPD, RPJMD	1 Minggu	Draf Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	Penyusunan Draf awal LKIP Kabupaten Flores Timur
9	Mengoreksi draf awal dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya dibahas dan disempurnakan bersama TIM Penyusun LKIP Kabupaten Flores Timur				Laporan Kinerja SKPD, Perjanjian Kinerja, RENSTRA SKPD, RPJMD	1 Minggu	Draf Dokumen LKIP Kab. Flores Timur	Draf Dokumen LKIP Kab. Flores Timur yang sudah dikoreksi
10	Melaksanakan proses penyempurnaan dan perbaikan atas draf LKIP antara lain: Pembahasan terkait finalisasi penyusunan dan rencana kerja TIM, Menganalisa RPJMD dan RENSTRA SKPD, Menyempurnakan draf awal LKIP				Laporan Kinerja SKPD, Perjanjian Kinerja, RENSTRA SKPD, RPJMD	1 Minggu	Draf Dokumen LKIP Kab. Flores Timur	Draf Dokumen LKIP Kab. Flores Timur yang sudah diperbaiki dan disempurnakan
11	Mengirim dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur kepada Inspektorat Kabupaten untuk direview				Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	1 Minggu	Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur siap direview
12	Melakukan perbaikan/finalisasi dokumen LKIP sesuai hasil review Inspektorat Kabupaten Flores Timur				Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	1 Minggu	Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	Finalisasi Dokumen LKIP Kab Flores Timur
13	Mengetik surat pengantar penyampaian LKIP Kabupaten Flores Timur di tingkat Provinsi dan Pusat setelah disetujui dan ditandatangani oleh Bupati Flores Timur				Surat Pengantar Penyampaian LKIP	15 Menit	Surat Pengantar Penyampaian LKIP	Surat Pengantar Penyampaian LKIP di tingkat Provinsi dan Kementerian
14	Penyampaian LKIP Kabupaten Flores Timur kepada Gubernur NTT melalui Biro Organisasi Setda Provinsi NTT di Kupang				Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	4 Hari	Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	Penyampaian Dokumen LKIP di Provinsi
15	Penyampaian LKIP Kabupaten Flores Timur ke Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas RI di Jakarta				Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	5 Hari	Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	Penyampaian Dokumen LKIP di Pusat

KETERANGAN SIMBOL FLOWCHARTS:

1. Simbol Kapsul



2. Simbol Kotak



3. Simbol Belah Ketupat



4. Simbol Segilima



5. Simbol AnakPanah



Kegiatan mulai dan berakhir

Proses atau kegiatan eksekutif

Kegiatan pengambilan keputusan

Pindah Halaman

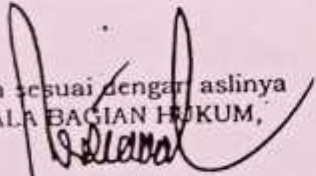
Alur Proses

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA
PEMBINA TK. I
NIP. 19700525 199703 1 007